

Statistik

Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2008 - 2012
Agricultural Infrastructure and Facilities Statistic 2012



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
2013

Profil Singkat

Terbentuk berdasarkan Permentan Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari enam unit eselon II, yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida, dan Sekretariat Direktorat Jenderal. Unit-unit kerja tersebut tergabung dalam Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai restrukturisasi organisasi yang melibatkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan perundang-undangan

Brief Profile

Formed based on Minister of Agriculture Regulation Number 61/Permentan/OT.140/10/2010 concerning Organization and Administration of the Ministry of Agriculture, Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities consists of six units echelon II, named The Directorate of Land Extensification and Management, Directorate of Irrigation Water Management, Directorate of Agricultural Finance, Directorate of Agricultural Tool and Machinery, Directorate of Fertilizers and Pesticides, and the Secretariat of the Directorate General. The working units incorporated in the Directorate General for Agricultural Infrastructure and Facility were an organizational restructuring involving the Directorate General of Land and Water Management, the General Secretariat and the Directorate General of Food Crops

Direktorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities duty is formulating and implementing policies and technical standardization in the field of agriculture infrastructure according to the legislation.

The function of Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities are as follow:

1. *Formulation of policies on land management, irrigation water, finance, fertilizers, pesticides, and agricultural tools and machineries in accordance with the law.*

2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian
 5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
2. *Implementation of policy in the field of land management, irrigation water, finance, fertilizers, pesticides, and agricultural tools and machineries in accordance with in accordance with the laws*
 3. *Preparation of norms, standards, procedures and criteria in the areas of land management, irrigation water, finance, fertilizers, pesticides, and agricultural tools and machineries in accordance with the laws*
 4. *Providing technical guidance and evaluation in the field of management of land, water irrigation, finance, fertilizers, pesticides, and agricultural tools and machineries*
 5. *Implementation of the administration of the Directorate General of Agricultural Infrastructure*

Visi yang dikedepankan untuk medukung terlaksananya tugas tersebut adalah mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk pembangunan pertanian berkelanjutan

Dalam perkembangannya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjadi satu unit kerja yang sangat penting dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia, dalam perannya sebagai

The vision put forward to endorse the implementation of the duty is to conduct the Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities as an activator of the availability of infrastructure and agriculture, to sustainable agricultural development.

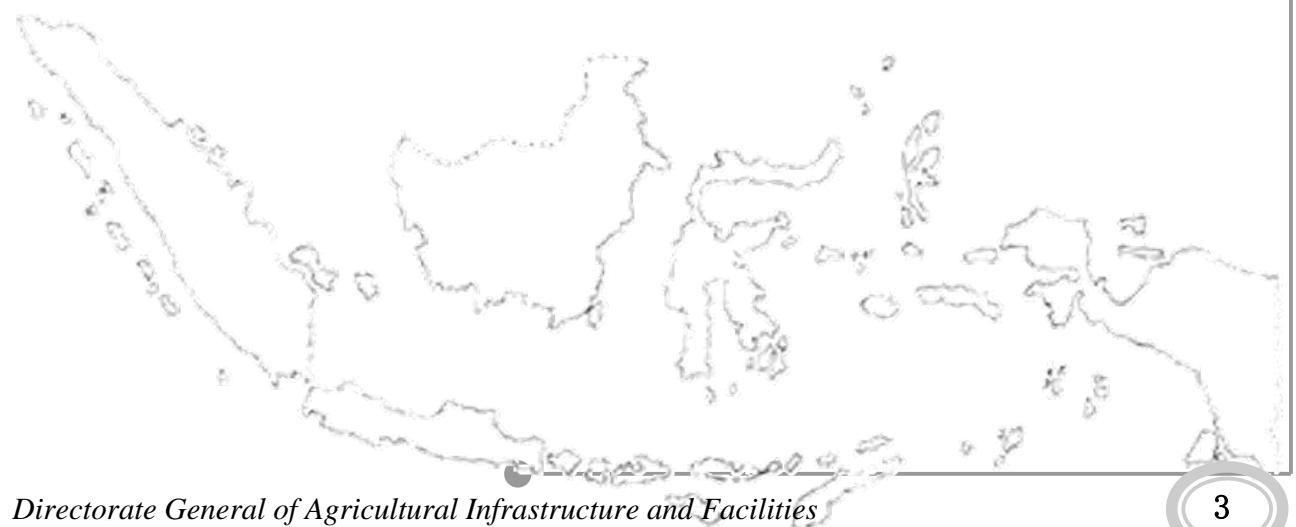
Further, Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities has became an important working unit in the development of agriculture sector in Indonesia, in his role as formulator and implementer of policies and

perumus dan pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis prasarana dan sarana pertanian.

Dukungan penyediaan prasarana dan sarana pertanian menjadi sangat penting dalam perkembangan dunia pertanian saat ini. Mekanisasi dan peningkatan fasilitas dan infrastruktur pertanian terbukti memberikan kontribusi positif dalam efisiensi proses pertanian, baik pengolahan sebelum tanam maupun pada saat proses on farm hingga pengolahan paska panen.

technical standardization of agricultural infrastructure.

The sustainable provision of infrastructure and agriculture is very important in nowadays development of agriculture sector. The improved mechanization and agricultural infrastructure facilities has proven to make a positive contribution to the efficiency of the agricultural process, either in pre-production, on-farm, or in post-harvest processing.







PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN

Land Extensification And Management

Tugas Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan dan pengelolaan lahan .

Directorate of Land Extensification and Management duty is preparing the formulation and implementation of policies, preparation of norms, standards, procedures, and criteria, as well as providing technical guidance and evaluation in land extensification and management

Pada tahun 2012, Perluasan Areal mencakup empat aspek, yaitu perluasan sawah, perluasan areal hortikultura, perluasan areal perkebunan, dan perluasan areal peternakan. Dimana dalam hal ini, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat satu aspek yang dalam menu kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan tidak dilaksanakan lagi, yaitu aspek perluasan areal lahan kering.

In 2012, Land Extensification is divided into four aspects, they are land crops extensification, horticulture, plantation, and husbandry land extensification. If we compare it with previous years menu, there was an elimination in program menu of Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities. The eliminated menu is the upland extensification.

Kegiatan perluasan areal sawah pada tahun 2012 berhasil dilaksanakan pada lahan seluasan 98.432 ha, 77,26% lebih luas dari tahun sebelumnya. Sementara untuk perluasan areal hortikultura, perkebunan, dan peternakan mengalami tren menurun dari tahun sebelumnya, dengan persentase masing-masing 61,19%, 63,32%, dan 42,08% lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Land crops extensifications in 2012 have been successfully done in 98.432 hectares land, it is 77,26% wider than previous year. Meanwhile, for horticulture, plantation, and husbandry extensification were declining -in wide, from the previous years. The declining percentage of each extensification aspect is 61,19%, 63,32%, and 42,08%.

Grafik pelaksanaan kegiatan perluasan areal selama tahun 2008 hingga 2012 disajikan pada Gambar 1.

Graph of land extensification done in 2008 until 2012 is presented in Figure 1.

Pelaksanaan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), di tahun 2012 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Persentase penurunan volume kegiatan UPPO mencapai 91,18%.

The implementation of Organic Fertilizer Processing Unit (UPPO), in the year 2012 is also decreased significantly. The percentage decrease of UPPO program in volume reached 91,18%.

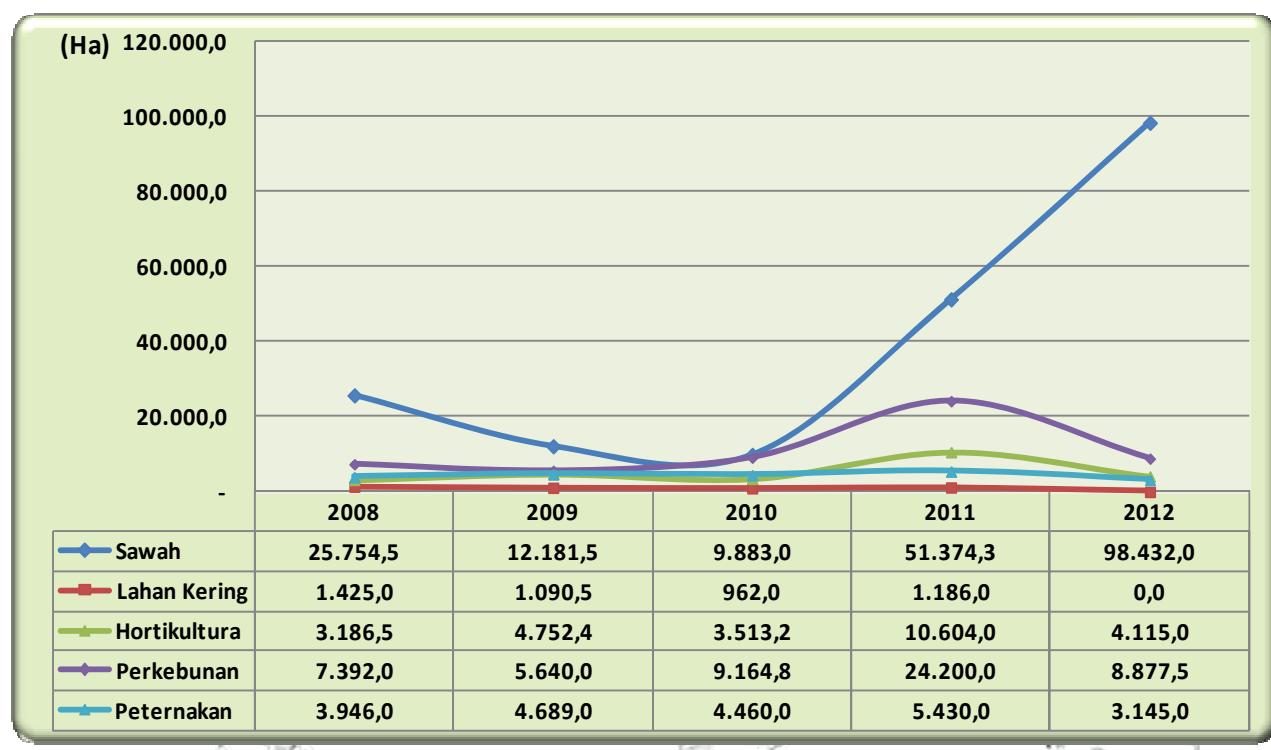
Sementara untuk kegiatan Optimasi Lahan dan Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) volume realisasinya meningkat dengan signifikan (lebih dari 100%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase peningkatan realisasi kegiatannya masing - masing adalah sebesar 302,95% dan 469,7%.

Tren berbeda diperlihatkan pada pelaksanaan kegiatan Jalan Pertanian dan Pra-Pasca Sertifikasi Lahan Petani yang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Persentase penurunan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian adalah sebesar 71,41%. Sementara untuk kegiatan Pra-Pasca Sertifikasi Lahan Petani mengalami penurunan sebesar 45,36%.

As for the Land Optimization and SRI (System of Rice Intensification) volume realization increased significantly (over 100%) when compared with the previous year. Volume increase in percentage of each programs up to 302.95% and 469.7%.

Different trend is shown in the execution of the Agriculture Road Extension and Pre-Post- Farmer's Land Certification which were showed a significant decline. The percentage decrease in execution of Agriculture Roads Development is up to 71.41%. As for Pre-Post-Farmer's Land Certification decreased by 45.36%.

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Kegiatan Perluasan Areal dari Tahun 2008 hingga 2012
Figure 1.1 Graph of Land Extensification in 2008 until 2012



Tabel 1.1
Table

Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah)
Land Crops Extensification (Rice Field)
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total 2008 – 2012
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	200,0	577,0	800,0	7.530,0	10.126,0	19.233,0
2	Sumatera Utara	365,0	287,5	350,0	828,0	1.577,0	3.407,5
3	Sumatera Barat	360,0	562,0	570,0	450,0	2.150,0	4.092,0
4	Riau	922,0	425,0	901,0	2.172,3	4.650,0	9.070,3
5	Jambi	250,0	490,0	200,0	1.600,0	3.000,0	5.540,0
6	Sumatera Selatan	1.815,0	762,0	507,0	2.371,1	7.150,0	12.605,1
7	Bengkulu	490,0	248,0	37,0	712,5	892,0	2.379,5
8	Lampung	175,0	104,0	400,0	2.537,2	2.130,0	5.346,2
9	Bangka Belitung	600,0	196,0	200,0	1.476,0	2.880,0	5.352,0
10	Kepulauan Riau	60,0	100,0	0,0	51,0	100,0	311,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	30,0	50,0	50,0	0,0	200,0	330,0
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
17	Bali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	100,0	100,0	200,0	917,5	4.700,0	6.017,5
19	Nusa Tenggara Timur	210,0	200,0	300,0	2.250,0	5.001,0	7.961,0
20	Kalimantan Barat	870,0	840,0	700,0	2.961,7	6.150,0	11.521,7
21	Kalimantan Tengah	598,0	500,0	600,0	2.600,0	5.550,0	9.848,0
22	Kalimantan Selatan	2.492,0	1.214,0	536,0	2.067,5	3.375,0	9.684,5
23	Kalimantan Timur	1.932,5	587,0	500,0	2.150,3	5.635,0	10.804,8
24	Sulawesi Utara	781,0	460,0	0,0	250,0	496,0	1.987,0
25	Sulawesi Tengah	1.273,0	500,0	854,0	1.766,9	3.170,0	7.563,9
26	Sulawesi Selatan	2.060,0	891,0	317,0	2.211,0	7.350,0	12.829,0
27	Sulawesi Tenggara	2.350,0	337,0	800,0	4.721,5	4.195,0	12.403,5
28	Gorontalo	100,0	300,0	100,0	955,1	1.000,0	2.455,1
29	Sulawesi Barat	2.900,0	1.100,0	250,0	1.700,0	4.800,0	10.750,0
30	Maluku	1.305,0	350,0	136,0	1.915,0	2.630,0	6.336,0
31	Maluku Utara	1.466,0	378,0	0,0	2.099,8	2.745,0	6.688,8
32	Papua	1.750,0	430,0	460,0	2.600,0	4.850,0	10.090,0
33	Papua Barat	300,0	193,0	115,0	480,0	1.850,0	2.938,0
Indonesia		25.754,5	12.181,5	9.883,0	51.374,3	98.432,0	197.625,3

Tabel 1.2
Table

Perluasan Areal Lahan Kering
Upland Extensification
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total Ha
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0
2	Sumatera Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lampung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	200,0	100,0	50,0	50,0	0,0	400,0
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Banten	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	125,0
17	Bali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	150,0	225,0	200,0	195,0	0,0	770,0
19	Nusa Tenggara Timur	175,0	303,0	250,0	240,0	0,0	968,0
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	9,0	30,0	0,0	39,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Sulawesi Utara	150,0	100,0	100,0	100,0	0,0	450,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Sulawesi Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	62,5	0,0	0,0	0,0	62,5
28	Gorontalo	300,0	150,0	43,0	200,0	0,0	693,0
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	225,0	0,0	225,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	250,0	125,0	0,0	0,0	0,0	375,0
33	Papua Barat	100,0	0,0	150,0	146,0	0,0	396,0
Indonesia		1.425,0	1.090,5	962,0	1.186,0	0,0	4.663,5

Tabel 1.3
Table

Perluasan Areal Tanaman Hortikultura
Horticulture Land Extensification
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	330,0	340,0	100,0	505,0	320,0	1.595,0
2	Sumatera Utara	373,0	210,0	70,0	405,0	90,0	1.148,0
3	Sumatera Barat	0,0	311,5	50,0	690,0	170,0	1.221,5
4	Riau	200,0	110,0	117,0	265,0	90,0	782,0
5	Jambi	200,0	100,0	127,0	383,0	110,0	920,0
6	Sumatera Selatan	150,0	207,0	100,0	350,0	80,0	887,0
7	Bengkulu	150,0	200,5	107,0	360,0	320,0	1.137,5
8	Lampung	0,0	0,0	60,0	172,0	60,0	292,0
9	Bangka Belitung	100,0	80,0	60,0	140,0	60,0	440,0
10	Kepulauan Riau	45,0	50,0	82,0	205,0	0,0	382,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	25,0	100,0	110,00	345,0	190,0	770,0
13	Jawa Tengah	0,0	120,0	130,0	180,0	170,0	600,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	0,0	143,4	280,00	330,0	460,0	1.213,4
16	Banten	0,0	58,0	25,0	70,0	30,0	183,0
17	Bali	0,0	120,0	25,0	60,0	0,0	205,0
18	Nusa Tenggara Barat	48,5	50,0	150,0	90,0	0,0	338,5
19	Nusa Tenggara Timur	135,0	255,0	100,0	760,0	200,0	1.450,0
20	Kalimantan Barat	150,0	270,0	315,0	345,0	60,0	1.140,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	50,0	99,0	349,0	90,0	588,0
22	Kalimantan Selatan	100,0	110,0	68,0	230,0	130,0	638,0
23	Kalimantan Timur	150,0	155,0	313,0	400,0	30,0	1.048,0
24	Sulawesi Utara	100,0	148,0	100,0	605,0	60,0	1.013,0
25	Sulawesi Tengah	200,0	240,0	134,0	400,0	120,0	1.094,0
26	Sulawesi Selatan	200,0	441,0	135,0	690,0	425,0	1.891,0
27	Sulawesi Tenggara	255,0	265,0	140,0	940,0	150,0	1.750,0
28	Gorontalo	125,0	60,0	147,2	302,0	0,0	634,2
29	Sulawesi Barat	0,0	100,0	45,0	243,0	120,0	508,0
30	Maluku	50,0	155,0	79,0	215,0	100,0	599,0
31	Maluku Utara	0,0	38,0	0,0	175,0	120,0	333,0
32	Papua	0,0	135,0	130,0	285,0	270,0	820,0
33	Papua Barat	100,0	130,0	115,0	115,0	90,0	550,0
Indonesia		3.186,5	4.752,4	3.513,2	10.604,0	4.115,0	26.171,1

Tabel 1.4
Table

Perluasan Areal Tanaman Perkebunan
Plantations Area Extensification
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	170,0	130,0	600,0	1.450,0	250,0	2.600,0
2	Sumatera Utara	450,0	325,0	475,0	1.050,0	300,0	2.600,0
3	Sumatera Barat	325,0	200,0	500,0	1.300,0	300,0	2.625,0
4	Riau	200,0	210,0	425,0	850,0	500,0	2.185,0
5	Jambi	380,0	328,0	575,0	925,0	300,0	2.508,0
6	Sumatera Selatan	125,0	160,0	475,0	950,0	200,0	1.910,0
7	Bengkulu	300,0	230,0	550,0	950,0	300,0	2.330,0
8	Lampung	100,0	135,0	200,0	500,0	306,5	1.241,5
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	150,0	0,0	100,0	250,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	45,0	100,0	145,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	0,0	0,0	50,00	0,0	100,0	150,0
13	Jawa Tengah	100,0	0,0	0,0	0,0	50,0	150,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	0,0	0,0	75,00	150,0	100,0	325,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
17	Bali	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	200,0	275,0	475,0	900,0	350,0	2.200,0
19	Nusa Tenggara Timur	450,0	300,0	950,0	2.300,0	600,0	4.600,0
20	Kalimantan Barat	225,0	275,0	350,0	1.435,0	207,0	2.492,0
21	Kalimantan Tengah	450,0	424,0	850,0	2.000,0	440,0	4.164,0
22	Kalimantan Selatan	1.850,0	1.503,0	138,0	1.250,0	258,0	4.999,0
23	Kalimantan Timur	75,0	0,0	0,0	450,0	350,0	875,0
24	Sulawesi Utara	350,0	230,0	351,8	800,0	200,0	1.931,8
25	Sulawesi Tengah	225,0	275,0	475,0	1.100,0	370,0	2.445,0
26	Sulawesi Selatan	250,0	100,0	575,0	1.095,0	350,0	2.370,0
27	Sulawesi Tenggara	325,0	195,0	450,0	1.525,0	450,0	2.945,0
28	Gorontalo	150,0	170,0	275,0	675,0	350,0	1.620,0
29	Sulawesi Barat	158,0	75,0	0,0	1.025,0	300,0	1.558,0
30	Maluku	126,0	0,0	0,0	0,0	65,0	191,0
31	Maluku Utara	63,0	0,0	150,0	475,0	150,0	838,0
32	Papua	345,0	100,0	50,0	450,0	1.045,0	1.990,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	550,0	336,0	886,0
Indonesia		7.392,0	5.640,0	9.164,8	24.200,0	8.877,5	55.274,3

Tabel 1,5
Table

Perluasan Areal Tanaman Peternakan
Husbandry Area Extensification
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	90,0	200,0	264,0	250,0	120,0	924,0
2	Sumatera Utara	220,0	40,0	140,0	150,0	60,0	610,0
3	Sumatera Barat	140,0	185,0	169,0	260,0	240,0	994,0
4	Riau	80,0	0,0	56,0	50,0	0,0	186,0
5	Jambi	125,0	68,0	90,0	270,0	50,0	603,0
6	Sumatera Selatan	420,0	280,0	340,0	160,0	80,0	1.280,0
7	Bengkulu	146,0	135,0	180,0	180,0	40,0	681,0
8	Lampung	80,0	107,0	110,0	50,0	70,0	417,0
9	Bangka Belitung	7,0	0,0	0,0	20,0	0,0	27,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	20,0	30,0	0,0	50,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	312,0	267,0	326,00	170,0	150,0	1.225,0
13	Jawa Tengah	140,0	40,0	130,0	250,0	60,0	620,0
14	DI. Yogyakarta	40,0	60,0	0,0	0,0	20,0	120,0
15	Jawa Timur	130,0	180,0	150,00	215,0	140,0	815,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
17	Bali	130,0	120,0	105,0	100,0	60,0	515,0
18	Nusa Tenggara Barat	190,0	400,0	240,0	190,0	50,0	1.070,0
19	Nusa Tenggara Timur	230,0	610,0	520,0	480,0	140,0	1.980,0
20	Kalimantan Barat	120,0	160,0	110,0	135,0	120,0	645,0
21	Kalimantan Tengah	160,0	120,0	170,0	190,0	60,0	700,0
22	Kalimantan Selatan	126,0	163,0	110,0	130,0	140,0	669,0
23	Kalimantan Timur	80,0	278,0	330,0	370,0	120,0	1.178,0
24	Sulawesi Utara	70,0	20,0	0,0	20,0	60,0	170,0
25	Sulawesi Tengah	100,0	95,0	280,0	320,0	20,0	815,0
26	Sulawesi Selatan	120,0	451,0	200,0	310,0	230,0	1.311,0
27	Sulawesi Tenggara	160,0	255,0	40,0	325,0	100,0	880,0
28	Gorontalo	120,0	130,0	100,0	110,0	100,0	560,0
29	Sulawesi Barat	80,0	85,0	0,0	20,0	60,0	245,0
30	Maluku	50,0	0,0	40,0	50,0	65,0	205,0
31	Maluku Utara	40,0	0,0	0,0	70,0	80,0	190,0
32	Papua	160,0	150,0	170,0	475,0	310,0	1.265,0
33	Papua Barat	80,0	90,0	70,0	40,0	400,0	680,0
Indonesia		3.946,0	4.689,0	4.460,0	5.430,0	3.145,0	21.670,0

Tabel 1.6
Table

Unit Pengolah Pupuk Organik
Organic Fertilizer Processing Unit
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total	Unit
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Aceh	0,0	8,0	28,0	1,0	37,0		
2	Sumatera Utara	3,0	17,0	37,0	4,0	61,0		
3	Sumatera Barat	1,0	4,0	41,0	4,0	50,0		
4	Riau	0,0	12,0	23,0	5,0	40,0		
5	Jambi	0,0	1,0	21,0	1,0	23,0		
6	Sumatera Selatan	0,0	8,0	37,0	0,0	45,0		
7	Bengkulu	1,0	1,0	57,0	1,0	60,0		
8	Lampung	0,0	7,0	36,0	4,0	47,0		
9	Bangka Belitung	0,0	3,0	3,0	0,0	6,0		
10	Kepulauan Riau	0,0	3,0	5,0	0,0	8,0		
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12	Jawa Barat	9,0	39,0	92,0	14,0	154,0		
13	Jawa Tengah	8,0	46,0	202,0	19,0	275,0		
14	DI. Yogyakarta	3,0	6,0	31,0	1,0	41,0		
15	Jawa Timur	10,0	41,0	106,0	13,0	170,0		
16	Banten	2,0	7,0	14,0	5,0	28,0		
17	Bali	0,0	11,0	23,0	3,0	37,0		
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	2,0	37,0	1,0	40,0		
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	7,0	26,0	3,0	36,0		
20	Kalimantan Barat	0,0	6,0	35,0	0,0	41,0		
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0		
22	Kalimantan Selatan	0,0	9,0	18,0	4,0	31,0		
23	Kalimantan Timur	0,0	5,0	20,0	2,0	27,0		
24	Sulawesi Utara	0,0	3,0	23,0	0,0	26,0		
25	Sulawesi Tengah	0,0	4,0	26,0	0,0	30,0		
26	Sulawesi Selatan	4,0	25,0	63,0	6,0	98,0		
27	Sulawesi Tenggara	0,0	6,0	45,0	1,0	52,0		
28	Gorontalo	0,0	1,0	17,0	1,0	19,0		
29	Sulawesi Barat	0,0	3,0	14,0	3,0	20,0		
30	Maluku	0,0	0,0	6,0	1,0	7,0		
31	Maluku Utara	0,0	1,0	7,0	1,0	9,0		
32	Papua	0,0	10,0	26,0	1,0	37,0		
33	Papua Barat	0,0	4,0	13,0	1,0	18,0		
Indonesia		41,0	300,0	1.134,0	100,0	1.575,0		

Tabel 1.7
Table

Pengembangan Jalan Pertanian
Agriculture Road Extension
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	25,0	63,0	85,0	82,0	19,0	274,0
2	Sumatera Utara	48,0	93,0	48,0	81,0	36,0	306,0
3	Sumatera Barat	39,5	49,6	45,0	60,0	4,0	198,1
4	Riau	25,0	19,2	28,0	37,0	47,0	156,2
5	Jambi	20,5	63,4	20,0	48,0	4,0	155,9
6	Sumatera Selatan	35,0	41,0	25,0	76,0	4,0	181,0
7	Bengkulu	13,8	46,0	55,0	61,0	3,0	178,8
8	Lampung	18,5	39,1	15,0	59,0	24,0	155,6
9	Bangka Belitung	6,1	7,0	3,0	14,0	0,0	30,1
10	Kepulauan Riau	4,0	6,3	0,0	21,0	0,0	31,3
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	21,0	23,0	37,0	43,0	8,0	132,0
13	Jawa Tengah	39,0	77,5	55,0	108,0	109,0	388,5
14	DI. Yogyakarta	9,0	5,0	5,0	3,0	5,0	27,0
15	Jawa Timur	54,4	55,5	49,0	119,0	58,0	335,9
16	Banten	6,0	14,9	11,0	9,0	2,0	42,9
17	Bali	35,0	74,8	17,0	62,5	27,0	216,3
18	Nusa Tenggara Barat	21,5	26,0	42,0	45,0	9,0	143,5
19	Nusa Tenggara Timur	40,0	88,0	22,0	26,0	7,0	183,0
20	Kalimantan Barat	55,4	14,0	42,0	52,0	2,0	165,4
21	Kalimantan Tengah	22,2	49,3	50,0	113,0	0,0	234,5
22	Kalimantan Selatan	24,0	35,4	39,0	34,0	2,0	134,4
23	Kalimantan Timur	17,5	27,0	24,0	24,0	20,0	112,5
24	Sulawesi Utara	13,0	37,0	28,0	64,0	6,0	148,0
25	Sulawesi Tengah	11,8	20,4	31,0	38,0	4,0	105,2
26	Sulawesi Selatan	43,5	58,0	30,0	34,0	25,0	190,5
27	Sulawesi Tenggara	28,7	41,0	43,0	49,0	4,0	165,7
28	Gorontalo	12,0	18,3	5,0	3,0	0,0	38,3
29	Sulawesi Barat	17,0	41,0	5,0	28,0	0,0	91,0
30	Maluku	6,0	2,0	10,0	42,0	0,0	60,0
31	Maluku Utara	10,2	4,0	10,0	28,0	5,0	57,2
32	Papua	52,3	32,0	48,0	76,0	13,0	221,3
33	Papua Barat	36,0	20,5	23,0	24,0	0,0	103,5
Indonesia		810,7	1.192,2	950,0	1.563,5	447,0	4.963,4

Tabel 1.8
Table

Optimasi Lahan
Land Optimization
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	540,0	650,0	985,0	1.750,0	5.130,0	9.055,0
2	Sumatera Utara	965,0	1.234,0	514,0	2.950,0	5.007,0	10.670,0
3	Sumatera Barat	355,0	275,0	280,0	1.400,0	3.112,0	5.422,0
4	Riau	116,0	170,0	300,0	800,0	2.666,0	4.052,0
5	Jambi	565,0	900,0	2.042,0	1.345,0	3.200,0	8.052,0
6	Sumatera Selatan	935,0	740,0	2.441,0	2.273,0	3.850,0	10.239,0
7	Bengkulu	180,0	885,0	2.140,0	1.500,0	6.055,0	10.760,0
8	Lampung	250,0	2.626,0	1.908,0	1.120,0	5.450,0	11.354,0
9	Bangka Belitung	10,0	217,0	100,0	150,0	0,0	477,0
10	Kepulauan Riau	0,00	0,00	0,00	20,0	0,0	20,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	1.065,0	500,0	500,0	2.750,0	15.350,0	20.165,0
13	Jawa Tengah	1.674,0	225,0	593,0	3.650,0	26.491,0	32.633,0
14	DI. Yogyakarta	135,0	2.299,0	1.066,0	1.180,0	2.200,0	6.880,0
15	Jawa Timur	1.183,0	195,0	505,0	4.800,0	25.800,0	32.483,0
16	Banten	200,0	75,0	50,0	350,0	1.700,0	2.375,0
17	Bali	470,0	864,0	290,0	1.100,0	3.500,0	6.224,0
18	Nusa Tenggara Barat	435,0	1.308,0	487,0	1.550,0	5.350,0	9.130,0
19	Nusa Tenggara Timur	905,0	1.935,0	2.593,0	850,0	7.172,0	13.455,0
20	Kalimantan Barat	1.323,0	235,0	1.190,0	1.295,0	9.400,0	13.443,0
21	Kalimantan Tengah	1.484,0	795,0	450,0	715,0	5.000,0	8.444,0
22	Kalimantan Selatan	448,0	1.077,0	1.628,0	1.000,0	9.676,0	13.829,0
23	Kalimantan Timur	850,0	1.020,0	725,0	280,0	2.742,0	5.617,0
24	Sulawesi Utara	385,0	913,0	300,0	1.825,0	2.000,0	5.423,0
25	Sulawesi Tengah	205,0	751,5	1.200,0	1.300,0	6.400,0	9.856,5
26	Sulawesi Selatan	1.296,0	1.722,0	1.763,0	3.620,0	19.255,0	27.656,0
27	Sulawesi Tenggara	390,0	1.069,0	6.203,0	1.950,0	4.075,0	13.687,0
28	Gorontalo	94,0	80,0	50,0	635,0	2.250,0	3.109,0
29	Sulawesi Barat	160,0	1.787,5	315,0	100,0	3.460,0	5.822,5
30	Maluku	60,0	452,0	204,0	1.420,0	1.556,0	3.692,0
31	Maluku Utara	131,0	600,0	100,0	525,0	2.300,0	3.656,0
32	Papua	3.605,0	1.690,0	2.030,0	2.910,0	4.147,0	14.382,0
33	Papua Barat	620,0	845,0	400,0	1.700,0	2.400,0	5.965,0
Indonesia		21.034,0	28.135,0	33.352,0	48.813,0	196.694,0	328.028,0

Tabel 1.9
Table

Pengembangan SRI
System of Rice Intensification
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Paket *) / Package *)
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0,0	4,0	0,0	20,0	89,0	113,0
2	Sumatera Utara	0,0	2,0	0,0	32,0	90,0	124,0
3	Sumatera Barat	11,0	3,0	0,0	20,0	163,0	197,0
4	Riau	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	19,0
5	Jambi	1,0	0,0	10,0	12,0	35,0	58,0
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	0,0	17,0	136,0	153,0
7	Bengkulu	3,0	4,0	0,0	14,0	43,0	64,0
8	Lampung	0,0	1,0	0,0	15,0	80,0	96,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	44,0	37,0	150,0	43,0	1.065,0	1.339,0
13	Jawa Tengah	1,0	0,0	20,0	44,0	420,0	485,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	1,0	1,0	11,0	30,0	43,0
15	Jawa Timur	0,0	22,0	34,0	92,0	263,0	411,0
16	Banten	2,0	1,0	0,0	5,0	60,0	68,0
17	Bali	0,0	3,0	0,0	10,0	60,0	73,0
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	1,0	10,0	15,0	40,0	66,0
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	6,0
20	Kalimantan Barat	0,0	7,0	10,0	17,0	20,0	54,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	2,0	0,0	10,0	18,0	30,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
24	Sulawesi Utara	0,0	2,0	1,0	7,0	0,0	10,0
25	Sulawesi Tengah	1,0	3,0	0,0	13,0	40,0	57,0
26	Sulawesi Selatan	1,0	7,0	3,0	54,0	195,0	260,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	1,0	0,0	4,0	15,0	20,0
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
30	Maluku	0,0	2,0	0,0	8,0	0,0	10,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
32	Papua	0,0	3,0	0,0	5,0	0,0	8,0
33	Papua Barat	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	6,0
Indonesia		64,0	111,0	239,0	505,0	2.877	3.796,0

*) 1 paket = 20 ha

Tabel 1.10
Table

Pra – Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
Pre – Post Farmers Land Sertification
2008 – 2012

Persil/Bidang

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0,0	0,0	285,0	500,0	585,0	1.370,0
2	Sumatera Utara	0,0	0,0	14,0	0,0	900,0	914,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jambi	0,0	0,0	1.742,0	400,0	1400,0	3.542,0
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	2.241,0	0,0	250,0	2.491,0
7	Bengkulu	0,0	240,0	1.500,0	0,0	700,0	2.440,0
8	Lampung	0,0	2.201,0	1.758,0	2.600,0	900,0	7.459,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	0,0	400,0	0,0	0,0	100,0	500,0
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	293,0	1.800,0	1150,0	3.243,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	2.229,0	1.031,0	1.000,0	1500,0	5.760,0
15	Jawa Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Bali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	782,0	137,0	500,0	900,0	2.319,0
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	1.310,0	2.343,0	7.700,0	300,0	11.653,0
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	1.040,0	100,0	100,0	1.240,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	115,0	1.078,0	0,0	700,0	1.893,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	360,0	0,0	1400,0	1.760,0
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	1.050,0	400,0	900,0	2.350,0
26	Sulawesi Selatan	0,0	1.353,0	1.413,0	400,0	1700,0	4.866,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	5.653,0	14.400,0	1900,0	21.953,0
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Sulawesi Barat	0,0	1.200,0	264,0	0,0	1600,0	3.064,0
30	Maluku	0,0	0,0	114,0	1.700,0	400,0	2.214,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Indonesia		0,0	9.830,0	22.316,0	32.000,0	17.485,0	81.631,0





PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Irrigation Water Management

Direktorat Pengelolaan Air Irigasi bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan air irigasi.

Kegiatan pengembangan Jaringan Irigasi di tahun 2012 merupakan simplifikasi dari Kegiatan Jitut dan Jides di tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Irigasi di tahun 2012 jika dibandingkan dengan gabungan pelaksanaan Jitut dan Jides di tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan , yaitu sebesar 150,38% dengan cakupan seluas 531.128 hektar.

Kegiatan konservasi air dan antisipasi anomali iklim dimaksudkan untuk menjaga suplai air di musim kemarau dan menampung kelebihan air di musim hujan.

Aplikasi dari kegiatan tersebut adalah berupa pengembangan embung dan atau dam parit.

Di tahun 2012, sebanyak 1.553 paket konservasi air dan antisipasi anomali berhasil dilaksanakan di seluruh Indonesia. Angka tersebut 50,53% lebih rendah dari tahun sebelumnya.

The duty of Directorate Irrigation Water Management is preparing the formulation and implementation of policies, preparation of norms, standards, procedures, and criteria, as well as providing technical guidance and evaluation in agricultural irrigation water management.

Irrigation Line Development in 2012 is provided as the simplification of on-farm irrigation line and rural irrigation line of the previous years.

If we compare between the implementation of irrigation line development in 2012 and the combination of on-farm irrigation line and rural irrigation line of the previous year, we could find that the development of irrigation line increased irrigated acres significantly by 150,38% or 531.128 hectares

Water conservation and climate anomaly anticipation program was intended to keep water supply in dry season and hold the excess of water in rainy season.

The execution of water conservation and climate anomaly anticipation program is the development of pond and/or trench dams..

In 2012, there are 1.553 package of water conservation and climate anomaly anticipation programs have been succeeded to be provided throughout Indonesia. It is declining 50,53% from previous year program execution.

Kegiatan Pengembangan Sumber Air di tahun 2012 merupakan simplifikasi dari kegiatan pengembangan irigasi tanah dalam, pengembangan irigasi tanah dangkal, dan pengembangan irigasi permukaan. Jika dibandingkan dengan total realisasi kegiatan pengembangan air permukaan dan pengembangan air tanah di tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 35,96%.

Begitupula untuk kegiatan pengembangan kelembagaan (di dalamnya termasuk kegiatan pengembangan irigasi partisipatif), terjadi penurunan yang lebih besar, yaitu sebesar 54,12%.

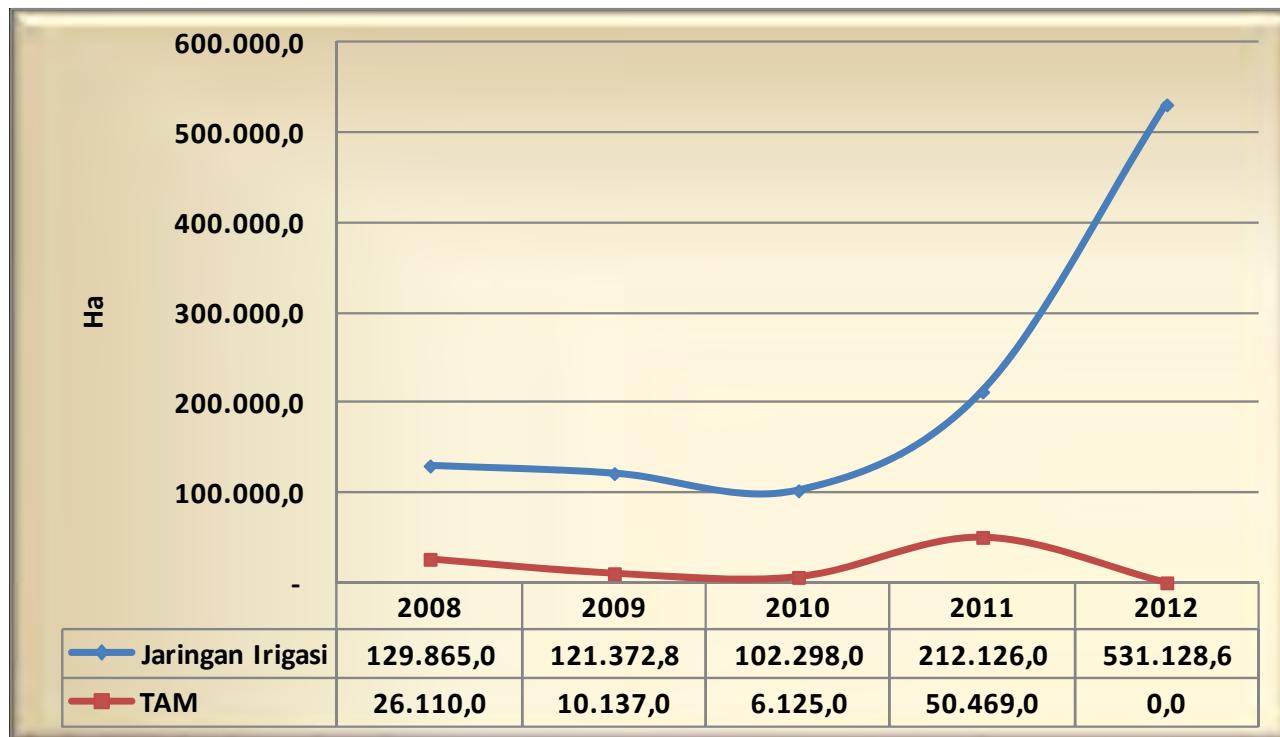
Di tahun 2012, terdapat dua kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi, yaitu Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) dan Sumur Resapan.

Water resources development program in 2012 was the simplification of surface water irrigation development, deep pipe irrigation and shallow well irrigation. If we compare them, we could find that there is a significant declining tren in its execution up to 35,96%.

Similiarly, institutional development (including participatory irrigation development) was declining more significant, up to 54,12%.

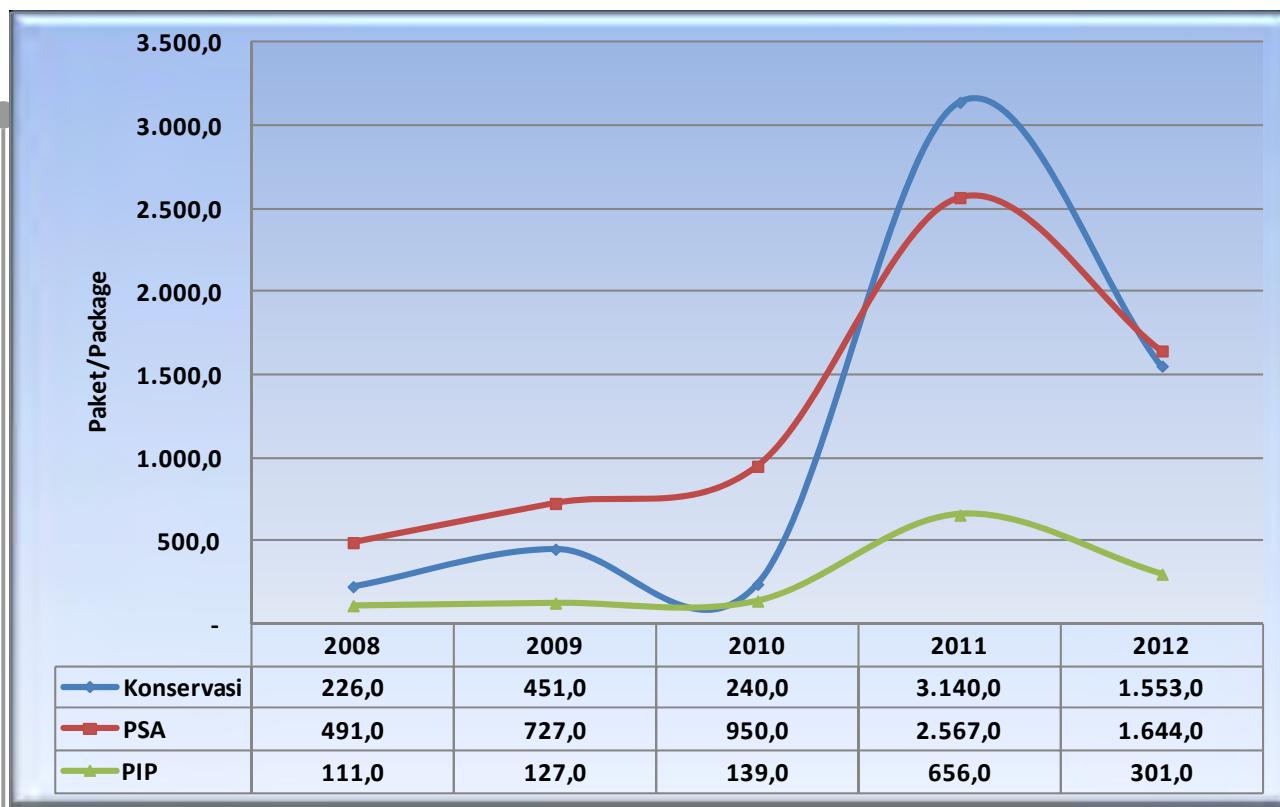
There are two programs which have been eliminated in 2012, they are micro water system and infiltration well construction.

Gambar 2.1 Grafik Realisasi Kegiatan Jaringan Irigasi dan TAM dari Tahun 2008 hingga 2012
 Figure 2.1 Graph of Irrigation Line Development and Micro Water System in 2008 until 2012



Gambar 2.2 Grafik Realisasi Kegiatan Konservasi Air, Pengembangan Sumber Air, dan Pengembangan Kelembagaan dari Tahun 2008 hingga 2012

Figure 2.2 Graph of Water Conservation, Water Resources Development, and Institutional Development in 2008 until 2012



Tabel 2.1
Table

Pengembangan Jaringan Irigasi
Irrigation Line Development
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total 2008 – 2012 Ha
		2008 3	2009 4	2010 5	2011 6	2012 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	2.625,0	4.294,0	2.300,0	4.220,0	3.700,0	17.139,0
2	Sumatera Utara	7.766,0	7.899,0	8.850,0	12.627,0	26.593,0	63.735,0
3	Sumatera Barat	4.188,0	3.600,0	5.933,0	10.660,0	9.300,0	33.681,0
4	Riau	840,0	1.578,8	944,0	3.180,0	10.500,0	17.042,8
5	Jambi	1.818,0	1.700,0	2.620,0	3.710,0	8.200,0	18.048,0
6	Sumatera Selatan	2.455,0	1.320,0	2.685,0	5.260,0	30.200,0	41.920,0
7	Bengkulu	3.090,0	4.450,0	3.750,0	6.257,0	12.760,0	30.307,0
8	Lampung	3.950,0	2.400,0	3.370,0	9.040,0	20.750,0	39.510,0
9	Bangka Belitung	348,0	400,0	300,0	0,0	700,0	1.748,0
10	Kepulauan Riau	120,0	150,0	0,0	0,0	0,0	270,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	21.250,0	13.610,0	8.240,0	14.723,0	65.754,6	123.577,6
13	Jawa Tengah	20.821,0	15.621,0	12.940,0	25.125,0	73.700,0	148.207,0
14	DI. Yogyakarta	1.655,0	2.265,0	1.050,0	5.685,0	5.600,0	16.255,0
15	Jawa Timur	19.240,0	14.275,0	16.305,0	35.155,0	90.400,0	175.375,0
16	Banten	5.480,0	2.100,0	1.300,0	3.460,0	8.200,0	20.540,0
17	Bali	4.850,0	7.600,0	1.880,0	3.808,0	8.100,0	26.238,0
18	Nusa Tenggara Barat	2.750,0	1.770,0	1.950,0	4.290,0	10.500,0	21.260,0
19	Nusa Tenggara Timur	1.900,0	1.715,0	2.750,0	4.960,0	9.300,0	20.625,0
20	Kalimantan Barat	900,0	1.088,0	1.310,0	2.750,0	10.200,0	16.248,0
21	Kalimantan Tengah	740,0	960,0	1.605,0	2.280,0	10.500,0	16.085,0
22	Kalimantan Selatan	2.905,0	3.150,0	2.600,0	5.930,0	12.071,0	26.656,0
23	Kalimantan Timur	1.120,0	980,0	1.600,0	5.450,0	8.900,0	18.050,0
24	Sulawesi Utara	1.096,0	2.945,0	2.000,0	4.940,0	6.700,0	17.681,0
25	Sulawesi Tengah	1.871,0	4.700,0	2.150,0	4.474,0	5.400,0	18.595,0
26	Sulawesi Selatan	7.387,0	8.330,0	5.870,0	17.270,0	41.500,0	80.357,0
27	Sulawesi Tenggara	2.822,0	3.834,0	2.560,0	5.500,0	7.400,0	22.116,0
28	Gorontalo	1.461,0	1.400,0	1.836,0	3.272,0	4.300,0	12.269,0
29	Sulawesi Barat	650,0	2.750,0	850,0	1.590,0	5.200,0	11.040,0
30	Maluku	1.245,0	822,0	500,0	2.680,0	7.300,0	12.547,0
31	Maluku Utara	367,0	1.066,0	650,0	1.410,0	5.300,0	8.793,0
32	Papua	1.755,0	1.950,0	800,0	1.800,0	6.300,0	12.605,0
33	Papua Barat	400,0	650,0	800,0	620,0	5.800,0	8.270,0
Indonesia		129.865,0	121.372,8	102.298,0	212.126,0	531.128,6	1.096.790,4

Tabel 2.2
Table

Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim
Conservation and climate anomalies anticipation
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Paket/ Package Total
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0,0	23,0	2,0	147,0	53,0	225,0
2	Sumatera Utara	0,0	8,0	7,0	139,0	104,0	258,0
3	Sumatera Barat	6,0	11,0	1,0	220,0	95,0	333,0
4	Riau	1,0	0,0	2,0	32,0	75,0	110,0
5	Jambi	1,0	0,0	0,0	34,0	32,0	67,0
6	Sumatera Selatan	11,0	6,0	5,0	129,0	49,0	200,0
7	Bengkulu	0,0	2,0	5,0	84,0	34,0	125,0
8	Lampung	3,0	6,0	7,0	184,0	80,0	280,0
9	Bangka Belitung	0,0	1,0	0,0	105,0	7,0	113,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	21,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	3,0	1,0	8,0	146,0	82,0	240,0
13	Jawa Tengah	48,0	68,0	48,0	273,0	131,0	568,0
14	DI. Yogyakarta	5,0	3,0	4,0	36,0	37,0	85,0
15	Jawa Timur	10,0	16,0	17,0	159,0	144,0	346,0
16	Banten	0,0	6,0	4,0	39,0	16,0	65,0
17	Bali	9,0	20,0	21,0	83,0	50,0	183,0
18	Nusa Tenggara Barat	18,0	18,0	15,0	176,0	50,0	277,0
19	Nusa Tenggara Timur	61,0	72,0	31,0	328,0	85,0	577,0
20	Kalimantan Barat	5,0	41,0	6,0	118,0	37,0	207,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	4,0	2,0	11,0	15,0	32,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	7,0	4,0	21,0	34,0	66,0
23	Kalimantan Timur	3,0	58,0	9,0	26,0	26,0	122,0
24	Sulawesi Utara	2,0	0,0	3,0	20,0	29,0	54,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	2,0	2,0	46,0	45,0	95,0
26	Sulawesi Selatan	23,0	14,0	15,0	269,0	110,0	431,0
27	Sulawesi Tenggara	4,0	8,0	13,0	165,0	50,0	240,0
28	Gorontalo	1,0	7,0	0,0	26,0	18,0	52,0
29	Sulawesi Barat	0,0	11,0	0,0	4,0	15,0	30,0
30	Maluku	0,0	3,0	1,0	29,0	14,0	47,0
31	Maluku Utara	0,0	3,0	0,0	4,0	9,0	16,0
32	Papua	12,0	18,0	3,0	36,0	16,0	85,0
33	Papua Barat	0,0	14,0	5,0	30,0	11,0	60,0
Indonesia		226,0	451,0	240,0	3.140,0	1.553,0	5.610,0

Tabel 2.3
Table

Pengembangan Sumber Air
Water Sources (Fount) Construction
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Paket/ Package Total
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	13,0	41,0	20,0	25,0	44,0	143,0
2	Sumatera Utara	2,0	21,0	56,0	109,0	80,0	268,0
3	Sumatera Barat	2,0	31,0	46,0	172,0	68,0	319,0
4	Riau	0,0	10,0	26,0	37,0	128,0	201,0
5	Jambi	6,0	21,0	55,0	5,0	17,0	104,0
6	Sumatera Selatan	9,0	17,0	57,0	62,0	28,0	173,0
7	Bengkulu	3,0	20,0	24,0	52,0	57,0	156,0
8	Lampung	4,0	11,0	19,0	67,0	73,0	174,0
9	Bangka Belitung	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	12,0	19,0	12,0	43,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	24,0	14,0	43,0	198,0	73,0	352,0
13	Jawa Tengah	61,0	71,0	96,0	184,0	194,0	606,0
14	DI. Yogyakarta	30,0	22,0	14,0	106,0	41,0	213,0
15	Jawa Timur	53,0	74,0	52,0	345,0	210,0	734,0
16	Banten	0,0	4,0	13,0	6,0	9,0	32,0
17	Bali	16,0	28,0	32,0	44,0	50,0	170,0
18	Nusa Tenggara Barat	39,0	58,0	67,0	208,0	50,0	422,0
19	Nusa Tenggara Timur	69,0	32,0	79,0	137,0	82,0	399,0
20	Kalimantan Barat	1,0	14,0	15,0	24,0	45,0	99,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	7,0	12,0	9,0	7,0	35,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	17,0	14,0	6,0	44,0	81,0
23	Kalimantan Timur	4,0	36,0	29,0	32,0	13,0	114,0
24	Sulawesi Utara	9,0	11,0	2,0	46,0	8,0	76,0
25	Sulawesi Tengah	8,0	14,0	7,0	67,0	16,0	112,0
26	Sulawesi Selatan	83,0	82,0	47,0	175,0	83,0	470,0
27	Sulawesi Tenggara	16,0	19,0	6,0	241,0	106,0	388,0
28	Gorontalo	13,0	17,0	17,0	32,0	28,0	107,0
29	Sulawesi Barat	0,0	7,0	0,0	0,0	2,0	9,0
30	Maluku	4,0	7,0	27,0	34,0	23,0	95,0
31	Maluku Utara	1,0	0,0	10,0	11,0	15,0	37,0
32	Papua	0,0	9,0	27,0	66,0	27,0	129,0
33	Papua Barat	21,0	8,0	26,0	48,0	11,0	114,0
Indonesia		491,0	727,0	950,0	2.567,0	1.644,0	6.379,0

Tabel 2.4
Table 2.4

Pengelolaan Irigasi Partisipatif
Participatory Irrigation Management
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Paket / Package Total 2008 – 2012
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sumatera Utara	3,0	20,0	15,0	48,0	22,0	108,0
3	Sumatera Barat	11,0	6,0	5,0	15,0	13,0	50,0
4	Riau	3,0	0,0	0,0	4,0	2,0	9,0
5	Jambi	2,0	5,0	5,0	16,0	10,0	38,0
6	Sumatera Selatan	3,0	4,0	5,0	14,0	10,0	36,0
7	Bengkulu	3,0	4,0	5,0	19,0	7,0	38,0
8	Lampung	3,0	4,0	3,0	30,0	10,0	50,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	5,0	9,0	7,0	54,0	29,0	104,0
13	Jawa Tengah	7,0	17,0	11,0	55,0	50,0	140,0
14	DI. Yogyakarta	20,0	5,0	2,0	12,0	4,0	43,0
15	Jawa Timur	6,0	11,0	13,0	129,0	48,0	207,0
16	Banten	4,0	3,0	0,0	9,0	6,0	22,0
17	Bali	15,0	4,0	8,0	48,0	16,0	91,0
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	1,0	7,0	27,0	7,0	42,0
19	Nusa Tenggara Timur	4,0	2,0	5,0	12,0	6,0	29,0
20	Kalimantan Barat	0,0	1,0	3,0	14,0	0,0	18,0
21	Kalimantan Tengah	1,0	0,0	1,0	6,0	4,0	12,0
22	Kalimantan Selatan	1,0	1,0	0,0	9,0	3,0	14,0
23	Kalimantan Timur	2,0	2,0	6,0	14,0	5,0	29,0
24	Sulawesi Utara	2,0	4,0	5,0	8,0	4,0	23,0
25	Sulawesi Tengah	3,0	1,0	2,0	14,0	2,0	22,0
26	Sulawesi Selatan	5,0	18,0	21,0	73,0	26,0	143,0
27	Sulawesi Tenggara	4,0	2,0	3,0	12,0	5,0	26,0
28	Gorontalo	4,0	3,0	5,0	8,0	5,0	25,0
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
30	Maluku	0,0	0,0	2,0	6,0	0,0	8,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indonesia		111,0	127,0	139,0	656,0	301,0	1.334,0

Tabel 2.5
Table

Pengembangan Tata Air Mikro
Micro Water System Construction
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sumatera Utara	1.000,0	800,0	250,0	3.300,0	0,0	5.350,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Riau	4.400,0	1.650,0	685,0	5.493,0	0,0	12.228,0
5	Jambi	2.100,0	752,0	450,0	5.400,0	0,0	8.702,0
6	Sumatera Selatan	5.250,0	800,0	1.010,0	4.319,0	0,0	11.379,0
7	Bengkulu	400,0	1.050,0	0,0	2.000,0	0,0	3.450,0
8	Lampung	1.250,0	1.050,0	320,0	4.087,0	0,0	6.707,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Bali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Nusa Tenggara Bar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Nusa Tenggara Tim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Kalimantan Barat	2.700,0	1.050,0	790,0	8.720,0	0,0	13.260,0
21	Kalimantan Tengah	3.950,0	940,0	650,0	5.770,0	0,0	11.310,0
22	Kalimantan Selatan	1.560,0	700,0	550,0	4.060,0	0,0	6.870,0
23	Kalimantan Timur	1.000,0	1.345,0	920,0	2.400,0	0,0	5.665,0
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	300,0	0,0	0,0	2.920,0	0,0	3.220,0
26	Sulawesi Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	1.700,0	0,0	1.700,0
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	2.200,0	0,0	500,0	300,0	0,0	3.000,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indonesia		26.110,0	10.137,0	6.125,0	50.469,0	0,0	92.841,0

Tabel 2.6
Table

Pembuatan Balai Subak
Subak Hall Construction
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total	Unit
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sumatera Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lampung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Bali	25,0	44,0	0,0	0,0	0,0	69,0	
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	Sulawesi Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Indonesia		25,0	44,0	0,0	0,0	0,0	69,0	

Tabel 2.7
Table

Pembuatan Cubang
Cubang Construction
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total	Unit
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sumatera Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lampung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Bali	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0	8,0	
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
26	Sulawesi Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Indonesia		3,0	5,0	0,0	0,0	0,0	8,0	

Tabel 2.8
Table

Pompa Hydram
Hiddraulic Ram Pump
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total	Ha
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sumatera Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lampung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Bali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Sulawesi Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Sulawesi Barat	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indonesia		1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	

Tabel 2.9
Table

Pembangunan Sumur Resapan
Infiltrations Well Construction
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total	Unit
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Aceh	0,0	17,0	1,0	181,0	0,0	199,0	
2	Sumatera Utara	0,0	15,0	2,0	167,0	0,0	184,0	
3	Sumatera Barat	0,0	12,0	0,0	90,0	0,0	102,0	
4	Riau	5,0	5,0	0,0	33,0	0,0	43,0	
5	Jambi	0,0	6,0	4,0	96,0	0,0	106,0	
6	Sumatera Selatan	0,0	2,0	15,0	72,0	0,0	89,0	
7	Bengkulu	0,0	4,0	0,0	102,0	0,0	106,0	
8	Lampung	0,0	5,0	0,0	93,0	0,0	98,0	
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	22,0	
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Jawa Barat	31,0	20,0	41,0	211,0	0,0	303,0	
13	Jawa Tengah	18,0	74,0	31,0	268,0	0,0	391,0	
14	DI. Yogyakarta	2,0	29,0	5,0	0,0	0,0	36,0	
15	Jawa Timur	43,0	49,0	14,0	317,0	0,0	423,0	
16	Banten	0,0	0,0	14,0	24,0	0,0	38,0	
17	Bali	0,0	6,0	2,0	140,0	0,0	148,0	
18	Nusa Tenggara Barat	9,0	7,0	12,0	144,0	0,0	172,0	
19	Nusa Tenggara Timur	10,0	26,0	13,0	398,0	0,0	447,0	
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	161,0	0,0	161,0	
21	Kalimantan Tengah	0,0	4,0	0,0	92,0	0,0	96,0	
22	Kalimantan Selatan	0,0	21,0	3,0	80,0	0,0	104,0	
23	Kalimantan Timur	0,0	3,0	0,0	44,0	0,0	47,0	
24	Sulawesi Utara	0,0	2,0	2,0	124,0	0,0	128,0	
25	Sulawesi Tengah	0,0	22,0	1,0	196,0	0,0	219,0	
26	Sulawesi Selatan	30,0	9,0	31,0	546,0	0,0	616,0	
27	Sulawesi Tenggara	0,0	17,0	7,0	376,0	0,0	400,0	
28	Gorontalo	0,0	10,0	4,0	22,0	0,0	36,0	
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	
30	Maluku	20,0	9,0	0,0	102,0	0,0	131,0	
31	Maluku Utara	0,0	2,0	0,0	73,0	0,0	75,0	
32	Papua	0,0	18,0	0,0	14,0	0,0	32,0	
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	165,0	
Indonesia		168,0	394,0	202,0	4.408,0	0,0	5.172,0	

Tabel 2.10
Table

Pembuatan Irigasi Bertekanan
Pressurized Irrigation System Construction
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total	Unit
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sumatera Utara	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
4	Riau	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
5	Jambi	2,0	8,0	2,0	0,0	0,0	0,0	12,0
6	Sumatera Selatan	4,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	8,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lampung	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	5,0
9	Bangka Belitung	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
13	Jawa Tengah	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	4,0	11,0	3,0	0,0	0,0	0,0	18,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Bali	9,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	12,0
18	Nusa Tenggara Barat	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
20	Kalimantan Barat	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Sulawesi Utara	9,0	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	18,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0
26	Sulawesi Selatan	8,0	12,0	4,0	0,0	0,0	0,0	24,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
28	Gorontalo	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indonesia		52,0	57,0	24,0	0,0	0,0	133,0	

Tabel 2.11
Table

Pengadaan Pompa
Pumps Precurement
2008 – 2012

Unit

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
2	Sumatera Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Riau	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lampung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	34,0
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Bali	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Sulawesi Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Sulawesi Barat	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indonesia		0,0	34,0	45,0	0,0	0,0	79,0

Tabel 2.12
Table

Sekolah Lapang Iklim Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
Climate Fields School in Water and Environmental Conservation
2009 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Paket / Package
		2009	2010	2011	2012	Total
1	2	3	5	6	7	8
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sumatera Utara	7,0	7,0	91,0	8,0	113,0
3	Sumatera Barat	1,0	0,0	73,0	18,0	92,0
4	Riau	0,0	0,0	31,0	2,0	33,0
5	Jambi	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0
6	Sumatera Selatan	6,0	6,0	91,0	10,0	113,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0
8	Lampung	5,0	6,0	69,0	16,0	96,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	10,0	8,0	39,0	16,0	73,0
13	Jawa Tengah	13,0	9,0	50,0	36,0	108,0
14	DI. Yogyakarta	4,0	1,0	24,0	8,0	37,0
15	Jawa Timur	4,0	12,0	249,0	28,0	293,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0
17	Bali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	2,0	2,0	39,0	10,0	53,0
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	3,0	80,0	2,0	85,0
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Sulawesi Selatan	6,0	6,0	84,0	12,0	108,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Sulawesi Barat	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Indonesia	59,0	60,0	1.001,0	172,0
						1.292,0



PEMBIAYAAN PERTANIAN

Agricultural Financing

Direktorat Pembiayaan Pertanian memiliki tugas mewujudkan dukungan dan fasilitasi pembiayaan untuk pembangunan pertanian yang mudah diakses sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan petani/pelaku usaha pertanian.

Dalam rangka memenuhi tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Pertanian memiliki beberapa kegiatan, baik yang berupa bansos seperti BP3 dan PUAP, atau sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi)

BP3 adalah akronim dari Bantuan Penanggulangan Padi Puso, sebagai respon pemerintah – khususnya Kementerian Pertanian— atas terjadinya gagal panen padi (puso) yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan dan serangan OPT.

Di tahun 2012, Bantuan Penanggulangan Padi Puso dilaksanakan untuk membantu pembiayaan usaha tani sawah terdampak seluas 27.325 ha dengan anggaran sebesar Rp 101.102.500.000,-.

Jika dilihat dari sisi luasan, pada tahun 2012, luas sawah yang mengalami puso dan mendapatkan bantuan pembiayaan ini menurun 59,56% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan sejak program ini dilaksanakan (sejak 2011), seluas 94.891,5 ha sawah yang mengalami puso sudah mendapatkan bantuan penanggulangan padi puso ini.

Directorate of Agricultural Financing duty is to actualize the support and facilitation of financing for agricultural development to be easily accessed based on the characteristics and needs of farmers/agricultural businesses

In order to fulfill this task, Agricultural Financing Directorate has several activities, either in the form of social assistance such as BP3 and PUAP, or as a facilitator of the implementation of activities such as Small Loans (KUR) and Food and Energy Security Loans (KKPE)

BP3 is the acronym of Puso Rice Disaster Assistance, as a response from government—especially Ministry of Agriculture— of harvest failures on rice (puso) caused by floods, drought and pests attacks.

In 2012, Puso Rice Disaster Assistance were executed to help on farm financing of rice field affected as wide as 27.325 hectares with calculated budget as much as IDR 101.102.500.000,-.

If we see it from the area variable, we could find that in 2012, the affected rice fields area receiving this financing assistance is declining by 59,56% from the previous year. And since this program run (in 2011), 94.891,5 hectares land of rice field had received this puso rice disaster assistance.

Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

PUAP dilaksanakan sejak tahun 2008 di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).

Pelaksanaan kegiatan PUAP di 2012 mengalami penurunan sebesar 33,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana di tahun sebelumnya, kegiatan ini berhasil dilaksanakan oleh 9.110 gapoktan, sementara di tahun ini hanya dilaksanakan oleh 6.050 gapoktan.

Sebaliknya, kegiatan Kredit Usaha Rakyat secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya saja tingkat peningkatannya menurun cukup signifikan tiap tahunnya.

Di tahun 2012, kegiatan KUR dilaksanakan di 33 provinsi melalui 33 bank pelaksana dan berhasil memberikan kredit kepada 1.965.328 debitur. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah debitur di tahun ini meningkat 2,9%.

Proporsi penyaluran KUR di tahun 2012 masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana proporsi debitur di pulau Jawa cenderung lebih besar dari daerah lain. Seperti di tahun ini, sebanyak 61,8% debitur berada di pulau Jawa.

Rural Agribusiness Development (PUAP) is a kind of facilitation of venture capital assistance to farmer members, such as holding farmers, tenant farmers, farm workers and domestic farmers which is coordinated by Farmers Association.

PUAP was performed firstly in 2008 under the coordination of National Program for Community Empowerment—Mandiri.

The execution of PUAP was decreasing by 33,59%, compared with the previous year. Where in the previous year, this project was succeeded to be performed by 9.110 farmers association, while in 2012, it was only performed by 6.050 farmers association.

In contrary, Small Loan for agriculture sector was steadily raised year by year, but if we see it from the percentage, we could fine that the percentage is decreasing constantly.

In 2012, small loan program was performed in 33 provinces trough 33 executant banks and succeeded to be distributed to 1.965.328 debtors. If we compared it to the previous year, the debtors of KUR in 2012 was increasing by 2,9%.

The Proportion of KUR distribution in 2012 is fairly the same with the previous year, where we could find more debtor in Java than in other places. As in 2012, as much as 61,8% debtors were dwelled in Java.

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) merupakan kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi.

KKPE di tahun 2012 dilaksanakan untuk usaha tertentu, yaitu tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai), hortikultura, peternakan, perkebunan tebu, pengadaan pangan, serta pengadaan ubi jalar, tebu, ubi kayu, kacang tanah, dan sorgum.

Dalam prakteknya, KKPE dilaksanakan oleh 23 bank dan berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 3.841 Miliar, 74,84% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Terhitung sejak 2008 hingga 2012, bank-bank pelaksana KKPE telah berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 10.045 Miliar, dengan proporsi terbesar adalah pada sektor perkebunan tebu dengan persentase pinjaman terhadap total KKPE tersalurkan dalam jangka waktu tersebut sebesar 55,87%, diikuti dengan KKPE tanaman pangan dengan persentase 30,24%, KKPE peternakan 11,74 %, dan KKPE di tiga sektor lainnya yang masing-masing berjumlah kurang dari 1%. Jika dilihat dari variabel lokasi, karakteristiknya dapat dikatakan sama dengan tahun sebelumnya, dimana kredit yang diakses di pulau Jawa lebih besar dari daerah lain. Untuk tahun 2012, sebanyak 79,84% kredit disalurkan di pulau Jawa.

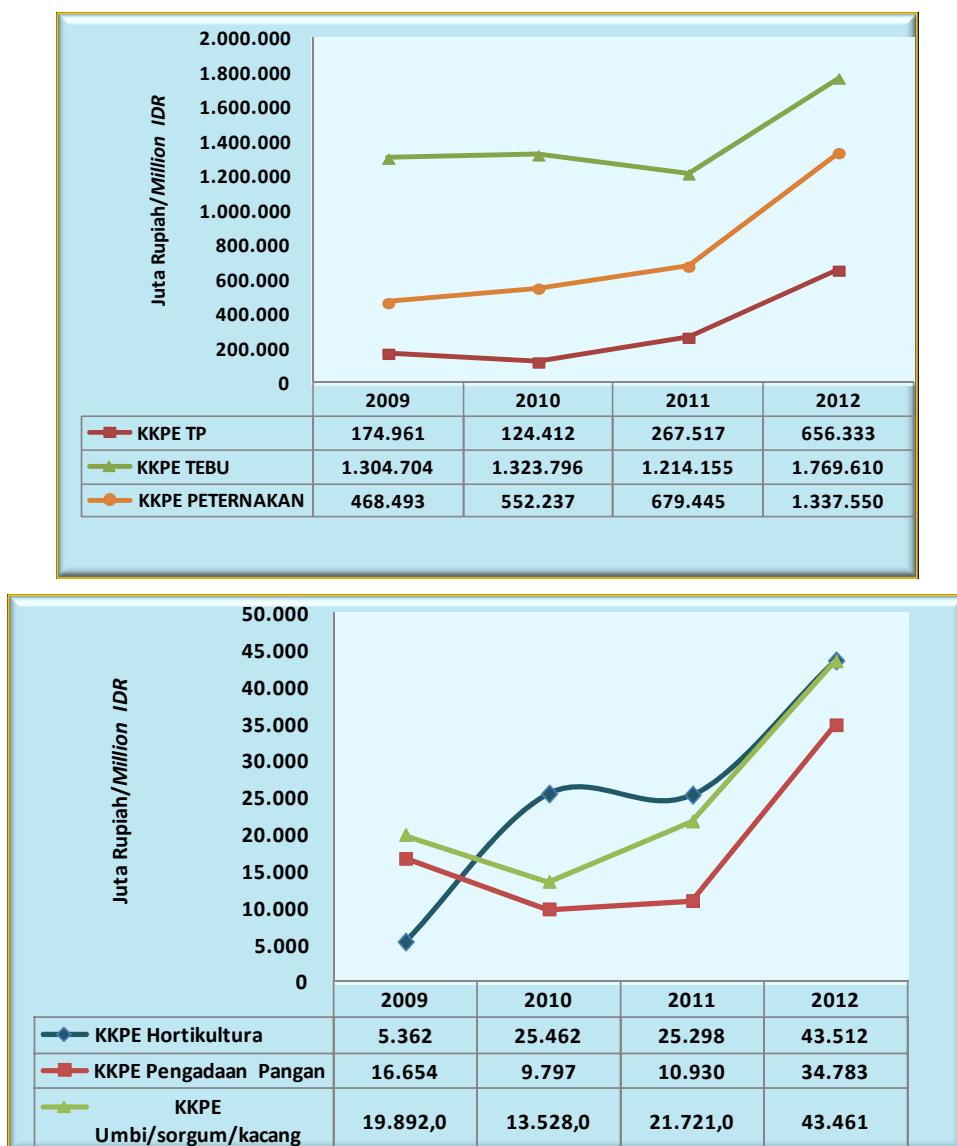
Food and Energy Security Credit (KKPE) is an investment and / or capital loan consigned to support food security and distributed through farmers group and / or cooperative.

KKPE in 2012 was performed in some particular business, they are food crops (paddy, corn, and soybean), horticulture, livestock, sugar cane, food provision and sweet potatoes, sugar canes, cassavas, peanuts, and buckwheat provision.

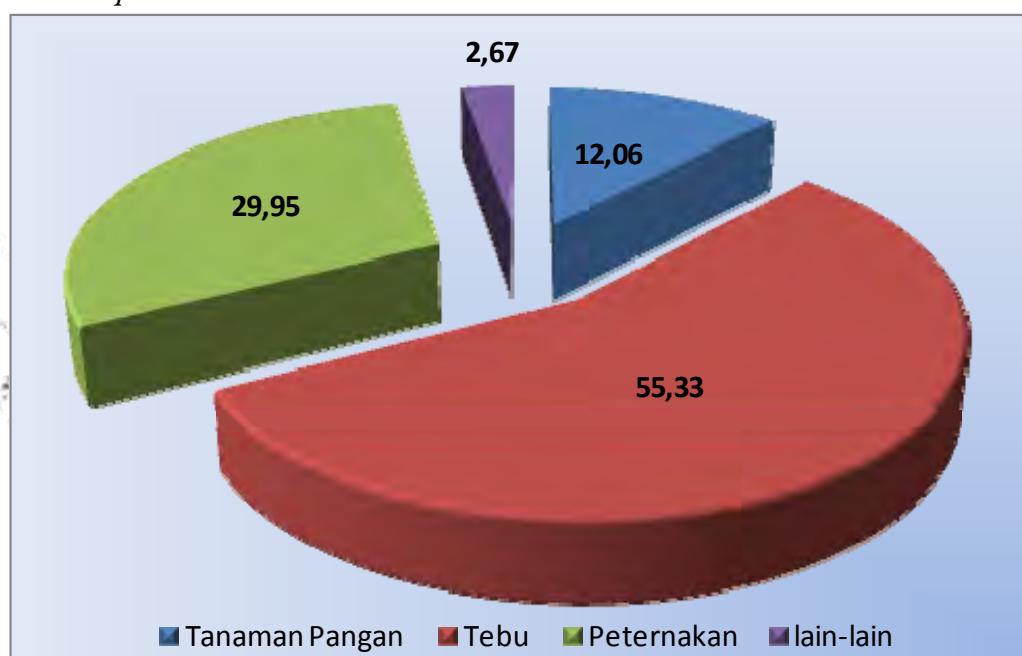
Practically, KKPE was conducted by 23 assigned banks and succeeded to loan up to IDR 3.841 billion, which was 74,84% higher than the amount loans in previous year.

Since 2008 until 2012, the assigned banks for KKPE have been succeeded to loan up to IDR 10.045 Billion, with the biggest proportion is in plantation sector, specifically in sugar cane plantation which absorbed up to 55,87% loan provided between 2008 until 2012, followed by food crops which absorbed by 30,24% loan, then followed by husbandry which absorbed 11,74%, and the other three sectors, each of which absorbed the loan less than 1%. Based on location variable, the characteristic of the loan is typically similar with the previous year, which the accessed loan in Java island are much bigger than in the other area. In 2012, the loan absorbed in Java was 74,84% from all absorbed loan in Indonesia

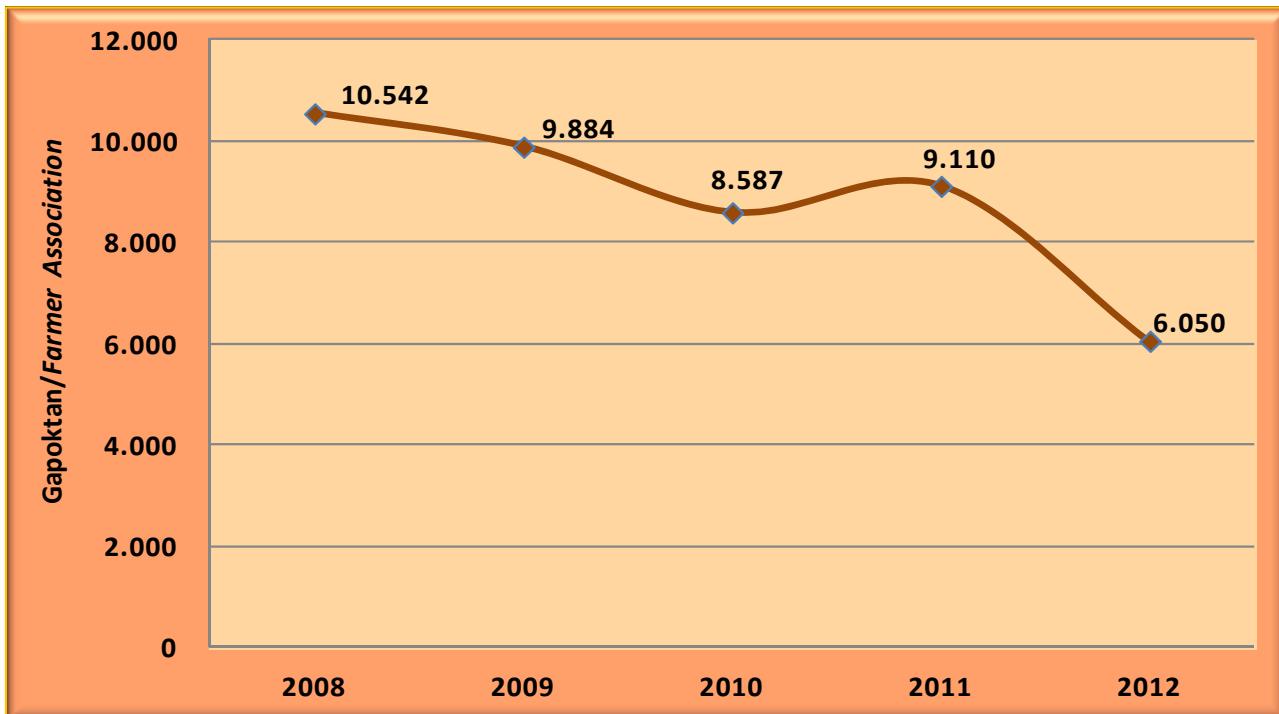
Gambar 3.1 Grafik Realisasi Kegiatan KKPE dari Tahun 2008 hingga 2012
Figure 3.1 Graph of KKPE Realization in 2008 until 2012



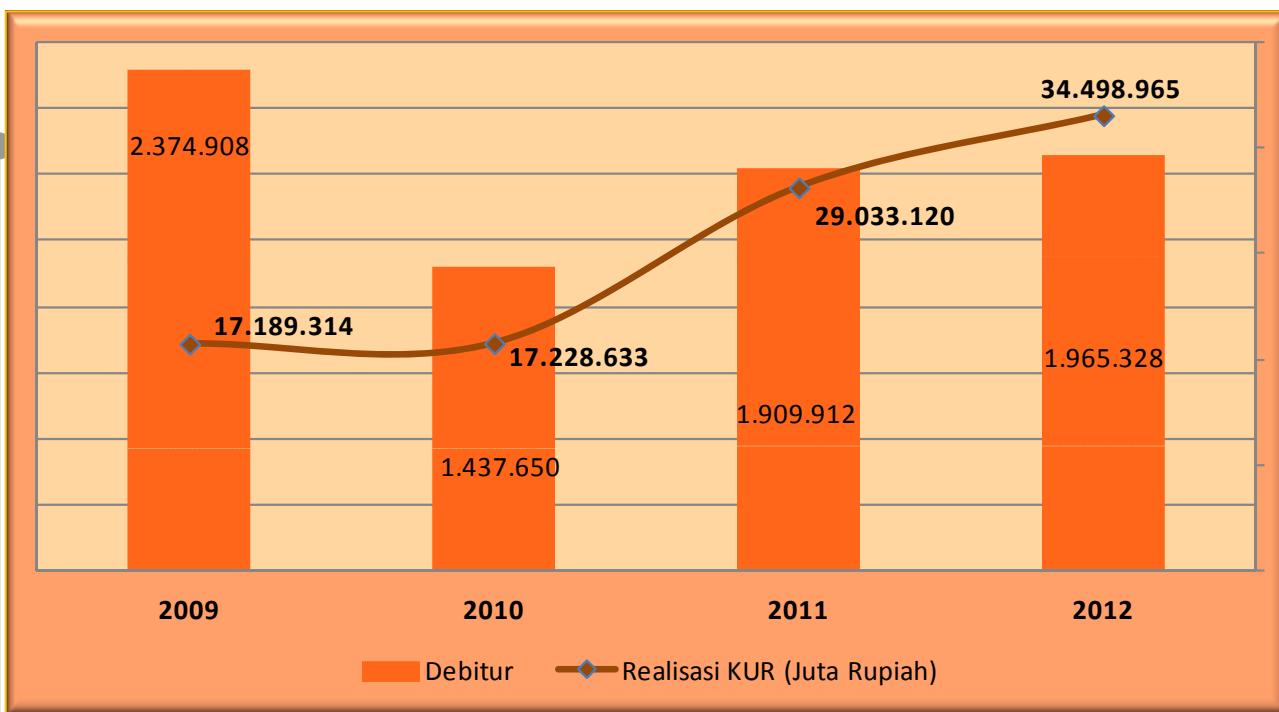
Gambar 3.2 Grafik Proporsi Penyaluran KKPE dari Tahun 2008 hingga 2012 berdasarkan bidang usaha
Figure 3.2 Graph of Loan KKPE since 2008 until 2012 Based on Business Sector



Gambar 3.3 Grafik Realisasi Kegiatan PUAP dari Tahun 2008 hingga 2012
Figure 3.3 Graph of Rural Agribusiness Development in 2008 until 2012



Gambar 3.4 Grafik Realisasi Kegiatan Kredit Usaha Rakyat dari Tahun 2008 hingga 2012
Figure 3.4 Graph of Soft Loan—Agriculture Sector in 2008 until 2012



Tabel 3.1
Table

Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)
Puso Rice Disaster Assistance
2009 - 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total
		2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0,0	0,0	3.418,6	5.803,0	9.221,6
2	Sumatera Utara	0,0	0,0	1.263,6	546,5	1.810,1
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	934,5	140,9	1.075,4
4	Riau	0,0	0,0	136,0	130,0	266,0
5	Jambi	0,0	0,0	418,8	912,8	1.331,5
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lampung	0,0	0,0	4.064,3	1.342,8	5.407,1
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	0,0	0,0	10.915,8	0,0	10.915,8
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	0,0	2.397,0	2.397,0
14	D.I. Yogyakarta	0,0	0,0	2.063,8	230,4	2.294,2
15	Jawa Timur	0,0	0,0	28.801,8	0,0	28.801,8
16	Banten	0,0	0,0	1.129,0	10.286,3	11.415,3
17	Bali	0,0	0,0	1.367,4	156,6	1.524,0
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	861,9	772,7	1.634,6
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	0,0	639,2	0,0	639,2
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	390,7	155,5	546,2
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	379,5	170,7	550,2
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	60,5	215,0	275,5
26	Sulawesi Selatan	0,0	0,0	8.532,7	2.390,1	10.922,7
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	1.789,9	1.167,8	2.957,6
28	Gorontalo	0,0	0,0	263,8	0,0	263,8
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	134,9	456,1	591,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	67.566,5	27.325,0	94.891,5

Tabel 3.2
Table

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Rural Agribusiness Development
2008 - 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total 2009 - 2011
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Aceh	600	254	340	431	231	1.856
2	Sumatera Utara	502	534	393	428	351	2.208
3	Sumatera Barat	204	329	192	139	136	1.000
4	Riau	181	215	267	347	198	1.208
5	Jambi	283	369	151	209	121	1.133
6	Sumatera Selatan	362	168	176	160	135	1.001
7	Bengkulu	289	251	139	167	83	929
8	Lampung	269	233	265	304	321	1.392
9	Bangka Belitung	61	78	41	64	22	266
10	Kepulauan Riau	47	62	41	50	12	212
11	DKI Jakarta	15	38	14	10	7	84
12	Jawa Barat	621	702	686	694	640	3.343
13	Jawa Tengah	1.092	1.190	1.076	1.327	1.001	5.686
14	D.I. Yogyakarta	127	146	47	70	45	435
15	Jawa Timur	1.083	925	906	1.243	954	5.111
16	Banten	298	424	115	177	137	1.151
17	Bali	248	332	60	34	4	678
18	Nusa Tenggara Barat	192	263	224	119	114	912
19	Nusa Tenggara Timur	512	385	431	391	138	1.857
20	Kalimantan Barat	231	210	191	289	155	1.076
21	Kalimantan Tengah	204	212	172	163	58	809
22	Kalimantan Selatan	342	230	350	282	170	1.374
23	Kalimantan Timur	206	159	121	159	24	669
24	Sulawesi Utara	235	209	214	172	118	948
25	Sulawesi Tengah	274	233	196	183	94	980
26	Sulawesi Selatan	457	493	584	514	212	2.260
27	Sulawesi Tenggara	323	222	245	179	133	1.102
28	Gorontalo	132	135	141	124	75	607
29	Sulawesi Barat	129	112	91	101	56	489
30	Maluku	188	155	123	88	55	609
31	Maluku Utara	144	119	117	96	59	535
32	Papua	463	378	271	192	60	1.364
33	Papua Barat	228	119	207	204	131	889
		10.542	9.884	8.587	9.110	6.050	44.173

**Tabel
Table 3.3**

Debitur Kredit Usaha Rakyat
Soft Loans Debtors
2009 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Debitur / Debtor Total 2009 – 2012
		2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	50.117	30.575	32.791	20.099	133.583
2	Sumatera Utara	104.943	55.216	76.195	82.896	319.250
3	Sumatera Barat	46.287	25.713	52.101	52.915	177.016
4	Riau	33.969	24.432	35.846	33.724	127.970
5	Jambi	36.962	19.983	28.432	25.800	111.177
6	Sumatera Selatan	50.682	25.057	24.648	40.165	140.552
7	Bengkulu	18.697	10.306	12.113	14.178	55.293
8	Lampung	52.018	33.301	44.370	48.368	178.057
9	Bangka Belitung	6.405	2.415	3.346	5.916	18.083
10	Kepulauan Riau	8.069	3.789	5.846	6.809	24.513
11	DKI Jakarta	48.102	30.571	47.944	55.820	182.436
12	Jawa Barat	353.635	208.406	265.841	262.555	1.090.436
13	Jawa Tengah	503.211	368.387	439.607	472.918	1.784.123
14	D.I. Yogyakarta	55.618	38.654	46.685	57.381	198.338
15	Jawa Timur	448.228	207.896	337.460	334.854	1.328.439
16	Banten	37.111	22.884	26.752	31.046	117.793
17	Bali	61.767	37.039	42.544	41.402	182.752
18	Nusa Tenggara Barat	33.454	20.999	27.925	33.202	115.579
19	Nusa Tenggara Timur	26.608	13.249	20.917	17.995	78.769
20	Kalimantan Barat	25.777	21.775	20.457	22.924	90.932
21	Kalimantan Tengah	24.077	11.561	19.276	18.219	73.133
22	Kalimantan Selatan	47.452	29.590	32.674	34.124	143.840
23	Kalimantan Timur	41.413	26.536	33.283	31.569	132.801
24	Sulawesi Utara	28.578	14.133	14.901	16.206	73.818
25	Sulawesi Tengah	30.247	19.751	24.777	22.953	97.728
26	Sulawesi Selatan	119.083	80.052	121.956	107.337	428.429
27	Sulawesi Tenggara	21.493	15.755	15.168	18.883	71.299
28	Gorontalo	15.911	10.337	15.233	9.392	50.872
29	Sulawesi Barat	13.544	6.954	9.531	9.652	39.681
30	Maluku	8.935	7.254	12.005	10.657	38.850
31	Maluku Utara	4.752	3.369	6.393	4.557	19.072
32	Papua	13.374	8.566	9.777	14.403	46.119
33	Papua Barat	4.389	3.147	3.120	6.410	17.066
		2.374.908	1.437.650	1.909.912	1.965.328	7.687.798

Tabel 3.4
Table

Kredit Usaha Rakyat
Soft Loans
2009 – 2012

Juta Rupiah / IDR Million

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total
		2009	2010	2011	2012	
1	2	3				7
1	Aceh	483.526	393.045	536.180	457.636	1.870.386
2	Sumatera Utara	978.955	762.459	1.504.176	1.942.905	5.188.496
3	Sumatera Barat	367.564	412.047	1.033.323	1.151.669	2.964.603
4	Riau	558.430	477.007	928.279	1.120.229	3.083.945
5	Jambi	304.828	291.625	673.285	555.058	1.824.796
6	Sumatera Selatan	601.407	543.058	614.441	1.308.256	3.067.161
7	Bengkulu	155.275	116.787	186.250	236.747	695.059
8	Lampung	585.672	441.818	390.778	657.416	2.075.684
9	Bangka Belitung	50.838	36.881	80.572	128.117	296.408
10	Kepulauan Riau	111.100	169.773	187.525	229.445	697.843
11	DKI Jakarta	683.067	836.291	1.383.982	1.743.784	4.647.124
12	Jawa Barat	2.046.162	2.473.493	3.828.030	4.099.822	12.447.507
13	Jawa Tengah	2.407.311	2.542.514	4.329.663	5.526.348	14.805.836
14	D.I. Yogyakarta	273.399	290.334	560.761	711.244	1.835.738
15	Jawa Timur	2.460.785	2.448.238	4.928.104	4.938.614	14.775.740
16	Banten	358.282	449.501	560.192	667.435	2.035.411
17	Bali	372.916	363.172	670.282	775.938	2.182.308
18	Nusa Tenggara Barat	210.639	181.201	330.607	463.416	1.185.863
19	Nusa Tenggara Timur	209.334	157.220	320.534	343.559	1.030.647
20	Kalimantan Barat	374.568	618.064	475.461	878.468	2.346.561
21	Kalimantan Tengah	371.502	180.850	503.802	513.857	1.570.011
22	Kalimantan Selatan	636.772	437.182	559.526	718.501	2.351.981
23	Kalimantan Timur	370.459	558.985	736.741	955.354	2.621.539
24	Sulawesi Utara	232.054	180.528	278.856	333.484	1.024.922
25	Sulawesi Tengah	241.796	203.485	329.064	393.177	1.167.522
26	Sulawesi Selatan	931.521	900.095	1.744.244	1.976.842	5.552.703
27	Sulawesi Tenggara	165.224	108.889	218.225	356.188	848.526
28	Gorontalo	102.510	106.159	175.432	135.119	519.220
29	Sulawesi Barat	101.071	91.874	152.802	193.475	539.222
30	Maluku	115.301	141.324	243.475	274.263	774.364
31	Maluku Utara	71.961	65.697	144.846	118.752	401.257
32	Papua	155.699	157.342	265.230	365.538	943.808
33	Papua Barat	99.384	91.695	128.454	228.308	547.840
		17.189.314	17.228.633	29.033.120	34.498.965	97.920.033

Tabel 3.5
Table

Alokasi Plafon Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
Food And Energy Security Soft Loan Ceiling
2009 – 2012

Rp. Juta/ Million IDR

No	Propinsi / Province	Tahun / Year			
		2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	40.900,0	40.900,0	40.900,0	40.900,0
2	Sumatera Utara	262.790,0	262.790,0	267.790,0	267.790,0
3	Sumatera Barat	119.310,0	119.310,0	138.110,0	138.110,0
4	Riau	95.740,0	95.740,0	100.740,0	100.740,0
5	Jambi	80.325,0	80.325,0	85.325,0	85.325,0
6	Sumatera Selatan	200.105,0	200.105,0	200.105,0	200.105,0
7	Bengkulu	123.600,0	123.600,0	124.600,0	124.600,0
8	Lampung	777.210,0	777.210,0	784.210,0	784.210,0
9	Bangka Belitung	13.360,0	13.360,0	13.360,0	13.360,0
10	Kepulauan Riau	18.730,0	18.730,0	18.730,0	18.730,0
11	DKI Jakarta	16.150,0	16.150,0	16.150,0	16.150,0
12	Jawa Barat	955.450,0	955.450,0	1.037.450,0	1.037.450,0
13	Jawa Tengah	1.449.650,0	1.449.650,0	1.538.650,0	1.538.650,0
14	D.I. Yogyakarta	227.590,0	227.590,0	238.740,0	238.740,0
15	Jawa Timur	2.232.875,0	2.232.875,0	2.457.875,0	2.457.875,0
16	Banten	72.780,0	72.780,0	74.780,0	74.780,0
17	Bali	252.685,0	252.685,0	277.185,0	277.185,0
18	N T B	113.105,0	113.105,0	131.167,0	131.167,0
19	N T T	66.995,0	66.995,0	66.995,0	66.995,0
20	Kalimantan Barat	41.800,0	41.800,0	41.800,0	41.800,0
21	Kalimantan Tengah	39.000,0	39.000,0	39.000,0	39.000,0
22	Kalimantan Selatan	170.775,0	170.775,0	172.775,0	172.775,0
23	Kalimantan Timur	35.500,0	35.500,0	35.500,0	35.500,0
24	Sulawesi Utara	64.585,0	64.585,0	64.585,0	64.585,0
25	Sulawesi Tengah	37.945,0	37.945,0	37.945,0	37.945,0
26	Sulawesi Selatan	278.990,0	278.990,0	293.990,0	293.990,0
27	Sulawesi Tenggara	41.500,0	41.500,0	41.500,0	41.500,0
28	Gorontalo	131.500,0	131.500,0	131.500,0	131.500,0
29	Sulawesi Barat	23.400,0	23.400,0	23.400,0	23.400,0
30	Maluku	27.580,0	27.580,0	27.580,0	27.580,0
31	Maluku Utara	19.380,0	19.380,0	19.380,0	19.380,0
32	Papua	89.925,0	89.925,0	89.925,0	89.925,0
33	Papua Barat	22.170,0	22.170,0	22.170,0	22.170,0
		8.143.400,0	8.143.400,0	8.653.912,0	8.653.912

* Berdasarkan Komitmen Bank/ *Based on Bank Commitment*

Tabel 3.6

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
Pengembangan Tanaman Pangan
Food And Energy Security Soft Loans - On Farm Food Crops
2009 – 2012

Rp. Juta/ Million IDR

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total
		2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	297,0	297,0
2	Sumatera Utara	1.721,0	3.930,0	1.118,0	8.407,0	15.176,0
3	Sumatera Barat	409,0	446,0	451,0	2.004,0	3.310,0
4	Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	301,0	301,0
6	Sumatera Selatan	2.733,0	7.492,0	3.890,0	16.717,0	30.832,0
7	Bengkulu	10,0	66,0	0,0	2.588,0	2.664,0
8	Lampung	32.705,0	18.658,0	10.256,0	33.648,0	95.267,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	898,0	898,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	64.730,0	35.117,0	76.063,0	222.821,0	398.731,0
13	Jawa Tengah	6.633,0	1.791,0	47.448,0	55.771,0	111.643,0
14	D.I. Yogyakarta	699,0	7.885,0	4.720,0	25.123,0	38.427,0
15	Jawa Timur	17.331,0	22.753,0	87.596,0	164.898,0	292.578,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Bali	14.737,0	2.057,0	297,0	7.192,0	24.283,0
18	N T B	1.184,0	2.133,0	3.283,0	13.579,0	20.179,0
19	N T T	19,0	1.323,0	571,0	771,0	2.684,0
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	545,0	545,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0
22	Kalimantan Selatan	18.337,0	5.633,0	15.299,0	58.918,0	98.187,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	481,0	470,0	951,0
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	1.456,0	1.456,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	0,0	1.453,0	1.453,0
26	Sulawesi Selatan	6.679,0	9.676,0	12.116,0	13.913,0	42.384,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gorontalo	0,0	123,0	0,0	9.736,0	9.859,0
29	Sulawesi Barat	0,0	129,0	0,0	486,0	615,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	7.034,0	5.200,0	3.928,0	14.288,0	30.450,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		174.961	124.412	267.517	656.333	1.223.223

Tabel 3.7

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
Pengembangan Perkebunan Tebu
Food And Energy Security Soft Loan – on Sugarcane Plantation
2009 – 2012

Rp. Juta/ Million IDR

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total 2009 – 2012
		2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sumatera Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lampung	29.999,0	54.371,0	25.204,0	82.839,0	192.413,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	71.679,0	114.810,0	135.677,0	134.009,0	456.175,0
13	Jawa Tengah	366.130,0	412.469,0	542.657,0	463.327,0	1.784.583,0
14	D.I. Yogyakarta	83.431,0	58.738,0	54.838,0	24.941,0	221.948,0
15	Jawa Timur	723.060,0	641.638,0	440.657,0	1.061.627,0	2.866.982,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Bali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Sulawesi Utara	0,0	288,0	0,0	0,0	288,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Sulawesi Selatan	23.713,0	36.482,0	15.122,0	84,0	75.401,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gorontalo	6.692,0	5.000,0	0,0	2.783,0	14.475,0
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		1.304.704	1.323.796	1.214.155	1.769.610	5.612.265

Tabel 3.8
Table 3.8

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
Pengembangan Hortikultura
Food And Energy Security Soft Loan - on Horticulture
2009 – 2012

Rp. Juta/ Million IDR

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total
		2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sumatera Utara	0,0	855,0	1.261,0	3.857,0	5.973,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	388,0	238,0	626,0
4	Riau	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	345,0	791,0	1.004,0	2.494,0	4.634,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lampung	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	2.800,0	5.480,0	5.612,0	7.446,0	21.338,0
13	Jawa Tengah	386,0	904,0	3.000,0	3.718,0	8.008,0
14	D.I. Yogyakarta	229,0	746,0	1.130,0	1.854,0	3.959,0
15	Jawa Timur	685,0	10.792,0	10.310,0	15.533,0	37.320,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Bali	0,0	0,0	50,0	504,0	554,0
18	Nusa Tenggara Barat	726,0	786,0	1.000,0	4.227,0	6.739,0
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	381,0	381,0
22	Kalimantan Selatan	191,0	442,0	704,0	360,0	1.697,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Sulawesi Selatan	0,0	4.666,0	839,0	2.370,0	7.875,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		5.362	25.462	25.298	43.512	99.634

**Tabel
Table 3.9**

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
Pengadaan Pangan
Food And Energy Security Soft Loan - on Food Provision
2009 – 2012

Rp. Juta/ Million IDR

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total
		2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
2	Sumatera Utara	700,0	1.270,0	1.579,0	4.859,0	8.408,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	0,0	285,0	285,0
4	Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lampung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	2.303,0	1.864,0	0,0	2.798,0	6.965,0
13	Jawa Tengah	3.406,0	1.518,0	3.262,0	11.531,0	19.717,0
14	D.I. Yogyakarta	3.534,0	0,0	0,0	75,0	3.609,0
15	Jawa Timur	2.690,0	4.271,0	2.945,0	9.084,0	18.990,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	151,0	151,0
17	Bali	2.514,0	0,0	900,0	900,0	4.314,0
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
19	Nusa Tenggara timur	0,0	0,0	0,0	97,0	97,0
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	117,0	117,0
21	Kalimantan Tengah	149,0	225,0	650,0	775,0	1.799,0
22	Kalimantan Selatan	923,0	149,0	1.594,0	275,0	2.941,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Sulawesi Selatan	435,0	250,0	0,0	2.061,0	2.746,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	145,0	145,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	0,0	250,0	0,0	655,0	905,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		16.654	9.797	10.930	34.783	72.164

Tabel 3.10
Table

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
Pengembangan Peternakan
Food And Energy Security Soft Loans – on Husbandry
2009 – 2012

Rp. Juta/ Million IDR

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total
		2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0,0	42,0	62,0	104,0	208,0
2	Sumatera Utara	1.360,0	2.169,0	15.249,0	29.628,0	48.406,0
3	Sumatera Barat	115,0	2.805,0	18.579,0	18.411,0	39.910,0
4	Riau	341,0	2.941,0	1.529,0	18.289,0	23.100,0
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	10.403,0	6.800,0	1.254,0	5.154,0	23.611,0
7	Bengkulu	6.598,0	3.136,0	2.010,0	30.189,0	41.933,0
8	Lampung	68.072,0	40.360,0	17.521,0	48.978,0	174.931,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	67.525,0	80.516,0	81.562,0	123.594,0	353.197,0
13	Jawa Tengah	51.575,0	66.099,0	121.908,0	202.782,0	442.364,0
14	D.I. Yogyakarta	8.429,0	9.588,0	11.343,0	59.329,0	88.689,0
15	Jawa Timur	95.766,0	222.212,0	248.742,0	407.698,0	974.418,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	2.072,0	2.072,0
17	Bali	109.229,0	76.610,0	80.085,0	185.579,0	451.503,0
18	Nusa Tenggara Barat	27.037,0	8.105,0	15.581,0	31.370,0	82.093,0
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	140,0	4.487,0	5.154,0	9.781,0
20	Kalimantan Barat	0,0	270,0	2.314,0	3.553,0	6.137,0
21	Kalimantan Tengah	2.620,0	820,0	3.897,0	12.065,0	19.402,0
22	Kalimantan Selatan	4.851,0	8.222,0	8.861,0	49.795,0	71.729,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	2.986,0	2.506,0	5.492,0
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	1.125,0	1.405,0	2.530,0
26	Sulawesi Selatan	7.397,0	17.799,0	32.061,0	70.591,0	127.848,0
27	Sulawesi Tenggara	2.950,0	0,0	12,0	4.602,0	7.564,0
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	3.799,0	4.023,0	7.822,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	4.225,0	3.603,0	4.478,0	20.379,0	32.685,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		468.493	552.237	679.445	1.337.550	3.037.725

Tabel 3.11
Table

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
Pengembangan Singkong, Ubi Jalar, Kacang Tanah, dan Sorgum
Food And Energy Security Soft Loan - on Cassava, Sweet Potato, Peanuts, and Buckwheat
2009 – 2012

Rp. Juta/ Million IDR

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total
		2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sumatera Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Sumatera Selatan	235,0	1.905,0	1.902,0	424,0	4.466,0
7	Bengkulu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Lampung	17.182,0	9.807,0	8.157,0	28.115,0	63.261,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	4.700,0	616,0	5.316,0
14	D.I. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Jawa Timur	2.456,0	1.816,0	5.971,0	14.288,0	24.531,0
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Bali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	19,0	0,0	571,0	18,0	608,0
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	420,0	0,0	420,0
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Sulawesi Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Papua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Papua Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		19.892,0	13.528,0	21.721,0	43.461	98.602



PUPUK DAN PESTISIDA

Fertilizers and Pesticides

Direktorat Pupuk dan pestisida bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pestisida.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida di tahun 2012 diantaranya adalah penyaluran bantuan langsung pupuk, pengalokasian subsidi pupuk, dan pengawasan pupuk dan pestisida.

Jenis pupuk yang disalurkan melalui Bantuan Langsung Pupuk (BLP) adalah pupuk NPK dan pupuk organik, baik itu pupuk organik cair maupun pupuk organik granule.

Penyaluran BLP di tahun 2012 hanya dilaksanakan di 9 provinsi. Sehingga dapat dipastikan adanya penurunan yang signifikan dalam hal kuantitas penyalurannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase penurunan realisasi penyaluran pupuk NPK dan pupuk organik granule mencapai sebesar 94,40%.

Sementara untuk subsidi pupuk, jenis pupuk yang disalurkan adalah pupuk urea, SP36, NPK, ZA, dan pupuk organik. Realisasi penyaluran subsidi pupuk mengalami peningkatan dua tahun terakhir, kecuali untuk pupuk urea.

Peningkatan terbesar adalah pada penyaluran pupuk organik dengan persentase peningkatan mencapai 90,94%.

Directorate of Fertilizer and Pesticides duty is preparing the formulation and implementation of policies, preparation of norms, standards, procedures, and criterias, as well as providing technical guidance and evaluation in fertilizers and pesticides.

Some programmes performed by Directorate of Fertilizer and Pesticides in 2012 are the distribution of fertilizer direct support, allocation of subsidized fertilizer and monitoring of fertilizer and pesticide.

The types of fertilizer distributed through fertilizer direct aid are NPK and organic fertilizer, both liquid organic fertilizer and granule organic fertilizer.

The distribution of BLP in 2012 was just executed in 9 provinces. So there is surely a significant decline in quantity of distributed fertilizer—compared to the previous year. The declining percentage of distribution of NPK and organic granule fertilizer was reached 94,40%.

Meanwhile, for subsidized fertilizer, there were five types of fertilizer distributed, they are urea, SP36, NPK, ZA, and organic fertilizer. The realizations of subsidized fertilizer distribution are increasing in recent two years, except for urea.

The most rapid increase was in the distribution of organic fertilizer which the percentage of increasing was reaching 90,94%

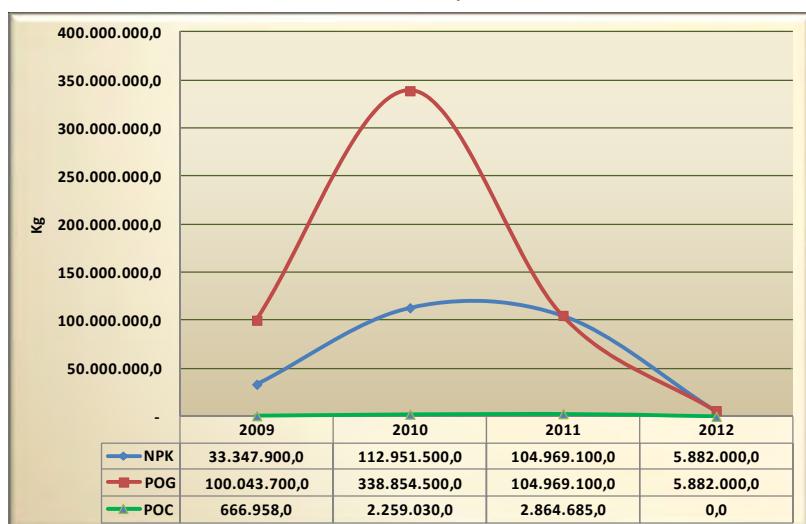
Tren tersebut juga diikuti oleh pupuk lain, yaitu pupuk NPK yang mengalami peningkatan sebesar 20,78% dan pupuk SP 36 yang meningkat 16,96%. Sementara untuk pupuk urea, sat-satunya pupuk artifisial tunggal yang mengalami penurunan realisasi penyalurannya sebesar 8,32%.

Untuk pupuk ZA, realisasi penyalurannya juga mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, yaitu sebesar 4,51%

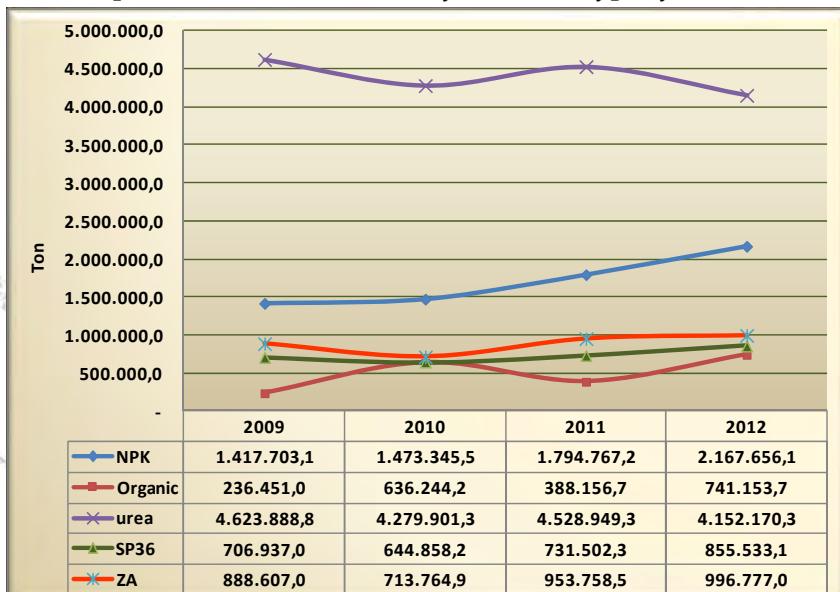
The increasing tren was followed by the other fertilizers distribution. For NPK, the distribution was increasing by 20,78% and SP36 was increasing by 19,96%. Meanwhile, urea was the only single artificial fertilizer that was declined. The declining percentage was up to 8,32%.

The realization of ZA distribution was also increasing—although slightly significant—by 4,51%.

Gambar 4.1 Grafik Realisasi Kegiatan Bantuan Langsung Pupuk Tahun 2009—2012
Figure 4.1 Graph of Direct Fertilizer Support by 2009—2012



Gambar 4.2 Grafik Realisasi Subsidi Pupuk Tahun per-Jenis Pupuk 2009—2012
Figure 4.2 Graph of Subsidized Fertilizer by Fertilizer Type by 2009—2012



Tabel 4.1
Table

Bantuan Langsung Pupuk NPK
Direct Fertilizer Support - NPK
2009 - 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total 2009 - 2012
		2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7	8
1	Aceh	581.000,0	6.000.000,0	4.315.900,0	0,0	10.896.900,0
2	Sumatera Utara	1.386.000,0	9.500.000,0	10.039.950,0	0,0	20.925.950,0
3	Sumatera Barat	815.000,0	5.421.500,0	1.802.250,0	0,0	8.038.750,0
4	Riau	0,0	1.900.000,0	1.995.000,0	354.000,0	4.249.000,0
5	Jambi	140.000,0	1.109.900,0	1.118.250,0	396.000,0	2.764.150,0
6	Sumatera Selatan	0,0	6.518.000,0	6.544.150,0	0,0	13.062.150,0
7	Bengkulu	348.600,0	1.704.800,0	938.000,0	362.000,0	3.353.400,0
8	Lampung	761.000,0	4.000.000,0	6.875.400,0	0,0	11.636.400,0
9	Bangka Belitung	0,0	280.000,0	604.700,0	300.000,0	1.184.700,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	6.441.800,0	11.298.200,0	4.002.200,0	0,0	21.742.200,0
13	Jawa Tengah	8.135.600,0	9.549.000,0	3.925.950,0	0,0	21.610.550,0
14	DI. Yogyakarta	319.200,0	2.476.000,0	1.845.000,0	0,0	4.640.200,0
15	Jawa Timur	8.229.500,0	9.767.500,0	13.289.400,0	0,0	31.286.400,0
16	Banten	1.784.000,0	2.852.500,0	3.383.500,0	0,0	8.020.000,0
17	Bali	349.000,0	1.900.000,0	1.041.850,0	0,0	3.290.850,0
18	Nusa Tenggara Barat	308.100,0	4.900.000,0	4.949.200,0	0,0	10.157.300,0
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	1.249.000,0	2.821.150,0	660.000,0	4.730.150,0
20	Kalimantan Barat	763.000,0	4.828.000,0	4.986.350,0	1.636.000,0	12.213.350,0
21	Kalimantan Tengah	217.000,0	2.759.400,0	4.741.250,0	940.000,0	8.657.650,0
22	Kalimantan Selatan	862.000,0	4.500.000,0	1.570.900,0	946.000,0	7.878.900,0
23	Kalimantan Timur	331.000,0	1.140.000,0	2.520.400,0	288.000,0	4.279.400,0
24	Sulawesi Utara	0,0	3.055.000,0	2.227.950,0	0,0	5.282.950,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	2.500.000,0	1.255.000,0	0,0	3.755.000,0
26	Sulawesi Selatan	1.164.600,0	7.500.000,0	13.328.200,0	0,0	21.992.800,0
27	Sulawesi Tenggara	168.500,0	2.481.200,0	1.404.300,0	0,0	4.054.000,0
28	Gorontalo	99.000,0	797.600,0	1.420.000,0	0,0	2.316.600,0
29	Sulawesi Barat	144.000,0	1.468.000,0	2.022.900,0	0,0	3.634.900,0
30	Maluku	0,0	382.000,0	0,0	0,0	382.000,0
31	Maluku Utara	0,0	605.300,0	0,0	0,0	605.300,0
32	Papua	0,0	71100,0	0,0	0,0	71.100,0
33	Papua Barat	0,0	437.500,0	0,0	0,0	437.500,0
Indonesia		33.347.900,0	112.951.500,0	104.969.100,0	5.882.000,0	257.150.500,0

Tabel 4.2
Table

Bantuan Langsung Pupuk Organik Granule
Direct Fertilizer Support - Organic Granule
2009 - 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total 2009 - 2012 Kg
		2009 4	2010 5	2011 6	2012 7	
1	2	4	5	6	7	8
1	Aceh	1.743.000,0	18.000.000,0	4.315.900,0	0,0	24.058.900,0
2	Sumatera Utara	4.158.000,0	28.500.000,0	10.039.950,0	0,0	42.697.950,0
3	Sumatera Barat	2.445.000,0	16.264.500,0	1.802.250,0	0,0	20.511.750,0
4	Riau	0,0	3.329.700,0	1.995.000,0	354.000,0	5.678.700,0
5	Jambi	420.000,0	5.700.000,0	1.118.250,0	396.000,0	7.634.250,0
6	Sumatera Selatan	0,0	19.554.000,0	6.544.150,0	0,0	26.098.150,0
7	Bengkulu	1.045.800,0	5.114.400,0	938.000,0	362.000,0	7.460.200,0
8	Lampung	2.283.000,0	12.000.000,0	6.875.400,0	0,0	21.158.400,0
9	Bangka Belitung	0,0	840.000,0	604.700,0	300.000,0	1.744.700,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	19.325.400,0	33.894.600,0	4.002.200,0	0,0	57.222.200,0
13	Jawa Tengah	24.406.800,0	28.647.000,0	3.925.950,0	0,0	56.979.750,0
14	DI. Yogyakarta	957.600,0	7.428.000,0	1.845.000,0	0,0	10.230.600,0
15	Jawa Timur	24.688.500,0	29.302.500,0	13.289.400,0	0,0	67.280.400,0
16	Banten	5.352.000,0	8.557.500,0	3.383.500,0	0,0	17.293.000,0
17	Bali	1.047.000,0	5.700.000,0	1.041.850,0	0,0	7.788.850,0
18	Nusa Tenggara Barat	924.300,0	14.700.000,0	4.949.200,0	0,0	20.573.500,0
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	3.747.000,0	2.821.150,0	660.000,0	7.228.150,0
20	Kalimantan Barat	2.289.000,0	14.484.000,0	4.986.350,0	1.636.000,0	23.395.350,0
21	Kalimantan Tengah	651.000,0	8.278.200,0	4.741.250,0	940.000,0	14.610.450,0
22	Kalimantan Selatan	2.586.000,0	13.500.000,0	1.570.900,0	946.000,0	18.602.900,0
23	Kalimantan Timur	993.000,0	3.420.000,0	2.520.400,0	288.000,0	7.221.400,0
24	Sulawesi Utara	0,0	9.165.000,0	2.227.950,0	0,0	11.392.950,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	7.500.000,0	1.255.000,0	0,0	8.755.000,0
26	Sulawesi Selatan	3.493.800,0	22.500.000,0	13.328.200,0	0,0	39.322.000,0
27	Sulawesi Tenggara	505.500,0	7.443.600,0	1.404.300,0	0,0	9.353.400,0
28	Gorontalo	297.000,0	2.392.800,0	1.420.000,0	0,0	4.109.800,0
29	Sulawesi Barat	432.000,0	4.404.000,0	2.022.900,0	0,0	6.858.900,0
30	Maluku	0,0	1.146.000,0	0,0	0,0	1.146.000,0
31	Maluku Utara	0,0	1.815.900,0	0,0	0,0	1.815.900,0
32	Papua	0,0	213.300,0	0,0	0,0	213.300,0
33	Papua Barat	0,0	1.312.500,0	0,0	0,0	1.312.500,0
Indonesia		100.043.700,0	338.854.500,0	104.969.100,0	5.882.000,0	549.749.300,0

Tabel 4.3
Table

Bantuan Langsung Pupuk Organik Cair
Direct Fertilizer Support – Organic Liquid
2009 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total
		2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7	8
1	Aceh	11.620,0	120.000,0	140.000,0	0,0	271.620,0
2	Sumatera Utara	27.720,0	190.000,0	320.820,0	0,0	538.540,0
3	Sumatera Barat	16.300,0	108.430,0	45.000,0	0,0	169.730,0
4	Riau	0,0	22.198,0	75.000,0	0,0	97.198,0
5	Jambi	2.800,0	38.000,0	19.020,0	0,0	59.820,0
6	Sumatera Selatan	0,0	130.360,0	200.000,0	0,0	330.360,0
7	Bengkulu	6.972,0	34.096,0	21.760,0	0,0	62.828,0
8	Lampung	15.220,0	80.000,0	212.505,0	0,0	307.725,0
9	Bangka Belitung	0,0	5.600,0	30.235,0	0,0	35.835,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	128.836,0	225.964,0	106.135,0	0,0	460.935,0
13	Jawa Tengah	162.712,0	190.980,0	75.000,0	0,0	428.692,0
14	DI. Yogyakarta	6.384,0	49.520,0	75.000,0	0,0	130.904,0
15	Jawa Timur	164.590,0	195.350,0	229.095,0	0,0	589.035,0
16	Banten	35.680,0	57.050,0	158.510,0	0,0	251.240,0
17	Bali	6.980,0	38.000,0	17.000,0	0,0	61.980,0
18	Nusa Tenggara Barat	6.162,0	98.000,0	201.245,0	0,0	305.407,0
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	24.980,0	49.025,0	0,0	74.005,0
20	Kalimantan Barat	15.260,0	96.560,0	175.000,0	0,0	286.820,0
21	Kalimantan Tengah	4.340,0	55.188,0	187.600,0	0,0	247.128,0
22	Kalimantan Selatan	17.240,0	90.000,0	57.500,0	0,0	164.740,0
23	Kalimantan Timur	6.620,0	22.800,0	84.605,0	0,0	114.025,0
24	Sulawesi Utara	0,0	61.100,0	38.595,0	0,0	99.695,0
25	Sulawesi Tengah	0,0	50.000,0	29.750,0	0,0	79.750,0
26	Sulawesi Selatan	23.292,0	150.000,0	200.000,0	0,0	373.292,0
27	Sulawesi Tenggara	3.370,0	49.624,0	41.535,0	0,0	94.529,0
28	Gorontalo	1.980,0	15.952,0	29.750,0	0,0	47.682,0
29	Sulawesi Barat	2.880,0	29.360,0	45.000,0	0,0	77.240,0
30	Maluku	0,0	7.640,0	0,0	0,0	7.640,0
31	Maluku Utara	0,0	12.106,0	0,0	0,0	12.106,0
32	Papua	0,0	1422,0	0,0	0,0	1.422,0
33	Papua Barat	0,0	8.750,0	0,0	0,0	8.750,0
Indonesia		666.958,0	2.259.030,0	2.864.685,0	0,0	5.790.673,0

Tabel 4.4
Table

Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi
Subsidized Fertilizer Distribution – Urea
2009 – 2012

Ton

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total 2009 – 2012
		2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7	8
1	Aceh	88.504,0	79.568,0	90.034,5	71.974,0	330.080,5
2	Sumatera Utara	172.711,0	165.319,0	195.701,7	166.873,5	700.605,2
3	Sumatera Barat	75.908,6	79.160,0	69.838,3	76.172,5	301.079,4
4	Riau	28.529,9	27.177,0	23.691,3	29.902,1	109.300,3
5	Jambi	44.575,7	44.892,0	39.786,3	33.288,6	162.542,5
6	Sumatera Selatan	196.944,0	196.552,0	221.155,6	186.978,5	801.630,1
7	Bengkulu	23.800,0	25.714,0	28.776,0	25.061,0	103.351,0
8	Lampung	336.055,0	331.587,0	319.137,1	275.317,6	1.262.096,7
9	Bangka Belitung	15.909,1	13.413,0	19.130,6	18.570,2	67.022,8
10	Kepulauan Riau	0,0	122,0	138,0	117,9	377,9
11	DKI Jakarta	100,0	0,0	0,0	539,0	639,0
12	Jawa Barat	666.921,9	676.493,0	722.312,3	529.873,5	2.595.600,7
13	Jawa Tengah	887.864,0	799.548,5	901.236,8	819.485,8	3.408.135,1
14	DI. Yogyakarta	53.366,6	46.927,0	43.739,9	43.928,3	187.961,7
15	Jawa Timur	1.248.653,0	1.056.018,6	1.104.199,9	1.118.221,3	4.527.092,8
16	Banten	92.685,0	66.065,0	53.349,2	65.570,0	277.669,2
17	Bali	50.474,7	47.182,0	45.745,4	44.208,1	187.610,2
18	Nusa Tenggara Barat	20.852,0	126.840,0	1.400,0	129.395,0	278.487,0
19	Nusa Tenggara Timur	132.112,0	21.567,0	125.786,9	23.168,6	302.634,5
20	Kalimantan Barat	33.050,5	29.055,6	35.270,2	32.470,1	129.846,4
21	Kalimantan Tengah	12.445,0	13.323,6	15.784,4	14.609,0	56.162,0
22	Kalimantan Selatan	36.709,0	39.999,6	43.057,8	38.240,4	158.006,8
23	Kalimantan Timur	17.546,0	17.924,6	18.857,3	17.160,4	71.488,3
24	Sulawesi Utara	19.446,0	19.896,6	20.230,2	19.975,4	79.548,2
25	Sulawesi Tengah	37.661,0	31.223,8	31.526,8	29.037,7	129.449,2
26	Sulawesi Selatan	261.911,0	262.047,0	266.199,2	272.157,9	1.062.315,1
27	Sulawesi Tenggara	22.172,0	16.885,0	18.311,5	19.097,6	76.466,1
28	Gorontalo	13.494,0	16.490,0	18.117,8	17.619,9	65.721,6
29	Sulawesi Barat	1.147,0	19.021,0	21.025,8	23.301,4	64.495,2
30	Maluku	24.364,0	2.835,0	26.439,2	1.936,2	55.574,4
31	Maluku Utara	5.216,0	316,0	5.305,8	521,0	11.358,8
32	Papua	2.212,0	5750,4	3.144,0	6.225,5	17.331,9
33	Papua Barat	549,0	988,0	520,0	1.173,0	3.230,0
Indonesia		4.623.888,8	4.279.901,3	4.528.949,3	4.152.170,3	17.584.909,8

Tabel 4.5
Table

Penyaluran Pupuk SP36 Bersubsidi
Subsidized Fertilizer Distribution – SP36
2009 – 2012

Ton

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total
		2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7	8
1	Aceh	13.735,0	14.078,0	18.545,0	22.809,4	69.167,4
2	Sumatera Utara	40.722,0	34.552,4	44.500,5	49.133,7	168.908,6
3	Sumatera Barat	19.784,0	22.683,0	21.475,2	27.610,0	91.552,1
4	Riau	5.072,0	5.308,8	6.946,2	12.179,4	29.506,3
5	Jambi	8.375,0	13.336,8	12.141,5	18.902,5	52.755,8
6	Sumatera Selatan	26.096,0	36.982,0	38.503,0	48.459,2	150.040,2
7	Bengkulu	4.446,0	4.821,5	7.579,7	7.888,5	24.735,7
8	Lampung	47.458,0	35.550,0	42.513,0	46.054,0	171.575,0
9	Bangka Belitung	3.316,0	3.218,0	3.151,9	4.739,8	14.425,7
10	Kepulauan Riau	533,0	0,0	286,7	32,5	852,1
11	DKI Jakarta	55,0	0,0	45,0	60,0	160,0
12	Jawa Barat	128.276,0	121.888,0	17.754,5	152.137,0	420.055,5
13	Jawa Tengah	118.648,0	118.920,5	3.021,0	156.167,4	396.756,9
14	DI. Yogyakarta	4.223,0	2.335,0	141.606,5	3.620,5	151.785,0
15	Jawa Timur	175.317,0	135.883,9	128.769,7	157.567,1	597.537,7
16	Banten	16.850,0	19.319,0	20,0	21.805,0	57.994,0
17	Bali	3.317,0	2.216,4	144.895,0	2.493,4	152.921,8
18	Nusa Tenggara Barat	14.172,0	13.475,5	30.962,0	19.433,0	78.042,5
19	Nusa Tenggara Timur	3.303,0	3.075,2	1.908,0	4.938,5	13.224,7
20	Kalimantan Barat	9.370,0	7.330,7	2.397,0	13.875,7	32.973,3
21	Kalimantan Tengah	3.415,0	2.432,9	9.792,4	5.112,3	20.752,6
22	Kalimantan Selatan	5.362,0	4.995,4	3.868,7	8.987,7	23.213,8
23	Kalimantan Timur	3.581,0	4.068,9	7.127,8	5.330,3	20.108,0
24	Sulawesi Utara	3.672,0	2.270,4	4.932,0	4.119,0	14.993,4
25	Sulawesi Tengah	4.134,0	2.309,4	1.399,0	3.593,4	11.435,8
26	Sulawesi Selatan	34.008,0	26.462,6	5.660,5	44.278,2	110.409,3
27	Sulawesi Tenggara	5.439,0	4.073,6	3.520,0	7.174,5	20.207,1
28	Gorontalo	815,0	632,0	3.328,0	1.548,0	6.323,0
29	Sulawesi Barat	993,0	1.239,2	78,5	2.063,5	4.374,2
30	Maluku	150,0	50,0	17.973,0	142,0	18.315,0
31	Maluku Utara	54,0	9,0	195,0	116,5	374,5
32	Papua	2.032,0	1237,3	4.565,0	2.901,6	10.735,8
33	Papua Barat	214,0	103,0	2.041,5	259,9	2.618,3
Indonesia		706.937,0	644.858,2	731.502,3	855.533,1	2.938.830,5

Tabel 4.6
Table

Penyaluran Pupuk NPK Bersubsidi
Subsidized Fertilizer Distribution – NPK
2009 – 2012

Ton

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total 2009 – 2012
		2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7	8
1	Aceh	22.295,0	26.245,0	38.573,4	41.928,1	129.041,5
2	Sumatera Utara	93.992,0	92.928,0	121.972,4	127.915,7	436.808,0
3	Sumatera Barat	38.062,0	40.298,1	49.852,4	53.893,1	182.105,6
4	Riau	11.968,0	12.677,5	16.811,0	35.282,2	76.738,6
5	Jambi	13.641,0	17.792,5	24.486,0	41.196,4	97.115,9
6	Sumatera Selatan	60.240,0	77.999,0	93.533,0	99.878,2	331.650,2
7	Bengkulu	13.026,0	16.673,5	21.942,5	27.365,0	79.007,0
8	Lampung	80.466,0	96.806,0	125.039,8	142.271,0	444.582,8
9	Bangka Belitung	7.920,0	11.556,9	13.855,2	19.940,9	53.272,9
10	Kepulauan Riau	719,0	0,0	500,0	149,2	1.368,2
11	DKI Jakarta	95,0	23.471,5	40,0	80,0	23.686,5
12	Jawa Barat	245.826,1	12.850,0	259.734,5	267.329,2	785.739,8
13	Jawa Tengah	235.214,9	347.060,8	278.172,9	386.229,9	1.246.678,4
14	DI. Yogyakarta	17.285,0	229.321,7	16.421,6	21.981,5	285.009,8
15	Jawa Timur	362.002,5	16.192,0	433.539,2	516.738,1	1.328.471,8
16	Banten	29.250,4	249.609,2	21.874,4	26.213,0	326.947,0
17	Bali	17.021,2	31.818,8	17.974,1	18.831,1	85.645,2
18	Nusa Tenggara Barat	16.390,4	6.451,8	8.885,9	27.753,3	59.481,3
19	Nusa Tenggara Timur	4.908,4	1.360,0	27.870,5	9.465,1	43.604,0
20	Kalimantan Barat	24.698,0	13.133,3	47.833,6	66.707,1	152.372,0
21	Kalimantan Tengah	6.604,0	20.285,2	20.349,7	26.033,3	73.272,2
22	Kalimantan Selatan	13.506,6	12.833,0	26.196,9	33.340,5	85.877,0
23	Kalimantan Timur	10.443,1	6.869,6	15.006,4	20.682,6	53.001,6
24	Sulawesi Utara	7.887,9	6.801,6	8.724,1	10.698,6	34.112,1
25	Sulawesi Tengah	9.089,7	6.804,6	17.273,4	24.106,1	57.273,7
26	Sulawesi Selatan	52.050,0	21.899,3	53.908,6	77.523,3	205.381,2
27	Sulawesi Tenggara	6.903,0	51.214,2	8.130,5	10.348,5	76.596,2
28	Gorontalo	6.128,0	12.887,8	9.614,4	11.550,0	40.180,2
29	Sulawesi Barat	3.451,0	430,0	1.537,2	12.439,7	17.857,8
30	Maluku	1.209,1	2.430,8	7.590,5	1.376,4	12.606,7
31	Maluku Utara	733,0	1.067,7	4.116,4	1.217,2	7.134,2
32	Papua	3.683,0	437,2	2.181,6	5.534,2	11.836,0
33	Papua Barat	994,0	5.139,1	1.225,7	1.658,3	9.017,0
Indonesia		1.417.703,1	1.473.345,5	1.794.767,2	2.167.656,1	6.853.471,9

Tabel 4.7
Table

Penyaluran Pupuk ZA Bersubsidi
Subsidized Fertilizer Distribution – ZA
2009 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total
		2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7	8
1	Aceh	5.635,0	5.378,0	10.316,6	10.601,0	31.930,6
2	Sumatera Utara	55.545,0	40.993,0	52.976,8	51.353,0	200.867,8
3	Sumatera Barat	17.012,0	9.455,0	21.637,3	20.687,0	68.791,3
4	Riau	3.758,0	3.664,4	5.412,6	8.026,0	20.861,0
5	Jambi	4.538,0	4.785,0	4.376,1	7.015,0	20.714,1
6	Sumatera Selatan	4.404,0	6.349,0	8.637,0	9.586,0	28.976,0
7	Bengkulu	2.230,0	2.411,0	4.125,5	4.241,0	13.007,5
8	Lampung	12.326,0	9.675,0	21.593,0	22.450,0	66.044,0
9	Bangka Belitung	1.087,0	1.390,5	1.754,9	1.903,0	6.135,4
10	Kepulauan Riau	277,0	0,0	50,0	23,0	350,0
11	DKI Jakarta	0,0	937,0	0,0	0,0	937,0
12	Jawa Barat	71.394,0	6.688,0	63.728,5	69.717,0	211.527,5
13	Jawa Tengah	170.651,0	351.967,5	175.200,5	199.885,0	897.704,0
14	DI. Yogyakarta	10.551,0	125.747,2	8.658,0	9.440,0	154.396,2
15	Jawa Timur	426.291,0	5.964,0	466.472,4	465.213,0	1.363.940,4
16	Banten	1.461,0	58.772,0	943,0	1.329,0	62.505,0
17	Bali	9.036,0	3.917,5	6.792,0	6.848,0	26.593,5
18	Nusa Tenggara Barat	11.035,0	620,7	5.711,6	12.204,0	29.571,3
19	Nusa Tenggara Timur	353,0	185,0	12.545,2	1.731,0	14.814,2
20	Kalimantan Barat	2.942,0	491,0	4.940,8	3.518,0	11.891,8
21	Kalimantan Tengah	388,0	1.591,6	1.189,9	1.585,0	4.754,5
22	Kalimantan Selatan	912,0	1.595,0	1.616,4	2.175,0	6.298,4
23	Kalimantan Timur	1.685,0	41,0	2.282,6	2.526,0	6.534,6
24	Sulawesi Utara	367,0	30,0	207,6	743,0	1.347,6
25	Sulawesi Tengah	8.024,0	2.811,5	8.565,8	9.392,0	28.793,3
26	Sulawesi Selatan	56.457,0	9.975,2	58.550,5	61.114,0	186.096,7
27	Sulawesi Tenggara	5.459,0	45.294,7	3.393,5	4.245,0	58.392,2
28	Gorontalo	73,0	7.485,6	47,0	750,0	8.355,6
29	Sulawesi Barat	3.616,0	0,0	210,6	7.384,0	11.210,6
30	Maluku	170,0	413,8	794,6	125,0	1.503,4
31	Maluku Utara	42,0	117,5	541,2	216,0	916,6
32	Papua	718,0	63,1	322,0	599,0	1.702,1
33	Papua Barat	170,0	4.955,2	165,2	153,0	5.443,4
Indonesia		888.607,0	713.764,9	953.758,5	996.777,0	3.552.907,4

Tabel 4.8
Table

Penyaluran Pupuk Organik Bersubsidi
Subsidized Fertilizer Distribution – Organic Fertilizer
2009 – 2012

Ton

No	Propinsi / Province	Tahun / Year				Total 2009 – 2012
		2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7	8
1	Aceh	3.245,0	5.464,0	6.639,7	15.926,0	31.274,7
2	Sumatera Utara	13.682,0	34.552,4	21.893,6	27.363,5	97.491,5
3	Sumatera Barat	5.428,0	22.683,0	11.301,2	13.801,6	53.213,8
4	Riau	1.304,0	5.308,8	2.481,4	4.389,1	13.483,2
5	Jambi	1.631,0	13.336,8	4.635,0	6.017,0	25.619,8
6	Sumatera Selatan	3.789,0	36.982,0	13.785,3	20.852,8	75.409,1
7	Bengkulu	2.653,0	4.821,5	4.449,4	4.340,0	16.263,9
8	Lampung	9.028,0	35.550,0	17.498,0	35.144,0	97.220,0
9	Bangka Belitung	1.799,0	3.218,0	2.026,6	3.348,6	10.392,2
10	Kepulauan Riau	125,0	0,0	0,0	5,0	130,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
12	Jawa Barat	16.385,0	121.888,0	23.894,8	50.566,1	212.733,9
13	Jawa Tengah	49.330,0	118.920,5	72.984,1	204.662,3	445.896,9
14	DI. Yogyakarta	3.568,0	2.335,0	4.800,0	9.208,0	19.911,0
15	Jawa Timur	97.905,0	135.883,9	149.662,4	226.102,5	609.553,7
16	Banten	1.753,0	19.319,0	2.916,0	4.905,0	28.893,0
17	Bali	7.020,0	2.216,4	10.307,4	18.879,6	38.423,3
18	Nusa Tenggara Barat	2.107,0	13.475,5	580,9	10.439,8	26.603,1
19	Nusa Tenggara Timur	133,0	3.075,2	4.264,6	4.809,0	12.281,8
20	Kalimantan Barat	3.117,0	7.330,7	8.602,2	20.713,0	39.762,8
21	Kalimantan Tengah	1.190,0	2.432,9	2.036,8	2.440,6	8.100,3
22	Kalimantan Selatan	1.214,0	4.995,4	2.696,0	9.349,5	18.254,9
23	Kalimantan Timur	1.356,0	4.068,9	1.164,6	1.948,7	8.538,2
24	Sulawesi Utara	649,0	2.270,4	1.313,5	1.635,5	5.868,4
25	Sulawesi Tengah	829,0	2.309,4	1.575,5	4.480,3	9.194,2
26	Sulawesi Selatan	4.494,0	26.462,6	10.121,9	26.204,5	67.282,9
27	Sulawesi Tenggara	1.279,0	4.073,6	4.245,6	7.159,4	16.757,6
28	Gorontalo	432,0	632,0	76,0	657,0	1.797,0
29	Sulawesi Barat	248,0	1.239,2	169,7	2.120,0	3.776,9
30	Maluku	50,0	50,0	699,7	463,4	1.263,1
31	Maluku Utara	156,0	9,0	786,8	683,1	1.634,9
32	Papua	527,0	1237,3	248,0	2.004,5	4.016,7
33	Papua Barat	25,0	103,0	300,2	184,6	612,7
Indonesia		236.451,0	636.244,2	388.156,7	741.153,7	2.002.005,5

Tabel 4.9
Table

Jumlah Pestisida Terdaftar di Indonesia per tahun

Registered Pesticide in Indonesia by year

2007 – 2012

No	Jenis Pestisida / Pesticide Types	Tahun / Year					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Akarisida / Miticides	18	19	20	20	17	18
2	Atraktan / Atractant	1	1	4	5	7	15
3	Bahan Pengawet Kayu / Wood Preservatives	58	64	72	78	66	77
4	Bakterisida / Bactericides	6	7	7	7	7	7
5	Fumigan / fumigant	2	3	5	3	21	32
6	Fungisida / Fungicides	274	320	354	389	405	449
7	Herbisida / Herbicides	444	507	586	631	672	742
8	Insektisida / Insecticides	618	703	786	847	887	988
9	Lain-lain / Other Pesticides	3	16	20	23	12	12
10	Moluskisida / Molluscicides	9	14	27	33	51	56
11	Nematisida / Nematicides	10	6	6	6	4	4
12	Pestisida Rumah Tangga / Household Pesticide	253	306	359	391	164	360
13	Repelen / Repellents	152	174	25	30	211	37
14	Rodentisida / Rodenticides	26	31	38	45	38	66
15	ZPT / Plant Regulators	54	75	86	97	110	124
Total		1.928	2.246	2.395	2.605	2.672	2.987

Tabel 4.10**Table**

Jumlah Pupuk dan Pemberah Tanah Terdaftar di Indonesia
Registered Fertilizer and Land Reformer in Indonesia by year
2007 – 2012

No	Jenis Pupuk dan Pemberah Tanah/ <i>Pesticide Types</i>	Tahun / Year					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pupuk An-Organik	180	272	340	384	287	182
2	Pupuk Organik	101	100	182	308	261	129
	Total	281	372	522	692	548	311



ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Agricultural Tools and Machineries

Tugas Direktorat Alat dan Mesin Pertanian adalah melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang alat dan mesin pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian memiliki beberapa kegiatan, diantaranya adalah Bantuan Alsintan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Mandiri.

Di tahun 2012, bantuan alsintan berstatus hibah dan diberikan kelompok tani/gapoktan/UPJA dalam bentuk traktor roda 2, traktor roda 4, dan pompa air. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah berhasil menyalurkan 18.343 unit traktor roda 2 di tahun 2012, meningkat 760,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, untuk penyaluran traktor roda 4, di tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 70,21%, atau dari segi yaitu sebanyak 80 unit.

Sejalan dengan dua jenis bantuan alat dan mesin pertanian sebelumnya, penyaluran pompa air di tahun 2012 juga mengalami tren yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana di tahun ini terdapat sebanyak 2.722 pompa air yang berhasil disalurkan kepada petani, meningkat sebesar 270,34% dari tahun sebelumnya.

Usaha Pengembangan Jasa Alsintan (UPJA) suatu lembaga ekonomi

The Directorate of Agricultural Tools and Machineries duty is carrying out the preparation of the formulation and implementation of policies, preparation of norms, standards, procedures, and criteria, as well as providing technical guidance and evaluation in the field of agricultural tools and machineries. In performing its duties, the Directorate of Agricultural Tools and Machineries has several activities, such as agricultural tools and machineries grant and Agricultural Tool And Machinery Services Development (UPJA).

In 2012, the agricultural tools and machineries supports was formed as grant and was given to farmers group/farmers association/UPJA in hand tractor, farm tractor, and water pump. Directorate General of Agriculture Infrastructure and Facility was succeeded to distribute 18.343 units of hand tractors in 2012, which it was 760,77% higher than the previous year. Incredibly, the distribution of farm tractor in 2012 to the farmers was increasing by 70,21%, or 80 units in quantity.

In accordance with the two earlier types of agricultural tools and machinery, the distribution of water pump in 2012 was also on an upward trend compared to the previous year, which in this year, there are as many successful water pump 2.722 channeled to farmers, increasing by 270,34% from the previous year.

Agricultural Tool And Machinery Services Development is a rural economic institutions engaged in services

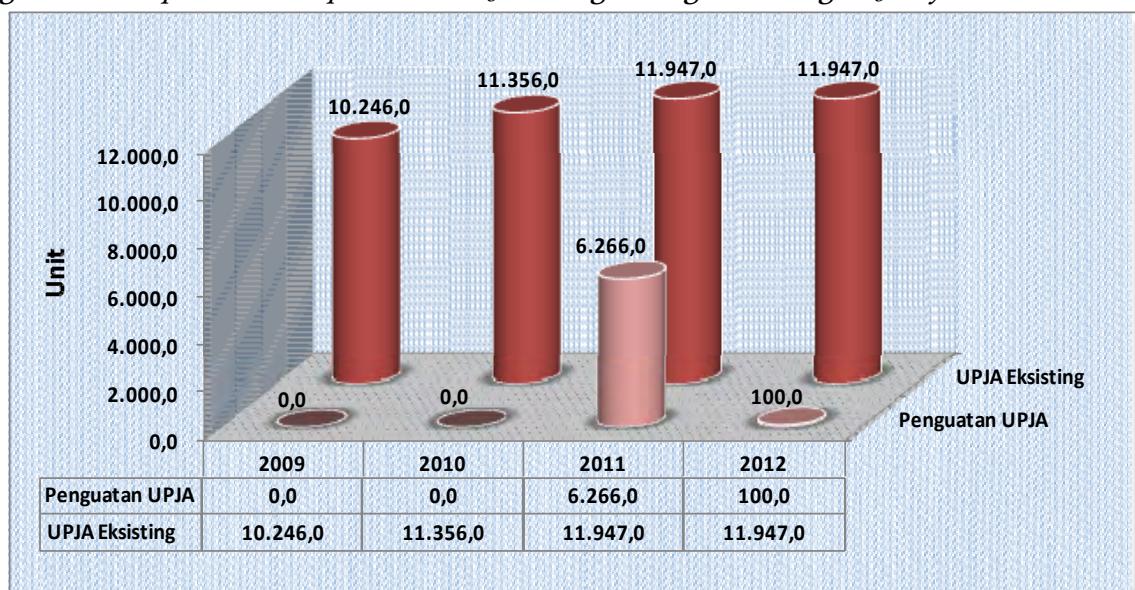
pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.

Di tahun 2012, sebanyak 100 UPJA mendapatkan bantuan penguatan UPJA Mandiri sebesar Rp 50.000.000. Dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah di tahun 2012 menurun drastis, mencapai 98,4%.

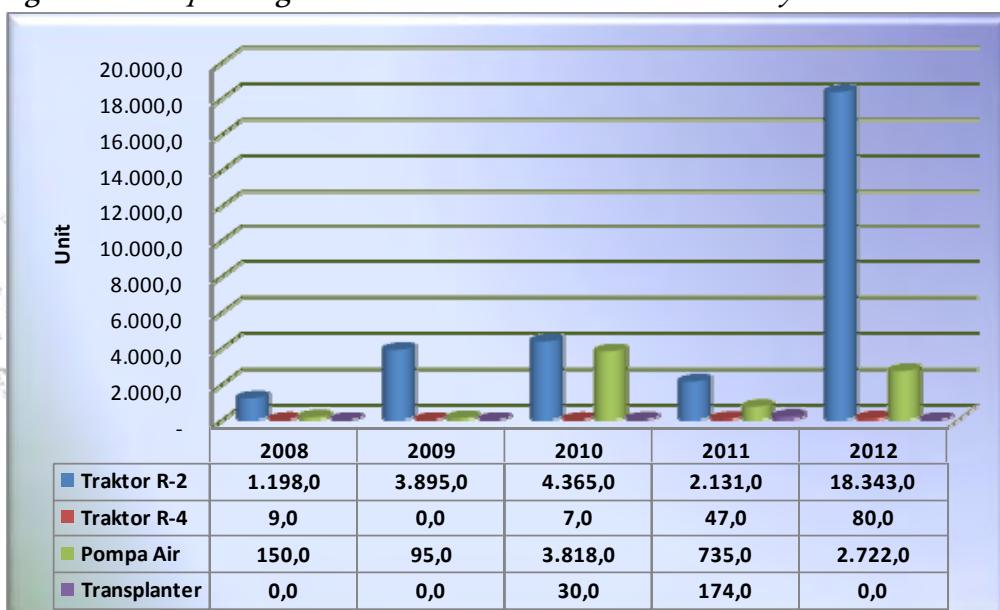
in order to optimize the use of agricultural machinery to benefit businesses both inside and outside farmer groups/farmer association.

In 2012 as many as 100 UPJA have received strengthening assistance UPJA Mandiri Rp 50,000,000. Compared with last year, the number decreased dramatically in 2012, reaching 98.4%.

Gambar 5.1 Grafik Perbandingan Realisasi Kegiatan Penguatan UPJA Terhadap Jumlah UPJA Eksisting
Figure 5.1 Graph of the comparison of UPJA Strengthening to Existing UPJA by 2009—2012



Gambar 5.2 Grafik Realisasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Alsintan Tahun 2009—2012
Figure 5.2 Graph of Agricultural Tools and Machineries Grant by 2009—2012



Tabel 5.1
Table

Bantuan Alat dan Mesin Pertanian – Traktor Roda 2
Agricultural Tools and Machineries Grant – Hand Tractor
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun / Year					Total 2008 – 2012
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7	8	
1	Aceh	54,0	30,0	111,0	69,0	1.492,0	1.756,0
2	Sumatera Utara	105,0	198,0	196,0	71,0	1.334,0	1.904,0
3	Sumatera Barat	27,0	123,0	119,0	60,0	952,0	1.281,0
4	Riau	2,0	8,0	147,0	30,0	121,0	308,0
5	Jambi	30,0	136,0	123,0	27,0	18,0	334,0
6	Sumatera Selatan	50,0	0,0	149,0	31,0	1.076,0	1.306,0
7	Bengkulu	22,0	57,0	84,0	18,0	37,0	218,0
8	Lampung	17,0	199,0	124,0	85,0	1.394,0	1.819,0
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	33,0	7,0	14,0	54,0
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	46,0
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Jawa Barat	58,0	609,0	371,0	282,0	1.513,0	2.833,0
13	Jawa Tengah	148,0	696,0	561,0	370,0	1.842,0	3.617,0
14	DI. Yogyakarta	12,0	110,0	77,0	40,0	52,0	291,0
15	Jawa Timur	158,0	663,0	559,0	200,0	1.692,0	3.272,0
16	Banten	87,0	80,0	111,0	124,0	467,0	869,0
17	Bali	18,0	53,0	141,0	24,0	38,0	274,0
18	Nusa Tenggara Barat	70,0	54,0	113,0	124,0	1.055,0	1.416,0
19	Nusa Tenggara Timur	15,0	70,0	103,0	21,0	163,0	372,0
20	Kalimantan Barat	29,0	103,0	52,0	23,0	1.229,0	1.436,0
21	Kalimantan Tengah	49,0	74,0	56,0	22,0	60,0	261,0
22	Kalimantan Selatan	38,0	100,0	138,0	36,0	998,0	1.310,0
23	Kalimantan Timur	0,0	58,0	55,0	14,0	34,0	161,0
24	Sulawesi Utara	9,0	47,0	81,0	10,0	15,0	162,0
25	Sulawesi Tengah	17,0	78,0	115,0	22,0	920,0	1.152,0
26	Sulawesi Selatan	79,0	178,0	310,0	165,0	1.515,0	2.247,0
27	Sulawesi Tenggara	33,0	29,0	96,0	16,0	110,0	284,0
28	Gorontalo	14,0	42,0	56,0	24,0	8,0	144,0
29	Sulawesi Barat	14,0	28,0	69,0	30,0	116,0	257,0
30	Maluku	8,0	22,0	29,0	18,0	19,0	96,0
31	Maluku Utara	12,0	16,0	42,0	7,0	20,0	97,0
32	Papua	9,0	29,0	53,0	150,0	20,0	261,0
33	Papua Barat	14,0	5,0	45,0	11,0	19,0	94,0
Indonesia		1.198,0	3.895,0	4.365,0	2.131,0	18.343,0	29.932,0

Sumber data : Ditjen PSP (2011, 2012), Ditjen Tan. Pangan (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012),
Setjen (2006, 2009, 2010, 2011, 2012) dan Ditjen Perkebunan (2012)

Tabel 5.2
Table

Bantuan Alat dan Mesin Pertanian – Traktor Roda 4
Agricultural Tools and Machineries Grant – Farm Tractor
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun/ Year					Total	<i>Unit</i>
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	4	5	6	7	8		
1	Aceh	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	
2	Sumatera Utara	1,0	0,0	1,0	1,0	4,0	7,0	
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
4	Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
5	Jambi	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	
7	Bengkulu	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
8	Lampung	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Jawa Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
15	Jawa Timur	0,0	0,0	1,0	0,0	13,0	14,0	
16	Banten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
17	Bali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	Nusa Tenggara Timur	4,0	0,0	0,0	0,0	19,0	23,0	
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	3,0	
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0	
26	Sulawesi Selatan	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Gorontalo	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	
29	Sulawesi Barat	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	3,0	
30	Maluku	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
31	Maluku Utara	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	
32	Papua	0,0	0,0	0,0	35,0	1,0	36,0	
33	Papua Barat	1,0	0,0	0,0	3,0	1,0	5,0	
Indonesia		9,0	0,0	7,0	47,0	80,0	143,0	

Sumber data : Ditjen PSP (2011, 2012), Ditjen Tan. Pangan (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012),
Setjen (2006, 2009, 2010, 2011, 2012) dan Ditjen Perkebunan (2012)

Tabel 5.3
Table

Bantuan Alat dan Mesin Pertanian – Pompa Air
Agricultural Tools and Machineries Grant – Water Pump
2008 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun/ Year					Total	Unit
		2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	4	5	6	7	8		
1	Aceh	0,0	0,0	107,0	27,0	70,0	204,0	
2	Sumatera Utara	9,0	0,0	194,0	5,0	76,0	284,0	
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	60,0	5,0	123,0	188,0	
4	Riau	0,0	4,0	148,0	18,0	40,0	210,0	
5	Jambi	0,0	10,0	84,0	26,0	12,0	132,0	
6	Sumatera Selatan	26,0	0,0	133,0	22,0	156,0	337,0	
7	Bengkulu	0,0	0,0	51,0	6,0	26,0	83,0	
8	Lampung	0,0	6,0	120,0	24,0	149,0	299,0	
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	23,0	
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	48,0	
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	
12	Jawa Barat	0,0	7,0	318,0	63,0	191,0	579,0	
13	Jawa Tengah	28,0	18,0	489,0	93,0	409,0	1.037,0	
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	68,0	30,0	63,0	161,0	
15	Jawa Timur	9,0	10,0	483,0	66,0	120,0	688,0	
16	Banten	32,0	0,0	111,0	35,0	101,0	279,0	
17	Bali	0,0	0,0	129,0	4,0	28,0	161,0	
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	101,0	53,0	447,0	601,0	
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	0,0	108,0	40,0	87,0	235,0	
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	33,0	0,0	10,0	43,0	
21	Kalimantan Tengah	20,0	0,0	54,0	3,0	30,0	107,0	
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	133,0	24,0	19,0	176,0	
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	55,0	0,0	71,0	126,0	
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	82,0	12,0	7,0	101,0	
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	11,0	0,0	63,0	74,0	
26	Sulawesi Selatan	23,0	30,0	318,0	84,0	217,0	672,0	
27	Sulawesi Tenggara	0,0	10,0	85,0	10,0	73,0	178,0	
28	Gorontalo	0,0	0,0	49,0	8,0	4,0	61,0	
29	Sulawesi Barat	3,0	0,0	66,0	2,0	93,0	164,0	
30	Maluku	0,0	0,0	27,0	0,0	8,0	35,0	
31	Maluku Utara	0,0	0,0	30,0	0,0	6,0	36,0	
32	Papua	0,0	0,0	53,0	75,0	5,0	133,0	
33	Papua Barat	0,0	0,0	47,0	0,0	16,0	63,0	
Indonesia		150,0	95,0	3.818,0	735,0	2.722,0	7.520,0	

Sumber data : Ditjen PSP (2011, 2012), Ditjen Tan. Pangan (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012), Setjen (2006, 2009, 2010, 2011, 2012) dan Ditjen Perkebunan (2012)

Tabel 5.4
Table

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Mandiri
Agricultural Equipment And Machineries Services
2009 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun/ Year				Total	Unit
		2009	2010	2011	2012		
1	2	4	5	7	6	8	
1	Aceh	0,0	0,0	228,0	4,0	232,0	
2	Sumatera Utara	0,0	0,0	261,0	4,0	265,0	
3	Sumatera Barat	0,0	0,0	192,0	3,0	195,0	
4	Riau	0,0	0,0	217,0	1,0	218,0	
5	Jambi	0,0	0,0	404,0	2,0	406,0	
6	Sumatera Selatan	0,0	0,0	475,0	5,0	480,0	
7	Bengkulu	0,0	0,0	262,0	2,0	264,0	
8	Lampung	0,0	0,0	70,0	7,0	77,0	
9	Bangka Belitung	0,0	0,0	46,0	0,0	46,0	
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Jawa Barat	0,0	0,0	379,0	9,0	388,0	
13	Jawa Tengah	0,0	0,0	771,0	12,0	783,0	
14	DI. Yogyakarta	0,0	0,0	42,0	0,0	42,0	
15	Jawa Timur	0,0	0,0	507,0	13,0	520,0	
16	Banten	0,0	0,0	295,0	3,0	298,0	
17	Bali	0,0	0,0	304,0	3,0	307,0	
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	0,0	159,0	5,0	164,0	
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	0,0	69,0	2,0	71,0	
20	Kalimantan Barat	0,0	0,0	102,0	3,0	105,0	
21	Kalimantan Tengah	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	
22	Kalimantan Selatan	0,0	0,0	270,0	3,0	273,0	
23	Kalimantan Timur	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0	
24	Sulawesi Utara	0,0	0,0	31,0	1,0	32,0	
25	Sulawesi Tengah	0,0	0,0	98,0	3,0	101,0	
26	Sulawesi Selatan	0,0	0,0	389,0	8,0	397,0	
27	Sulawesi Tenggara	0,0	0,0	368,0	2,0	370,0	
28	Gorontalo	0,0	0,0	68,0	0,0	68,0	
29	Sulawesi Barat	0,0	0,0	73,0	1,0	74,0	
30	Maluku	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	
31	Maluku Utara	0,0	0,0	44,0	0,0	44,0	
32	Papua	0,0	0,0	45,0	2,0	47,0	
33	Papua Barat	0,0	0,0	6,0	2,0	8,0	
Indonesia		0,0	0,0	6.266,0	100,0	6.366,0	

Tabel 5.5
Table

Basis Data Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)
Agricultural Equipment And Machineries Services Data Base
2009 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun/ Year				Unit
		2009	2010	2011	2012	
1	2	4	5	6	7	
1	Aceh	331,0	173,0	212,0	212,0	
2	Sumatera Utara	378,0	444,0	444,0	444,0	
3	Sumatera Barat	707,0	1.486,0	1.486,0	1.486,0	
4	Riau	318,0	309,0	309,0	309,0	
5	Jambi	0,0	412,0	412,0	412,0	
6	Sumatera Selatan	630,0	733,0	733,0	733,0	
7	Bengkulu	356,0	364,0	364,0	364,0	
8	Lampung	99,0	618,0	618,0	618,0	
9	Bangka Belitung	50,0	62,0	62,0	62,0	
10	Kepulauan Riau	15,0	15,0	15,0	15,0	
11	DKI Jakarta	11,0	13,0	13,0	13,0	
12	Jawa Barat	775,0	203,0	376,0	376,0	
13	Jawa Tengah	2.191,0	2.081,0	2.081,0	2.081,0	
14	DI. Yogyakarta	29,0	33,0	41,0	41,0	
15	Jawa Timur	485,0	349,0	492,0	492,0	
16	Banten	620,0	66,0	245,0	245,0	
17	Bali	240,0	225,0	274,0	274,0	
18	Nusa Tenggara Barat	226,0	233,0	233,0	233,0	
19	Nusa Tenggara Timur	78,0	228,0	228,0	228,0	
20	Kalimantan Barat	740,0	675,0	675,0	675,0	
21	Kalimantan Tengah	152,0	146,0	146,0	146,0	
22	Kalimantan Selatan	0,0	728,0	728,0	728,0	
23	Kalimantan Timur	80,0	80,0	80,0	80,0	
24	Sulawesi Utara	37,0	37,0	37,0	37,0	
25	Sulawesi Tengah	191,0	178,0	178,0	178,0	
26	Sulawesi Selatan	471,0	465,0	465,0	465,0	
27	Sulawesi Tenggara	722,0	722,0	722,0	722,0	
28	Gorontalo	88,0	51,0	51,0	51,0	
29	Sulawesi Barat	102,0	102,0	102,0	102,0	
30	Maluku	16,0	8,0	8,0	8,0	
31	Maluku Utara	43,0	43,0	43,0	43,0	
32	Papua	50,0	59,0	59,0	59,0	
33	Papua Barat	15,0	15,0	15,0	15,0	
Indonesia		10.246,0	11.356,0	11.947,0	11.947,0	

Tabel 5.6
Table

Bantuan Alat dan Mesin Pertanian – Transplanter
Agricultural Tools and Machineries Grant – Transplanter
2009 – 2012

No	Propinsi / Province	Tahun/ Year				Total	<i>Unit</i>
		2009	2010	2011	2012		
1	2	4	5	6	7	8	
1	Aceh	0,0	1,0	5,0	0,0	6,0	
2	Sumatera Utara	0,0	1,0	9,0	0,0	10,0	
3	Sumatera Barat	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
4	Riau	0,0	1,0	13,0	0,0	14,0	
5	Jambi	0,0	1,0	4,0	0,0	5,0	
6	Sumatera Selatan	0,0	1,0	2,0	0,0	3,0	
7	Bengkulu	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
8	Lampung	0,0	1,0	5,0	0,0	6,0	
9	Bangka Belitung	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
10	Kepulauan Riau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	DKI Jakarta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Jawa Barat	0,0	1,0	18,0	0,0	19,0	
13	Jawa Tengah	0,0	1,0	29,0	0,0	30,0	
14	DI. Yogyakarta	0,0	1,0	4,0	0,0	5,0	
15	Jawa Timur	0,0	1,0	31,0	0,0	32,0	
16	Banten	0,0	1,0	4,0	0,0	5,0	
17	Bali	0,0	1,0	5,0	0,0	6,0	
18	Nusa Tenggara Barat	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
19	Nusa Tenggara Timur	0,0	1,0	4,0	0,0	5,0	
20	Kalimantan Barat	0,0	1,0	6,0	0,0	7,0	
21	Kalimantan Tengah	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
22	Kalimantan Selatan	0,0	1,0	12,0	0,0	13,0	
23	Kalimantan Timur	0,0	1,0	4,0	0,0	5,0	
24	Sulawesi Utara	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
25	Sulawesi Tengah	0,0	1,0	3,0	0,0	4,0	
26	Sulawesi Selatan	0,0	1,0	10,0	0,0	11,0	
27	Sulawesi Tenggara	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
28	Gorontalo	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
29	Sulawesi Barat	0,0	1,0	4,0	0,0	5,0	
30	Maluku	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
31	Maluku Utara	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
32	Papua	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
33	Papua Barat	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	
Indonesia		0,0	30,0	174,0	0,0	204,0	

Sumber data : Ditjen PSP (2011, 2012), Ditjen Tan. Pangan (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012), Setjen (2006, 2009, 2010, 2011, 2012) dan Ditjen Perkebunan (2012)



DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Deconcentration and Co-Administration

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana pertanian bersama dengan dinas lingkup pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten secara berkesinambungan merencanakan dan memonitor pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana yang dilaksanakan di daerah.

Dalam konteks anggaran, hubungan antara pusat dan daerah diamanatkan oleh UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan definisi dan cakupan kewenangan pendanaan di daerah, diantaranya dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah, dan Tugas Pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan serta mempertanggungjawabkan

In relation with the execution of its duties and functions, the Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities along with departments of agriculture in the scope of the provincial and district levels plan and monitor the sustainable implementation of infrastructure and facilities implemented in the area .

In budget terms, the relationship between central and regions is mandated by Act No. 33 of 2004 concerning Fiscal Balance between Central and Regional Government .

Revenue Sharing between the Government and the Regional Governments means a fair, proportional, democratic, transparent and efficient sharing of revenues in the financing of Decentralization Deconcentration and Co-administration, regarding to the potential, condition and need of the regions, also funding amount in the management of Deconcentration and Co-Administration.

In the Act, it was outlined the definition and scope of local authority funding, including deconcentration and co-administration. Deconcentration shall be the authority assigned by the Government to governor as the Government's representative and/or to any vertical Agency in certain regions, and co-administration shall be any assignment from the Government to any region and/or village, from provincial government to regency or city and/or village and from regency or city government to village for implementing

pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

certain duties with the obligation to report and account for its implementation to the assigning party.

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Deconcentration Fund shall be any fund coming from APBN implemented by governor as the Government representative, including all revenues and expenditures in order to implement Deconcentration, excluding any fund allocated for central vertical agency in such region

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Co-Administration Fund shall be any fund coming from APBN implemented by region and village, including all revenues and expenditures in order to implement co-administration duties.

Lebih jauh, UU tersebut dijabarkan dalam PP No 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Furthermore, the Act set out in Regulation No. 7 of 2008 on Deconcentration and Co-administration.

Di tahun 2013, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi sebesar Rp94,783 Miliar untuk Dana Dekonsentrasi dan Rp2.539 Miliar untuk Dana Tugas Pembantuan.

In 2013, Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities got Rp94, 783 billion allocation for Deconcentration and Rp2.539 Billion for co-administration Funds.

Perkembangan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008 - 2013) disajikan dalam Gambar 6.1.

Deconcentration development and co-administration funds Infrastructure Directorate General of Agriculture in the last five years (2008 - 2013) is presented in Figure 6.1.

Lebih detail mengenai data dekonsentrasi dan tugas pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan

More details about the deconcentration and co administration fund of Directorate General of Agricultural

Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2013 disajikan dalam Tabel 6.1 dan atabel 6.2. Sementara untuk perkembangan anggaran dari tahun 2008 hingga 2013 disajikan dalam Gambar 6.1.

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan di 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat penurunan anggaran dekonsentrasi di 2013 adalah sebesar 40,11% dan untuk tugas pembantuan sebesar 3,32%.

Sementara, karena adanya penghematan anggaran di tahun 2013, ada beberapa sector anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang harus dihemat, termasuk di dalamnya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Secara persentase, penghematan anggaran untuk kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak terlalu signifikan. Besarnya pengurangan tersebut hanya berkisar diantara 1%, dimana penghematan untuk dana dekonsentrasi adalah sebesar 0,63% dan untuk dana tugas pembantuan adalah sebesar 1,17%.

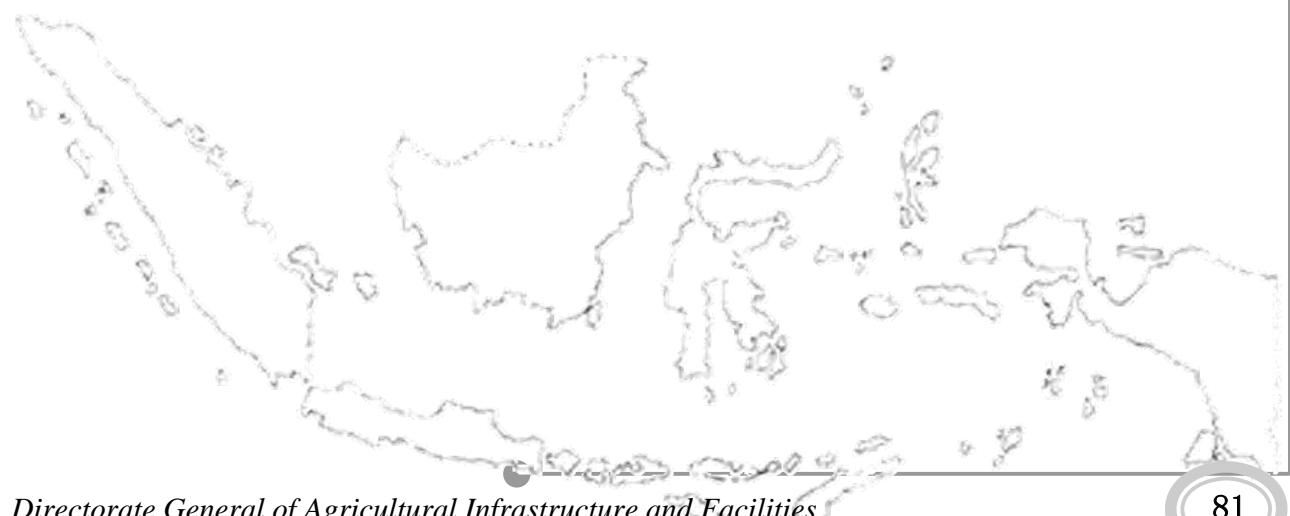
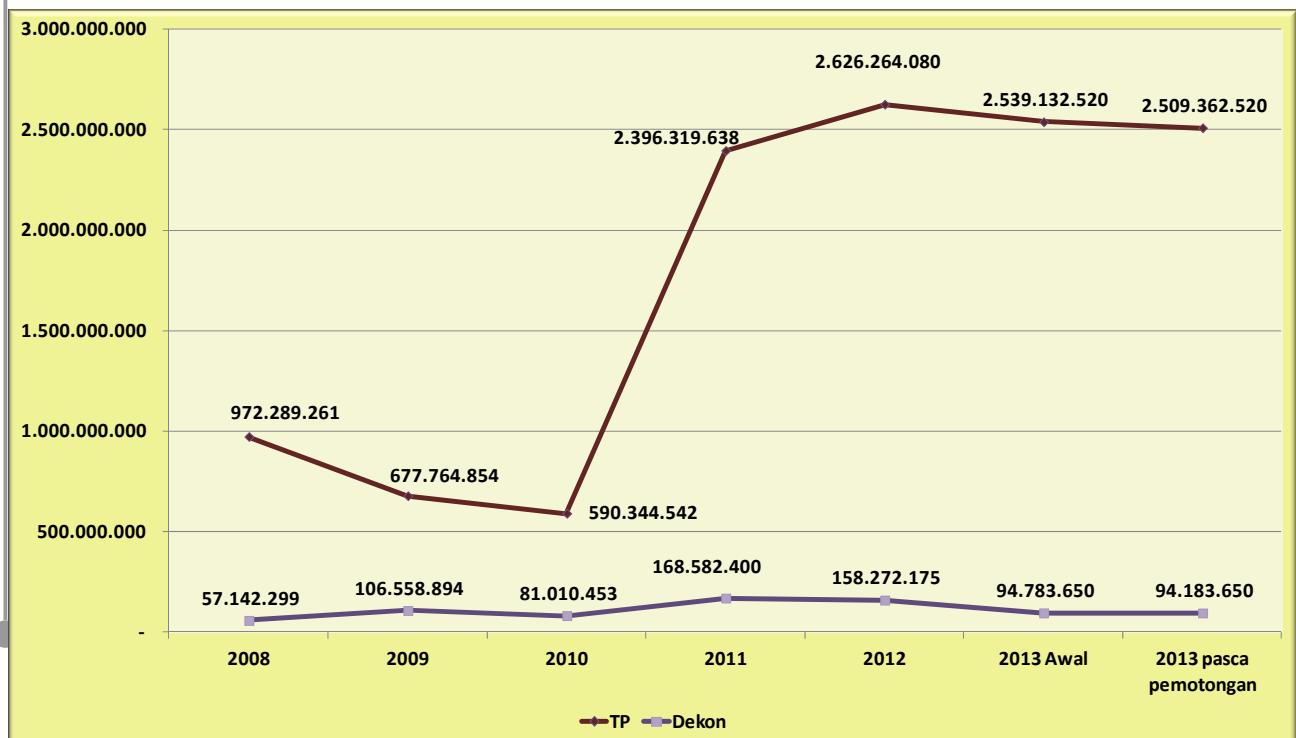
Infrastructure and facilities for Fiscal Year 2008 through 2013 are presented in Table 6.1 and Table 6.2. While for time series graph of the budgets for 2008 until 2013 is displayed in Figure 6.1.

It is displayed in the graph that the deconcentration and co-administration funds in 2013 decreased compared to the previous year. Deconcentration notable reduction in 2013 budget amounted up to 40,11% and for the co-administration is up to 3,32%.

Meanwhile, in spite of the budget saving in 2013, there are several sectors in the financial budgeting sheets of Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facility should be reduced, including deconcentration and co-administration fund in some regions.

In percentage, budget saving for deconcentration and co-administration authority is not significant. The value of its reduction was just around 1%, which the value of deconcentration fund was decreased by 0,63% and for co-administration fund was decreased by 1,17%.

Gambar 6.1 Grafik Alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2008—2012
Figure 61 Graph of Dekoncentration and co-administration fund allocation by 2008—2012



Tabel 6,1
Table

Alokasi Dana Dekonsentrasi Ditjen PLA / PSP
Deconcentration Fund Alocation of PLA/PSP

TA. 2008 s/d 2013

(X 1000)

No.	Propinsi / Province	Tahun / Year		
		2008	2009	2010
1	Aceh	1.343.190	57.718.609	39.506.007
2	Sumatera Utara	2.422.581	2.000.000	1.600.000
3	Sumatera Barat	1.747.250	1.500.000	1.200.000
4	Riau	1.150.000	1.200.000	1.100.000
5	Jambi	1.150.000	1.350.000	1.300.000
6	Sumatera Selatan	2.097.250	2.100.000	1.750.000
7	Bengkulu	1.400.000	1.150.000	1.150.000
8	Lampung	1.931.620	1.903.840	1.548.410
9	Bangka Belitung	850.000	250.000	250.000
10	Kepulauan Riau	1.450.000	250.000	300.000
11	DKI Jakarta	800.000	600.000	300.000
12	Jawa Barat	2.450.050	2.623.900	2.402.991
13	Jawa Tengah	2.684.965	2.774.000	2.526.985
14	DI. Yogyakarta	697.250	1.050.000	650.000
15	Jawa Timur	2.632.935	2.533.500	2.072.690
16	Banten	550.000	1.032.050	824.610
17	Bali	1.400.000	1.500.000	1.350.000
18	Nusa Tenggara Barat	2.383.284	1.842.000	1.800.150
19	Nusa Tenggara Timur	2.497.250	2.300.000	1.400.000
20	Kalimantan Barat	2.000.000	1.800.000	1.600.000
21	Kalimantan Tengah	2.850.000	1.700.000	1.550.000
22	Kalimantan Selatan	2.000.000	1.700.000	1.500.000
23	Kalimantan Timur	1.650.000	1.800.000	1.650.000
24	Sulawesi Utara	1.300.000	1.350.000	1.200.000
25	Sulawesi Tengah	1.294.670	1.450.000	1.150.000
26	Sulawesi Selatan	2.879.039	2.169.000	1.778.610
27	Sulawesi Tenggara	1.250.000	1.300.000	1.150.000
28	Gorontalo	727.665	1.300.000	1.000.000
29	Sulawesi Barat	4.853.300	1.261.995	900.000
30	Maluku	850.000	800.000	700.000
31	Maluku Utara	1.400.000	850.000	700.000
32	Papua	2.250.000	2.000.000	2.000.000
33	Papua Barat	200.000	1.400.000	1.100.000
T O T A L		57.142.299	106.558.894	81.010.453

Tabel 6.1
*Table*Lanjutan
Continued

(X 1000)

No.	Propinsi / Province	Tahun / Year			
		2011	2012	2013 Awal	2013 pasca pemotongan
1	Aceh	102.608.374	30.264.764	3.497.690	3.497.690
2	Sumatera Utara	2.751.150	4.673.675	3.595.110	3.595.110
3	Sumatera Barat	2.406.950	13.676.860	2.955.340	2.955.340
4	Riau	2.131.400	4.812.585	2.360.000	2.360.000
5	Jambi	2.381.500	3.862.135	3.035.450	3.035.450
6	Sumatera Selatan	2.766.000	5.844.785	4.592.650	4.492.650
7	Bengkulu	2.000.000	2.885.915	2.087.000	2.087.000
8	Lampung	2.459.150	3.908.315	3.626.890	3.626.890
9	Bangka Belitung	1.081.000	2.100.245	1.582.000	1.582.000
10	Kepulauan Riau	914.700	1.107.245	830.000	830.000
11	DKI Jakarta	900.000	0	0	0
12	Jawa Barat	2.555.946	3.506.655	4.705.640	4.605.640
13	Jawa Tengah	2.474.900	4.209.685	5.361.890	5.261.890
14	DI. Yogyakarta	1.210.000	1.733.815	1.437.450	1.437.450
15	Jawa Timur	2.683.900	3.691.845	5.472.650	5.372.650
16	Banten	1.482.100	1.831.025	1.787.620	1.687.620
17	Bali	2.362.400	3.032.720	2.027.450	2.027.450
18	Nusa Tenggara Barat	2.100.000	4.225.535	4.235.170	4.135.170
19	Nusa Tenggara Timur	1.650.000	3.969.630	3.064.000	3.064.000
20	Kalimantan Barat	2.444.730	5.781.720	5.052.450	5.052.450
21	Kalimantan Tengah	2.455.400	4.064.845	3.931.000	3.931.000
22	Kalimantan Selatan	2.481.090	4.776.620	2.775.010	2.775.010
23	Kalimantan Timur	2.450.560	6.624.786	2.700.000	2.700.000
24	Sulawesi Utara	1.800.000	2.635.880	1.770.000	1.770.000
25	Sulawesi Tengah	2.200.000	4.333.085	3.195.000	3.195.000
26	Sulawesi Selatan	2.503.900	6.361.695	4.741.740	4.741.740
27	Sulawesi Tenggara	1.900.000	4.504.180	2.317.950	2.317.950
28	Gorontalo	1.550.000	2.523.840	1.735.000	1.735.000
29	Sulawesi Barat	1.450.000	4.438.180	1.425.000	1.425.000
30	Maluku	1.569.500	2.861.850	2.300.000	2.300.000
31	Maluku Utara	1.522.900	2.573.010	1.693.500	1.693.500
32	Papua	3.229.000	4.855.100	3.013.000	3.013.000
33	Papua Barat	2.105.850	2.599.950	1.880.000	1.880.000
T O T A L		168.582.400	158.272.175	94.783.650	94.183.650

Tabel 6.2**Table**

Alokasi Dana Tugas Pembantuan Ditjen PLA / PSP
Co-Administration Fund Alocation of PLA/PSP
TA. 2008 S/D 2013

(X 1000)

No.	Propinsi / Province	Tahun / Year		
		2008	2009	2010
1	Aceh	14.623.000	24.360.000	25.407.800
2	Sumatera Utara	40.575.818	30.033.600	30.130.000
3	Sumatera Barat	27.125.500	25.099.710	22.152.500
4	Riau	21.096.000	11.427.300	18.561.500
5	Jambi	17.173.000	19.398.000	14.955.500
6	Sumatera Selatan	54.016.552	21.839.000	18.770.500
7	Bengkulu	24.142.500	18.372.000	18.488.500
8	Lampung	16.124.102	18.216.090	17.872.610
9	Bangka Belitung	10.053.000	4.422.000	4.160.000
10	Kepulauan Riau	15.015.500	2.095.000	1.361.500
11	DKI Jakarta	0	0	0
12	Jawa Barat	58.650.664	40.769.050	57.894.137
13	Jawa Tengah	61.003.650	53.957.527	43.979.030
14	DI. Yogyakarta	7.154.000	7.062.090	4.655.000
15	Jawa Timur	59.304.226	47.262.817	41.455.950
16	Banten	22.682.100	8.349.300	5.721.860
17	Bali	19.188.500	24.659.500	11.304.000
18	Nusa Tenggara Barat	37.646.994	17.461.995	22.078.945
19	Nusa Tenggara Timur	29.181.853	28.235.500	21.760.500
20	Kalimantan Barat	29.241.500	17.988.500	16.592.000
21	Kalimantan Tengah	23.196.500	16.748.500	19.165.000
22	Kalimantan Selatan	32.437.500	26.826.600	18.647.000
23	Kalimantan Timur	31.449.700	24.487.500	19.150.000
24	Sulawesi Utara	22.381.000	16.738.500	11.207.500
25	Sulawesi Tengah	33.275.549	19.614.000	18.519.000
26	Sulawesi Selatan	69.970.226	49.185.750	31.421.710
27	Sulawesi Tenggara	42.629.500	19.723.800	20.454.500
28	Gorontalo	12.657.000	8.836.000	8.180.000
29	Sulawesi Barat	55.150.525	23.029.725	7.305.000
30	Maluku	18.838.200	8.490.000	6.148.000
31	Maluku Utara	12.480.102	9.975.000	2.415.000
32	Papua	51.725.000	19.991.000	22.579.500
33	Papua Barat	2.100.000	13.109.500	7.850.500
T O T A L		972.289.261	677.764.854	590.344.542

Tabel 6.2**Table****Lanjutan****Continued**

(X 1000)

No.	Propinsi / Province	Tahun / Year			
		2011	2012	2013 Awal	2013 pasca pemotongan
1	Aceh	120.152.250	140.623.300	107.742.860	107.742.860
2	Sumatera Utara	110.042.000	89.122.200	111.422.800	111.422.800
3	Sumatera Barat	91.582.800	59.060.900	85.583.560	85.583.560
4	Riau	58.124.500	88.811.400	47.615.000	47.615.000
5	Jambi	63.892.250	57.792.300	67.813.000	67.813.000
6	Sumatera Selatan	98.064.500	132.101.200	106.471.200	106.471.200
7	Bengkulu	74.216.000	60.540.700	34.647.000	34.647.000
8	Lampung	78.773.910	76.803.800	113.325.360	93.325.360
9	Bangka Belitung	23.752.750	33.843.300	34.173.000	34.173.000
10	Kepulauan Riau	8.592.000	2.864.700	4.541.000	4.541.000
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	103.968.028	170.012.200	210.624.340	210.624.340
13	Jawa Tengah	154.580.850	193.039.500	226.659.800	226.659.800
14	DI. Yogyakarta	32.331.250	19.539.780	15.483.000	15.483.000
15	Jawa Timur	155.822.350	201.840.000	204.959.080	204.959.080
16	Banten	18.734.350	18.977.500	19.647.300	19.647.300
17	Bali	40.495.850	30.925.000	41.846.000	41.846.000
18	Nusa Tenggara Barat	68.069.500	86.507.600	119.596.600	119.596.600
19	Nusa Tenggara Timur	90.635.000	104.833.000	80.924.200	80.924.200
20	Kalimantan Barat	74.562.500	105.510.700	139.322.000	139.322.000
21	Kalimantan Tengah	64.627.250	92.501.800	85.522.000	85.522.000
22	Kalimantan Selatan	58.452.750	85.847.700	67.973.580	65.723.580
23	Kalimantan Timur	69.725.750	88.956.500	46.921.000	46.921.000
24	Sulawesi Utara	46.648.750	23.221.600	32.766.000	32.766.000
25	Sulawesi Tengah	65.957.500	66.912.700	80.773.000	80.773.000
26	Sulawesi Selatan	136.561.700	196.401.200	216.543.840	209.023.840
27	Sulawesi Tenggara	115.243.750	86.733.900	59.944.000	59.944.000
28	Gorontalo	35.939.550	26.729.000	22.981.000	22.981.000
29	Sulawesi Barat	32.074.000	68.503.700	18.902.000	18.902.000
30	Maluku	57.061.250	45.303.400	41.828.000	41.828.000
31	Maluku Utara	38.354.500	48.087.400	18.685.000	18.685.000
32	Papua	173.864.500	85.398.400	46.508.000	46.508.000
33	Papua Barat	35.415.750	38.917.700	27.388.000	27.388.000
T O T A L		2.396.319.638	2.626.264.080	2.539.132.520	2.509.362.520



BASIS DATA LAHAN SAWAH

Rice Field Data Base

Di era teknologi informasi saat ini, ketersediaan data lahan pertanian menjadi sangat penting untuk mendukung sistem informasi kebijakan penggunaan lahan dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, demi mencapai salah satu dari empat sukses Kementerian Pertanian, yaitu swasembada berkelanjutan dan pencapaian swasembada, dimana tujuan besarnya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Republik Indonesia. Akan tetapi dengan makin tergerusnya lahan pertanian menjadi penyebab kendala produksi pangan strategis nasional, padahal implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang disahkan tahun 2009 membutuhkan penentuan dan pemetaan yang jelas kondisi riil pertanian.

Mengakomodasi kebutuhan ini, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melaksanakan audit lahan untuk menyediakan informasi ketersediaan lahan hingga informasi tersebut dapat diakses dalam lingkup wilayah administrasi kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat, dimana informasi itu tercakup di dalam basis data potensi sumber daya lahan pertanian dengan menggunakan citra satelit beresolusi tinggi.

Basis data lahan sawah yang dibangun oleh Ditjen PSP ini disusun berdasarkan informasi luas dan jenis lahan sawah yang disajikan secara tabular, dilengkapi dengan informasi intensitas pertanaman, produktivitas, dan kondisi jaringan irigasi. Informasi

In these information technology era, the existance of agriculture land data becomes crucial to support policy information system in land usage and sustainable agriculture land protection, to achieve one of four Agriculture Ministry Success Aims, it is the sustainable self support on food and self support acheiving, where the grand goal is to achieve food security in Republic of Indonesia. However, with the increasing reduction of agricultural land causing national strategic food production constraints, whereas the implementation of the Act Sustainable Agricultural Land Protection adopted in 2009 requires determination and a clear mapping of the real condition of the agriculture farm.

Accommodating this need, Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facility performed land audit to provide information on the availability of land, which the information can be accessed within the scope of administration in district, regency, province and central government, where the information was included in the database of agricultural land resource potential by using high resolution satellite images.

Wetland database built by the Directorate General of PSP has been compiled based on extensive information and the type of wetland, which was presented in tabular, equipped with cropping intensity information, productivity, and irrigation

tabular tersebut terintegrasi secara spasial dengan peta digital yang dapat disesuaikan dengan perkembangan data dan kenyataan yang terus berkembang di lapangan, sehingga dapat dijadikan acuan petugas lapangan dalam menginput/mengupdate informasi data hasil monitoring di lapangan.

Selanjutnya, peta hasil audit lahan berupa peta lahan sawah yang memanfaatkan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat dimanfaatkan oleh para petugas di lapangan (mantri tani/KCD) untuk melakukan update atau memvalidasi luas sawah di wilayah masing-masing melalui pemanfaatan alat ukur digital (GPS) dipadukan dengan program Indonesia Agriculture. Selain itu penggunaan GPS tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengukur luas tanam, luas panen dan serangan OPT yang diperlukan untuk membuat laporan bulanan. Dengan metoda ini maka informasi luasan sawah akan dengan mudah di update dari tahun ke tahun, sehingga perhitungan produksi dapat lebih akurat (mendekati nilai yang sebenarnya).

Disamping itu Peta Hasil Audit Lahan Pertanian tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dalam kebijakan satu peta (One Map Policy) untuk referensi tunggal dalam informasi geospasial sehingga dengan mudah dimanfaatkan masyarakat secara luas dan juga sebagai bahan dalam merencanakan tata ruang untuk

conditions. Those tabular informations were integrated spacially with the digital map corresponded to the data development and reality that was founded changing everytime, so it can be used as benchmark for the field officers in entering/updating data and information as field monitoring results.

Furthermore, the land audit map is a map of wetland utilizing remote sensing technologies and the application of Geographic Information Systems (GIS), which can be used by field officers (mantri peasants / KCD) to update or validate the rice area in each region respectively through the use of digital measuring instruments (GPS) combined with Indonesian Agriculture program. Besides, the use of the GPS can be utilized to measure acreage, harvested area and pest attacks required to make monthly reports. With this method, the area of paddy field information will be easily updated from year to year, so the calculation of production could be more accurate (approaching the actual amount).

Besides, Agricultural Land Audit Map can be used as a part of One Map Policy to become a single reference in the geospatial information, so that can be easily exploited in society and also as a material in spatial planning for maintaining sustainable agricultural land in preventing land conversion. One Map Policy can be used to solve

mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan dalam mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Dengan adanya One Map Policy dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan kepemilikan peta sektoral sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing – masing instansi, sehingga dapat menimbulkan masalah antara pemerintah dengan pengusaha, pemerintah dengan masyarakat, pengusaha dengan masyarakat, bahkan antar sesama instansi pemerintah yang pada akhirnya banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan, yang berpotensi memicu konflik sosial.

Data luasan sawah yang disajikan dalam buku ini merupakan hasil audit lahan yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Hasil audit lahan ini hanya mencakup luasan sawah di Pulau Jawa.

Sementara untuk data luasan sawah di luar Pulau Jawa merupakan hasil audit lahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di tahun 2011 dan diperbaharui di tahun 2012.

Perbandingan luasan sawah terhadap pulau disajikan dalam Gambar 7.1. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa sawah terluas masih berada di Pulau Jawa dengan persentase luasan 44%, diikuti dengan Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.. Sementara untuk daerah Maluku dan Papua,

the problems of institutional maps based on the sectoral needs and interests of each agency, so it can cause problems between the government and employers, the government and the public, employers and the community, even among fellow government agencies that ultimately a lot of overlap ownership and control of land, which could potentially lead to social conflict.

The Land Area Data published in this book is a result of land audit held by Data and Information Center of Secretariate General of Ministry of Agriculture in 2010. The result of this land audit was only covering the field area of Java island.

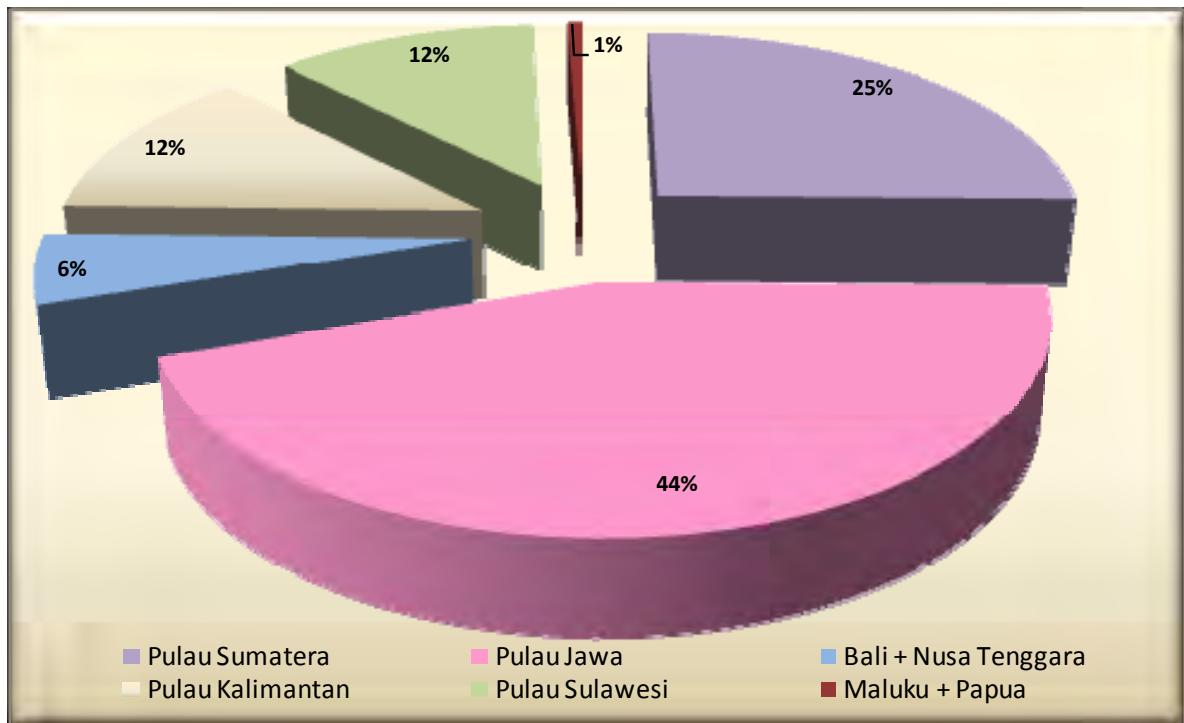
Meanwhile, for rice field area data outside Java island were a result of land audit which was held by Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities in 2011 and was updated in 2012.

The rice fields area comparison among Indonesian big islands graph is presented in Graph. 7.1. From the graph we could see that the widest rice field is still belong to Jawa land area with 44% of total rice field area in Indonesia, followed by Sumatera, Sulawesi, and Kalimantan. While for

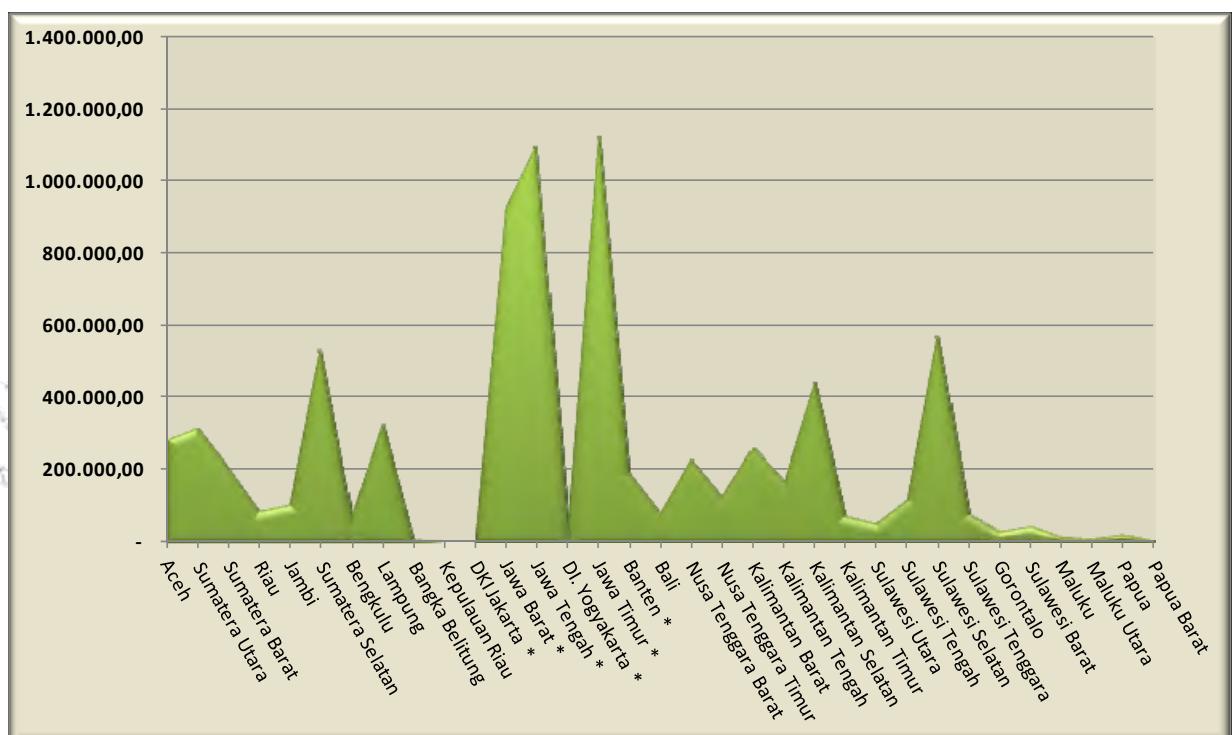
luasan sawahnya masih sangat kecil.

Maluku and Papua, the land rice field area is quite narrow.

Gambar 7.1 Grafik Persentase Luasan Sawah Berdasarkan Audit Lahan di setiap pulau besar di Indonesia
Figure 7.1 Graph of Percentage of Rice Field Area based on Land Audit by each Big Island in Indonesia



Gambar 7.2 Grafik Luasan Sawah Berdasarkan Audit Lahan di setiap propinsi di Indonesia
Figure 7.2 Graph of Rice Field Area based on Land Audit by each Province in Indonesia



Tabel 7.1*Table*

**Luas Lahan Sawah Menurut Provinsi di Indonesia
Berdasarkan Audit Lahan Pertanian Ditjen PSP Tahun 2012**
Rice Field Area by Province in Indonesia
Based on Agricultural Land Audit by Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities

(Ha)

No.	Propinsi/ Province	Luas Sawah/ Rice Field Area	Estimasi SDKH/ Estimated SDKH	Total
1	2	3	4	5
1	Aceh	281.743,58	15.592,78	297.336,36
2	Sumatera Utara	314.445,26	108.745,77	423.191,03
3	Sumatera Barat	206.449,71	22.918,51	229.368,22
4	Riau	86.118,68	24.047,71	110.166,39
5	Jambi	104.178,67	7.995,46	112.174,13
6	Sumatera Selatan	543.013,19	74.903,03	617.916,21
7	Bengkulu	79.331,11	2.785,36	82.116,48
8	Lampung	330.822,75	11.955,30	342.778,05
9	Bangka Belitung	8.345,00	219,49	8.564,49
10	Kepulauan Riau	1.010,08	210,30	1.220,39
	Sumatera	1.955.458,02	269.373,72	2.224.831,74
11	DKI Jakarta *	1.103,17	0,00	1.103,17
12	Jawa Barat *	925.565,00	0,00	925.565,00
13	Jawa Tengah *	1.101.851,06	0,00	1.101.851,06
14	DI. Yogyakarta *	71.868,41	0,00	71.868,41
15	Jawa Timur *	1.152.875,71	0,00	1.152.875,71
16	Banten *	191.020,00	0,00	191.020,00
	Jawa	3.444.283,35	0,00	3.444.283,35
17	Bali	80.466,56	0,00	80.466,56
18	Nusa Tenggara Barat	230.116,42	5.917,42	236.033,84
19	Nusa Tenggara Timur	127.451,39	18.734,41	146.185,80
	Bali dan Nusa Tenggara	438.034,36	24.651,84	462.686,20

*Berdasarkan Audit Lahan Pusdatin Tahun 2010 dan dipaduusersikan dengan BPN di 2011

Based on land audit held by Data and Information Center in 2010 and synchronized with BPN Data in 2011

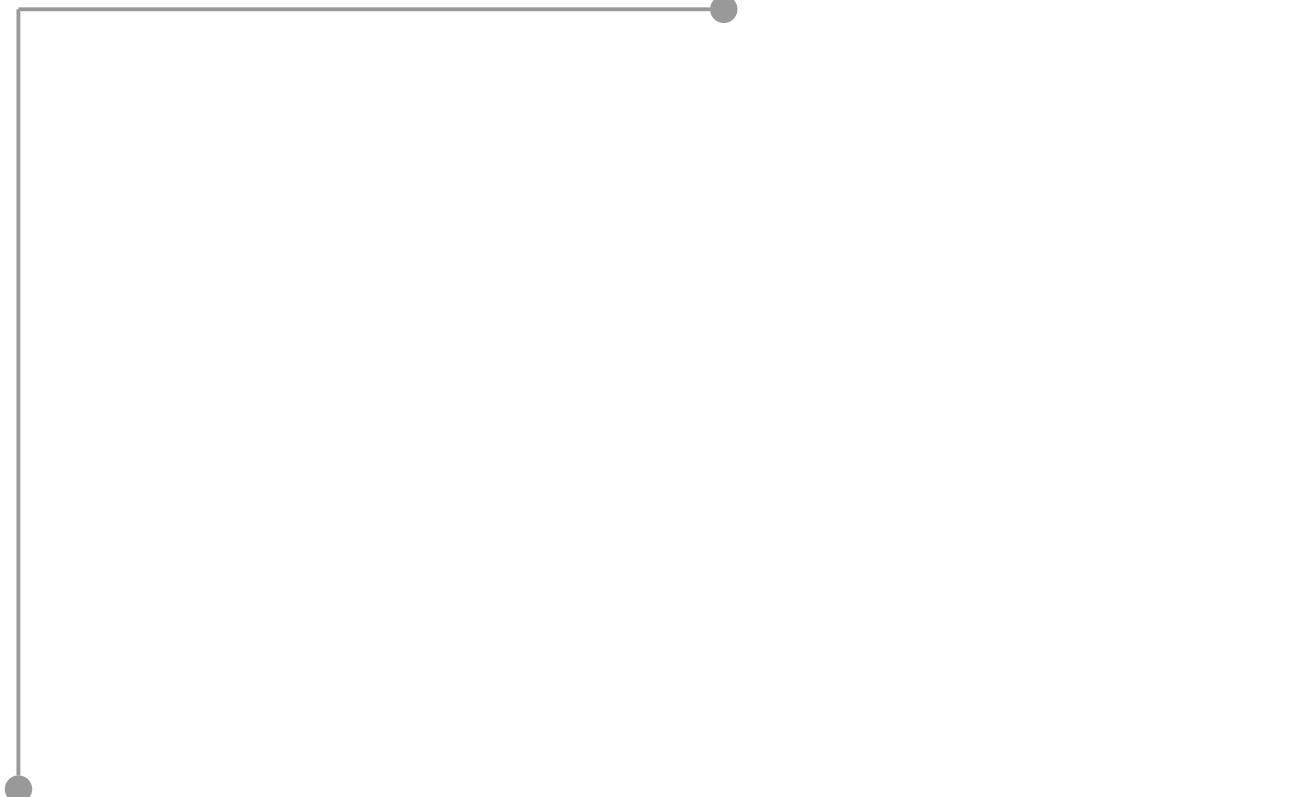
Tabel 7.1

Table

Lanjutan*Continued*

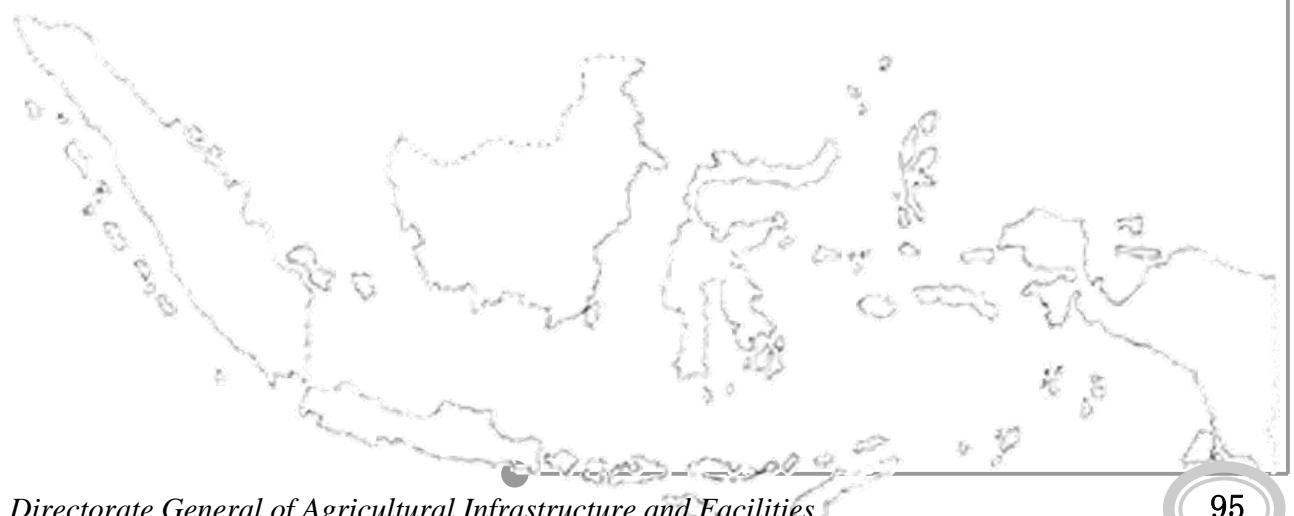
(Ha)

No.	Propinsi/ Province	Luas Sawah/ Rice Field Area	Estimasi SDKH/ Estimated SDKH	Total
1	2	3	4	5
20	Kalimantan Barat	260.657,05	45.038,82	305.695,87
21	Kalimantan Tengah	169.190,00	18.889,00	188.079,00
22	Kalimantan Selatan	448.376,21	4.667,51	453.043,72
23	Kalimantan Timur	72.662,00	12.636,00	85.298,00
	Kalimantan	950.885,26	81.231,33	1.032.116,59
24	Sulawesi Utara	52.236,25	0,00	52.236,25
25	Sulawesi Tengah	117.710,43	1.992,14	119.702,57
26	Sulawesi Selatan	583.825,24	2.305,79	586.131,03
27	Sulawesi Tenggara	77.757,43	5.512,45	83.269,88
28	Gorontalo	29.088,37	0,00	29.088,37
29	Sulawesi Barat	44.512,07	5.023,02	49.535,09
	Sulawesi	905.129,79	14.833,40	919.963,19
30	Maluku	13.739,03	0,00	13.739,03
31	Maluku Utara	9.043,25	0,00	9.043,25
32	Papua	20.432,97	1.030,20	21.463,17
33	Papua Barat	4.220,14	0,00	4.220,14
	Maluku dan Papua	47.435,39	1.030,20	48.465,59
T O T A L		11.675.551,47	588.051,11	12.263.602,58



DAFTAR ISTILAH

Prasarana dan Sarana Pertanian



Daftar Istilah

Sawah

Lahan usahatani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija / tanaman pangan lainnya

Sawah Irigasi

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi baik irigasi teknis, irigasi setengah teknis, maupun irigasi desa.

Sawah Irigasi Teknis

Sawah yang memperoleh pengairan dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Jaringan seperti ini biasanya terdiri dari saluran induk, sekunder dan tersier. Saluran induk, sekunder serta bangunannya dibangun, dikuasai dan dipelihara oleh Pemerintah

Sawah Irigasi Setengah Teknis

Sawah berpengairan teknis akan tetapi pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan jaringan selanjutnya tidak diukur dan dikuasai pemerintah.

Sawah Irigasi Sederhana

Sawah yang memperoleh pengairan dimana cara pembagian dan pembuangan airnya belum teratur, walaupun pemerintah sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya membuat bendungannya).

Sawah Tadah Hujan

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan

Sawah Sistem Surjan

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi atau air reklamasi rawa pasang surut dan bukan pasang surut (lebak) dengan sistem tanam padi dan palawija / hortikultura yang ditanam pada tabukan dan guludan.

Sawah Pasang Surut

Sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.

Sawah Reklamasi Rawa Pasang Surut

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari reklamasi rawa pasang surut.

Sawah Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut (Lebak)

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari reklamasi rawa bukan pasang surut (lebak).

Sawah Lainnya

Seperti lahan sawah lebak, polder, dan rawa-rawa yang ditanami padi atau rembesan dan lain-lain.

Tegalan/Tanah Darat Ringan

Sebidang tanah yang diusahakan/dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering antara lain padi gogo dan palawija.

Semak/Alang-alang

Semak/alang-alang merupakan tanah yang tertutup oleh tumbuhan semak belukar dan rumput alang-alang.

Lahan untuk Bangunan dan Halaman Sekitarnya

Lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar Atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila lahan sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal, dimasukkan kedalam lahan kebun/tegal.

Tejal/kebun/ladang/huma

Lahan kering yang ditanami tanaman musiman seperti padi ladang, palawija/ hortikultura dan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah.

Lahan Pertanian Sementara Tidak Diolah

Lahan pertanian sementara tidak diolah disebabkan oleh faktor pembatas daya dukung lahan dan kelengkapan/kondisi infrastruktur pertanian, sehingga kondisinya ditumbuhkan alang-alang dan semak belukar

Lahan Kritis

Lahan yang sudah tidak produktif lagi kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk diolah sebagai lahan pertanian, kecuali bila ada upaya rehabilitasi terlebih dahulu.

Lahan Potensial Kritis

Lahan yang masih produktif bila diolah untuk pertanian tanaman pangan. Namun demikian bila pengelolaan lahan yang diterapkan tidak didasarkan pada kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, maka lahan akan rusak dan cenderung

menjadi lahan semi kritis atau bahkan lahan kritis

Optimasi Lahan

Usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam dan atau indeks pertanaman (IP). Pelaksanaan fisik meliputi pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan lahan, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.

Konservasi Lahan

Usaha pemanfaatan lahan dalam usahatani dengan memperhatikan kelas kemampuannya dan dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah agar lahan dapat digunakan secara lestari.

Reklamasi Lahan

Suatu upaya pemanfaatan perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan pertanian kurang produktif baik yang rusak secara alami maupun pengaruh manusia melalui penerapan teknologi dan pemberdayaan masyarakat.

System Rice Intensification (SRI)

Usaha tani padi Sawah organik metode SRI usaha tani padi Sawah irrigasi secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, tanaman dan air melalui pemberdayaan kelompok dan kearifan lokal serta berbasis pada kaidah ramah lingkungan.

Rumah Kompos

Bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik/kompos dan dilengkapi dengan alat pengolah pupuk organik, kendaraan roda tiga dan dekomposer.

Unit Pengolah Pupuk Organik (APPO)

Upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan unit pengolah pupuk organik, terdiri dari bangunan rumahkompos, bak fermentasi, Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), kendaraan roda 3,bangunan kandang ternak, dan ternaksapi/kerbau.

Jalan Koleksi

Jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil menuju ke jalan produksi

Jalan Produksi

Merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar.

Jalan Usaha Tani (JUT)

Prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara.

Jalan Setapak

Suatu jalan yang berada diantara pohon karet dalam suatu blok tertentu, yang digunakan oleh pekebun untuk membawa lateks ke tempat pengumpulan. Jalan ini dibuat sejajar dengan jalan produksi.

Perluasan areal Kebun Hijauan Makan Ternak (HMT)

Pembuatan kebun hijauan makanan ternak dalam rangka memperluas areal kebun hijauan makanan ternak guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Perluasan Areal Padang Penggembalaan

Upaya memperluas padang penggembalaan guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Perluasan Areal Hortikultura

Usaha penambahan baku lahan hortikultura yang pada prinsipnya dapat memperkuat suatu kawasan hortikultura yang berwawasan agribisnis yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan sehingga pada gilirannya akan terwujud sentra-sentra pengembangan agribisnis hortikultura yang berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

Perluasan Areal Hortikultura

Usaha penambahan baku lahan hortikultura yang pada prinsipnya dapat memperkuat suatu kawasan hortikultura yang berwawasan agribisnis yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan sehingga pada gilirannya akan terwujud sentra-sentra pengembangan agribisnis hortikultura yang berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang

oleh infrastruktur yang memadai.

Perluasan Areal Perkebunan

Kegiatan penambahan baku lahan berdasarkan kesesuaian teknis, sosial, ekonomis dan lingkungan dengan menerapkan budidaya pertanian sehingga areal perkebunan menjadi bertambah luasannya.

Perluasan Sawah

Usaha penambahan baku lahan Sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum diusahakan dan atau lahan terlantar untuk pertanian dengan sistem Sawah baik Sawah irigasi, pasang surut maupun Sawah tada hujan.

Air

Semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.

Sumber air

Tempat / wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, aquifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanent).

Sumberdaya air

Air dan daya air yang terkandung didalamnya.

Daya air

Potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

Pengusahaan Sumberdaya Air

Upaya pemanfaatan sumberdaya air untuk tujuan komersial

Penyediaan Sumberdaya air

Upaya memenuhi kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

Konservasi Sumberdaya Air

Upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada masa mendatang.

Efisiensi Pemakaian Air

Perbandingan antara berat hasil panenan dibagi dengan berat air yang digunakan.

Penatagunaan Sumberdaya Air

Upaya untuk memerlukan zona pemanfaatan sumber air dan untuk peruntukan air pada sumber air.

Pengembangan Sumberdaya Air

Upaya peningkatan pemanfaatan fungsi sumberdaya air tanpa merusak keseimbangan.

Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air yang dapat berupa banjir, lahar panas/dingin, ombak, gelombang pasang dan lain-lain.

Anomali Iklim

Proses terjadinya perubahan iklim yang melebihi rata-rata normalnya dalam jangka waktu panjang.

Banjir

Genangan yang terjadi akibat curah hujan yang tidak sepenuhnya mampu diserap ke dalam tanah serta akibat terhambatnya aliran pada saluran pembuangan baik alami maupun buatan, yang menyebabkan tanaman menjadi layu.

Bendung

Usaha untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoir. Jumlah dan tinggi permukaan dipengaruhi oleh debit sungai musim hujan dan kemarau.

Bulan Basah

Bulan dengan curah hujan rata-rata $> 100 \text{ mm/bulan}$.

Bulan Kering

Bulan dengan curah hujan $< 60 \text{ mm/bulan}$. Bulan lembab curah hujan sebulan antara 60 – 100 mm.

Curah Hujan Atas Normal

Jika nilai perbandingan terhadap rata-rata 30 tahun $> 115\%$.

Curah Hujan Normal

Jika nilai perbandingan terhadap rata-rata 30 tahun antara 85 % - 115 %.

Curah hujan Bawah Normal

Curah hujan bawah normal jika nilai perbandingan terhadap rata-rata 30 tahun < 85 %.

Daerah Pengaliran Sungai/Daerah Aliran Sungai (DAS)

Suatu kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke sungai atau laut, termasuk dalam hal ini di bawah cekungan air tanah.

Dam Parit

Bangunan / dam yang ditempatkan pada alur-alur hidrologi alam untuk menekan laju run-off dan menampungnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi.

El Nino

Gejala penyimpangan iklim global yang ditandai dengan musim kemarau yang panjang di atas rata-rata normal dengan waktu kejadian yang bersiklus acak.

Kekeringan

Keadaan dimana kebutuhan air tanaman tidak dapat lagi dipenuhi oleh pasokan air baik dari curah hujan maupun irigasi sehingga menyebabkan tanaman menjadi layu.

Rata-rata permulaan musim hujan

Awal terjadinya musim hujan yang diperhitungkan berdasarkan data standar musim hujan selama 30 tahun periode 1961-1990.

Rata-rata periode musim hujan

Kurun waktu berlangsungnya musim hujan yang diperhitungkan berdasarkan data standar musim hujan selama 30 tahun periode 1961-1990.

Irigasi

Usaha penyedian dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian.

Irigasi sederhana

Irigasi yang keadaan airnya tidak dapat diukur disetiap jenis penyaluran dan pembagian air, biasanya dibangun dan dikelola oleh petani/masyarakat.

Irigasi setengah teknis

Irigasi yang hanya dapat diukur pada saluran primer dan sekunder, biasanya dibangun dan dikelola pemerintah.

Irigasi tadih hujan

Irigasi yang sumber airnya berasal dari air hujan jatuh langsung di petakan, dilengkapi dengan saluran pembawa dan pembuangan di TUT.

Irigasi teknis

Irigasi dengan keadaan airnya dapat diukur di setiap tingkatan penyaluran dan pembagian air, biasanya dibangun dan dikelola pemerintah.

Jaringan irigasi

Saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan, dan pembagian.

Jaringan Tersier

Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuangan, berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapnya. Termasuk dalam hal ini jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanan disamakan dengan areal tersier.

Jaringan Utama

Jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung/bendungan) saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya

Petani Pemakai Air

Semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap / penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi / reklamasi rawa dan pemakai air irigasi lainnya.

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang dibentuk secara demokratis.

Pengelolaan Irigasi

Segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan jaringan, pembangunan, rehabilitasi, termasuk perencanaan, pemungutan dan pendayagunaan iuran pengelolaan irigasi.

Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi

FKPIwadah koordinasi dari dan antar Perkumpulan Petani Pemakai Air,

Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan pemerintah daerah dan atau lembaga institusi terkait di daerah irigasi lainnya yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Gabungan perkumpulan petani pemakai air istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan suatu daerah pelayanan irigasi.

Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Upaya untuk memfasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajemen administrasi dan organisasi secara mantap dapat mengelola daerah irigasi/reklamasi rawa secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab.

Komisi Irigasi

Komisi irigasi wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten/Kota, Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Daerah Irigasi

Daerah irigasi kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi (bisa disingkat dengan D I.)

Penyerahan Pengelolaan Irigasi

Penyerahan Pengelolaan Irigasi penyerahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi dari Pemerintah kabupaten/Kota kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air tanpa dibatasi areal pelayanan yang akan diserahkan.

Rehabilitasi dan Peningkatan irigasi yang sifatnya ringan

Kegiatan yang masih dapat ditangani oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak mengganggu keamanan bangunan, tidak merubah fungsi bangunan dan tidak merubah system.

Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangan termasuk pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna.

Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air

Wadah koordinasi yang anggotanya dari berbagai wakil instansi dan “stake holder” yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat wilayah sungai/kabupaten/kota.

Panitia Tata Pengaturan Air

Wadah koordinasi yang anggotanya dari berbagai wakil instansi dan “Stake holder” yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat propinsi.

Partisipatif

Peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.

Irigasi Partisipatif

Pengelolaan irigasi yang melibatkan seluruh stakeholder (Pemerintah, petani, LSM dan lainnya) yang terkait mulai dari perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dengan tujuan akhir untuk mengoptimalkan penggunaan air irigasi, sehingga dapat meningkatkan suatu hasil usaha tani

Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)

Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petaktersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya pada jaringan irigasi pemerintah.

Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES)

Jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya. JIDES dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah.

Irigasi Tanah Dangkal

Irigasi yang bersumber dari air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada kedalaman < 30 meter. Air ini terdapat dalam ruang pori dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air jenuh yang disebut akuifer.

Irigasi Tanah Dalam

Irigasi yang bersumber dari air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah dengan kedalaman > 60 meter. Air tersebut terdapat dalam ruang pori dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air jenuh

yang disebut akuifer.

Irigasi Air Permukaan

Irigasi yang bersumber dari Air Permukaan yang terdapat pada permukaan tanah (sungai, danau, mata air, terjunan air).

Irigasi Tetes dan Irigasi sprinkler

Sistem pemberian air ke lahan pertanian dengan menggunakan tekanan (pressure). Jenisnya curah (sprinkler) dan tetes (drip). Irigasi bertekanan yang dimaksud irigasi sprinkler/tetes.

Sumur Resapan (infiltration Well)

Sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap ke dalam tanah.

Profil Sosial Ekonomi Teknis

Gambaran keadaan social ekonomi, teknis dan kelembagaan yang dijumpai disaat daerah irigasi pada kurun waktu tertentu.

Reklamasi Lahan Rawa

Upaya untuk meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas.

Saluran sekunder

Saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi.

Terasing

Bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat sejajar garis kontour yang dilengkapi saluran pembuangan air (SPA), rorak dan tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi.

Wilayah sungai

Suatu wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih Daerah Pengairan Sungai (DPS), untuk pulau kecil yang luasnya kurang dari 2.00 km², seluruh pulau ditetapkan sebagai satu wilayah sungai.

Embung

Bangunan yang dibuat berdasarkan norma, kriteria dan standar teknis yang telah ditetapkan serta berfungsi sebagai tempat penampungan dan penyimpanan air hujan / run off pada waktu musim hujan, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, namun dalam keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk kepentingan lain seperti : air minum, ternak dan sebagainya.

Chek Dam / Dam Pengendali

Bangunan pengawetan tanah dan air berupa bendungan kecil dengan konstruksi urugan tanah dan batu / beton, dibuat pada alur curam atau sungai kecil yang berfungsi sebagai pengendali sedimen atau penampung air

Luas Baku Irigasi

Areal bersih suatu daerah irigasi yang berdasarkan perencanaan teknis dapat dijadikan areal persawahan (tidak termasuk didalamnya lahan-lahan yang berupa kebun produktif, jalan, kampung, pemukiman, halaman, bukit dan sebagainya).

Areal Potensial Irigasi

Areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) yang telah diselesaikan / pernah diselesaikan.

Areal Belum Potensial Irigasi

Areal Belum Potensial Irigasi areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) yang sedang dalam tahap pembangunan atau belum dibangun tetapi desainnya sudah ada.

Areal Potensial Irigasi yang Petak Tersiernya Sudah Dikembangkan (PTSD)

areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) serta jaringan petak tersiernya telah diselesaikan / pernah diselesaikan.

Areal Potensial Irigasi yang Petak Tersiernya Belum Dikembangkan (PTBD)

Areal Potensial Irigasi yang Petak Tersiernya Belum Dikembangkan (PTBD) areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) yang pernah / telah diselesaikan tetapi jaringan petak tersiernya belum / sedang dibangun.

Jaringan Irigasi Sdh Memadai Pd Daerah Irigasi Desa

Jaringan irigasi yang telah / pernah diselesaikan dan mampu memberikan air sampai ke petak Sawah.

Jaringan Irigasi Belum Memadai Pada Daerah Irigasi Desa

Jaringan irigasi yang sedang / belum dibangun tetapi diperkirakan mampu memberikan air sampai ke petak Sawah.

Luas Baku Daerah Reklamasi Rawa Pasang Surut

Areal bersih dari suatu daerah pengembangan reklamasi rawa pasang surut yang

berdasarkan perencanaan teknis dapat dijadikan Sawah (tidak termasuk didalamnya lahan-lahan pemukiman, bukit dan lain-lain).

Luas Baku Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut (Lebak)

Areal bersih dari suatu daerah pengembangan reklamasi rawa bukan pasang surut yang berdasarkan perencanaan teknis bukan dijadikan areal persawahan (tidak termasuk didalamnya lahan-lahan pemukiman, jalan, bukit dan lain-lain)

Areal Potensial Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut Pada Drainase yang Petak Tersier Sudah Dikembangkan (PTSD)

Areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diatur airnya sesuai dengan kemampuan reklamasi jaringan utama (primer dan sekunder) serta drainase tersiernya telah / pernah diselesaikan

Areal Potensial Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut Pada Drainase yang Petak Tersier Belum Dikembangkan (PTBD)

Areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diatur airnya sesuai dengan kemampuan reklamasi jaringan utama (primer dan sekunder) yang telah / pernah diselesaikan, tetapi drainase tersiernya belum / sedang dibangun (desain tersiernya sudah ada).

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran

PNPM - Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja

Agribisnis

Usaha pertanian yang terdiri atas subsistem hulu, subsistem pertanian primer, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem penunjang

Subsistem Hulu

Kegiatan Ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input pertanian)

Subsistem Pertanian Primer

Kegiatan Ekonomi yang menggunakan sarana produksi, yaitu budidaya

Subsistem Agribisnis Hilir

Kegiatan Ekonomi yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian

Subsistem Penunjang

Kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, dan lain-lain

Perdesaan

Kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulans umberdaya alam dan kearifan lokal (endogeneous knowledge) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada UMKM-K yang feasible tetapi belum bankable termasuk sektor pertanian, memiliki usaha produktif yang didukung dengan Program Penjaminan

KUR Mikro

KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 20 juta per debitur.

KUR Retail

KUR yang diberikan dengan plafon di atas Rp20 juta sampai dengan Rp500 juta per-debitur

Petani

Perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang

Kelompok Tani

Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani

Gabungan Kelompok Tani

Kumpulan beberapa warga kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota

Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 jutatidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300 juta

Usaha Kecil

Usaha Produktif berdiri sendiri yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki penjualan tahunan lebih dari

Rp 300 juta sampai paling banyak Rp 2,5 Miliar

Usaha Menengah

Usaha Produktif yang berdiri sendiri yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar

Perbankan

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang layanan perbankan yang salah satunya dalam bentuk penyaluran kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K termasuk sektor pertanian

Perusahan Penjaminan

perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K termasuk sektor pertanian guna memperoleh kredit/pembiayaan dari Bank

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)

kredit investasi dan/ atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati

Ketahanan Pangan

Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik, jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau

Program Ketahanan Pangan

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/ atau hewani

Bank Pelaksana

Bank Umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menyediakan, menyalurkan, dan menatausahaakan KKP-E

Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

Peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan

Bantuan Kepemilikan (BAKAL)

Bantuan Langsung kepada kelompok tani atau UPJA untuk pembelian alat dan mesin pertanian meliputi traktor Roda 4 dan Pompa Air.

Bantuan Uang Muka (BUMA)

Dana Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani atau UPJA untuk pengadaan alsintan, khususnya Traktor Roda 2.

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan

UPJA Pemula

Kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang belum berkembang dikarenakan masih memiliki alsintan 1 – 4 unit dan 1 – 2 jenis alsintan.

UPJA Berkembang

Kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah berkembang dengan jumlah alsintan yang dimiliki 5 – 9 unit dan jenis alsintan 3 – 4 jenis dan telah memiliki sistem organisasi lengkap

UPJA Profesional

Kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah optimal dan telah memiliki alsintan > 10 serta memiliki > 5 jenis alsintan

Pupuk

Material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun nonorganik (mineral).

Pupuk Urea

Pupuk buatan hasil persenyawaan NH₄ dengan CO₂. Bahan dasarnya biasanya berupa gas alam dan merupakan ikatan hasil tambang minyak bumi. Kandungan N total berkisar antara 45-46%. Dalam proses pembuatan Urea sering terbentuk senyawa biuret yang merupakan racun bagi tanaman jika terdapat dalam jumlah yang banyak. Agar tidak mengganggu kadar biuret dalam Urea harus kurang 1,5-2,0 %. Kandungan N yang tinggi pada Urea sangat dibutuhkan pada pertumbuhan awal tanaman(Ruskandi, 1996)

Pupuk NPK

Pupuk majemuk yang mengandung unsur hara utama lebih dari dua jenis. Dengan kandungan unsur hara Nitrogen 15 % dalam bentuk NH₃, fosfor 15 % dalam bentuk P₂O₅, dan kalium 15 % dalam bentuk K₂O. Sifat Nitrogen (pupuk

pembawa nitrogen) terutama dalam bentuk amoniak akan menambah keasaman tanah yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman (Hardjowigeno, 1992)

Pupuk SP36 (Superphosphat 36)

Pupuk fosfat yang berasal dari batuan fosfat yang ditambang. Kandungan unsur haranya dalam bentuk P₂O₅, SP 36 adalah 46 % yang lebih rendah dari TSP yaitu 36 %. Dalam air jika ditambahkan dengan ammonium sulfat akan menaikkan serapan fosfat oleh tanaman. Namun kekurangannya dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, lamban pemasakan dan produksi tanaman rendah (Hakim, dkk, 1986)

Pupuk ZA

Pupuk kimia buatan yang dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen dan belerang bagi tanaman. Nama ZA adalah singkatan dari istilah Bahasa Belanda, zwavelzureammoniak, yang berarti ammonium sulfat (NH₄SO₄)

Pupuk Organik

Pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa –sisa tanaman, hewan, dan manusia.

Pupuk Organik Cair (POC)

Pupuk yang berbentuk cairan, dibuat dengan cara melarutkan kotoran ternak, daun jenis kacang-kacang dan rumput jenis tertentu ke dalam air. Pupuk ini lebih mudah diserap oleh tumbuhan dibandingkan dengan pupuk lain (pupuk kandang, hijau dan kompos)

Pupuk Organik Granul (POG)

Pupuk yang berbentuk granul (butiran). Bahan yang digunakan bisa dibuat dari pupuk kandang atau kompos, baik kompos dari limbah pertanian, kompos dari sampah organik, atau humus yang langsung diambil dari tanah.

Pestisida

Bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari pest ("hama") yang diberi akhiran cide ("pembasmi")

Insektisida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan serangga (Insect)

Fungisida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan (jamur atau fungi)

Herbisida

Pestisida yang mengendalikan gulma (tumbuhan pengganggu)

Akarisida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan akarina (tungau atau mites)

Moluskisida

Pestisida yang digunakan mengendalikan hama dari bangsa siput (moluska)

Rodentisida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hewan penggerat (tikus)

Nematisida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan cacing (nematode)

Bakterisida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri

Algasida

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan ganggang (algae)

Repelen

Pestisida yang tidak bersifat membunuh, hanya mengusir hama

ZPT

Pestisida yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman yang efeknya bisa memacu pertumbuhan atau menekan pertumbuhan.

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan

